



INTERDEPENDENSI EKONOMI TAIWAN DAN TIONGKOK

Economic Interdependence Between Taiwan and China

SKRIPSI

Oleh:
Erwinta Karnadewi
NIM 190910101001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JEMBER
2024
SKRIPSI**

INTERDEPENDENSI EKONOMI TAIWAN DAN TIONGKOK

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program studi Ilmu Hubungan Internasional (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sosial

Oleh:

Erwinta Karnadewi

NIM 190910101001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL
JEMBER
2024**

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, skripsi ini dipersembahkan kepada:

1. Orang tua tercinta Ibu Wiyant dan, Bapak Erik Karna, serta orang tua wali Ibu Supartin, dan Bapak Khoiri yang tidak lelah mendampingi penulis menggapai cita-cita.
2. Jajaran guru dan dosen yang telah mengantarkan penulis menjadi sarjana sosial.
3. Almamater jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember yang menjadi kebanggaan penulis.

MOTO

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Terjemahan Al-Qur'an Surat Asy-Syarh Ayat 5)*

* Qur'an Kementerian Agama. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/94?from=1&to=8> pada 3 Juni 2024.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erwinta Karnadewi

NIM : 190910101001

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Interdependensi Ekonomi Taiwan dan Tiongkok*

adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Juni 2024

Yang Menyatakan,

Erwinta Karnadewi

NIM 190910101001

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi berjudul *Interdependensi Ekonomi Taiwan dan Tiongkok* telah diuji dan disetujui oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 3 Juli 2024
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Pembimbing	Tanda Tangan
1. Pembimbing Utama Nama : Drs. Bagus Sigit Sunarko, M. Si., Ph.D. NIP : 196802291998031001	(.....)
2. Pembimbing Anggota Nama : Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. NIP : 197701052008012013	(.....)

Penguji	Tanda Tangan
1. Penguji Utama Nama : Drs. Agung Purwanto, M.Si. NIP : 196810221993031002	(.....)
2. Penguji Anggota 1 Nama : Honest Dody Molasy, S.Sos, MA., CIQaR, CIQnR., CRP. NIP : 197611122003121002	(.....)

ABSTRACT

The relationship between Taiwan and China is an interesting discussion in the study of international relations. Politically, the two countries are hostile due to different perceptions of Taiwan's history and sovereign status. However, economically, both Taiwan and China play an important role. This study aims to explore the economic interdependence of the two countries, especially from 2018 to 2022. In order to find out this, the theory of complex interdependence by Robert Keohane and Joseph Nye is used. This research is based on a qualitative descriptive method that uses literature studies in reviewing its sources. The results obtained are that the interdependence of the two countries is formed due to the institutionalization of systematic economic cooperation, the use of small military resources, geographical proximity, relations between communities, and cultural and linguistic similarities.

Keywords: Taiwan, China, Interdependence, Cooperation

RINGKASAN

Interdependensi Ekonomi Taiwan dan Tiongkok; Erwinta Karnadewi; 190910101001; 2024; 68 halaman; Jurusan Hubungan Internasional; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik; Universitas Jember.

Relasi antara Taiwan dan Tiongkok senantiasa menjadi topik yang menarik dalam kajian Hubungan Internasional. Hal ini tidak lain disebabkan karena konflik politik yang sulit direkonsiliasi. Konflik ini bermula ketika Perang Saudara pada 1927 dan berakhir pada 1949. Pada tahun 1949, Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-shek memutuskan melarikan diri ke Pulau Taiwan setelah kekalahan dari Partai Komunis Tiongkok yang dipimpin Mao Zedong. Setelah peristiwa ini, PKT mendeklarasikan pendirian Republik Rakyat Tiongkok di daratan utama Tiongkok.

Sementara itu, KMT mendirikan Republik Tiongkok atau Taiwan sebagai entitas yang terpisah dari Tiongkok. Pemisahan diri oleh Taiwan ini tidak disambut baik oleh Tiongkok. Tiongkok berpendapat bahwa secara sejarah Taiwan adalah bagian dari negaranya. Taiwan tentu dengan tegas menolak klaim ini. Secara *de jure*, Taiwan memang tidak memiliki legitimasi sebagai sebuah negara yang merdeka secara penuh di mata internasional. Namun demikian, secara *de facto*, Taiwan memang memiliki kapasitas dan fungsi sebagai sebuah negara. Termasuk penduduk, pemerintah, wilayah, dan kebijakan luar negerinya yang terpisah dari Tiongkok. Perdebatan mengenai status negara Taiwan ini menjadikan konflik lintas selat berlarut.

Konflik politik ini nyatanya tidak menghentikan interdependensi ekonomi antar keduanya. Dinilai dari volume perdagangan, investasi, serta hubungan masyarakat, Taiwan dan Tiongkok nyatanya menciptakan pola hubungan yang saling bergantung. Meskipun mengalami naik turun akibat perubahan kebijakan dari pihak Taiwan dan sikap Tiongkok, namun hal tersebut tidak menjadikan kedua negara mengalami penurunan kerja sama ekonomi yang signifikan. Data yang disematkan dalam penelitian ini bersumber dari Kementerian Keuangan Taiwan dan Tiongkok, Dewan Urusan Daratan, Statista, serta sumber relevan yang valid. Analisis dalam skripsi ini mencoba menjelaskan alasan fenomena tersebut melalui teori interdependensi kompleks dari Robert Keohane dan Joseph Nye. Temuan yang didapatkan sejauh ini yakni karena kedekatan geografis, kesamaan budaya dan bahasa, hubungan antar masyarakat, serta pelebagaan kerja sama ekonomi yang sistematis antar kedua negara.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Interdependensi Ekonomi Taiwan dan Tiongkok 2018 – 2022”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) di Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan yang disebabkan oleh kemampuan penulis. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si, CIQnR, CSBA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
2. Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.
3. Agung Purwanto, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama menjadi mahasiswa,
4. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si., Ph. D. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Suyani Indriastuti, S.Sos., M.Si., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran, serta tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang telah diberikan.
6. Orang tua tercinta, Ibu Wiyanti dan Bapak Erik Karna, serta orang tua wali, Ibu Supartin dan Bapak Khoiri, serta seluruh keluarga yang telah membesarkan penulis dengan kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1.
7. Sahabat-sahabat tercinta, Laura Zahwa Wa Nadira, Afifah Putri Fathma Ningrum, Dewi Farkhanah, Reka Lucia Ardiansyah, Tiara Candra Mirella,

Salsabila Farah Safitri, Yazzaka Arifah Mayasari, Alyssa Ananda Achmad, Adibah Mutia Khanza, serta teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah menemani serta mendukung penulis.

8. Teman-teman KKN 37 Desa Wringin, Kabupaten Bondowoso, Iwanah Bil Faqih, Ria Yunika Purwatiningsih, Aldita Walida Darajat, Diah Ayu Rizki Pitaloka, Martina Alvianti Setyoningrum, Mochammad Cholil, Muhammad Rizqi Firdaus, Rifky Martha Hadian Firmana, dan Sukma Adi Darmawan yang telah menorehkan kenangan indah semasa melaksanakan kuliah kerja nyata.
9. Keluarga besar Korps Relawan Kampus Universitas Jember yang telah memberikan pengalaman dan cerita selama menempuh bangku perkuliahan.
10. Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso yang menjadi jembatan penulis dalam belajar melalui pengalaman magang selama satu semester.
11. Seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Jember, 23 Juni 2024

Penulis,

Erwinta Karnadewi

NIM 190910101001

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN.....	iii
MOTO	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
ABSTRACT	vii
RINGKASAN	viii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.4.1 Manfaat Teoritis	8
1.4.2 Manfaat Praktis.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kerangka Teori dan Konsep.....	9
2.1.1 Teori Interdependensi Kompleks.....	9
2.1.2 Konsep Interdependensi	Error! Bookmark not defined.
2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian.....	14
2.3 Penelitian Terdahulu	15
2.4 Ringkasan Penerapan Teori.....	17
2.5 Argumen Utama.....	18
BAB 3 METODE PENELITIAN	20
3.1 Pendekatan Penelitian	20
3.2 Batasan Penelitian.....	20
3.2.1 Batasan Materi.....	21
3.2.2 Batasan Waktu.....	21

3.3 Pengumpulan Data	22
3.3.1 Jenis Data	22
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data	22
3.4 Keabsahan Data	23
3.5 Analisis Data.....	24
3.6 Sistematika Penulisan.....	24
4.1 Pergeseran Kekuasaan di Taiwan dan Dinamika Hubungan Lintas Selat	27
4.2 Kebijakan Tiongkok dalam Hubungan Lintas Selat	38
4.3 Arus Perdagangan dan Investasi Lintas Selat.....	45
4.3.1 Perdagangan Lintas Selat.....	45
4.3.2 Investasi Lintas Selat	49
BAB 5 ANALISIS INTERDEPENDENSI EKONOMI TAIWAN DAN TIONGKOK	
PERIODE 2018 - 2022	55
5.1 Interdependensi Ekonomi Taiwan dan Tiongkok di Tengah Konflik Politik	Error!
Bookmark not defined.	
5.1.1 Faktor Kedekatan Geografis	60
5.1.2 Faktor Kesamaan Bahasa dan Budaya.....	Error! Bookmark not defined.
5.1.3 Faktor Hubungan Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
BAB 6 KESIMPULAN	68
6.1 Kesimpulan.....	82

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Pertukaran Perdagangan Lintas Selat (2011 – 2015).....	33
Tabel 5. 1 Pertukaran Kunjungan antara Warga Taiwan ke Tiongkok dan Warga Tiongkok ke Taiwan	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Perbandingan Nilai Ekspor antara Taiwan dengan Tiongkok.....	4
Gambar 1. 2 Perbandingan Nilai Impor Taiwan dan Tiongkok.....	6
Gambar 4. 1 Perdagangan Lintas Selat dalam US\$, 1991 – 2022	30
Gambar 4. 2 Neraca Perdagangan Barang antara Taiwan dengan Tiongkok dan Hong Kong (dalam miliar dolar AS).....	37
Gambar 4. 3 Nilai Ekspor Barang dari Taiwan ke Tiongkok, 2011 hingga 2021 (dalam miliar dolar AS)	47
Gambar 4. 4 Total Persediaan Investasi Luar Negeri Langsung dari Tiongkok ke Taiwan selama 2011 – 2021 (dalam juta dolar AS).....	52
Gambar 4. 5 Nilai Investasi Langsung Luar Negeri dari Taiwan ke Tiongkok (2011 – 2022) (dalam miliar dolar AS)	54
Gambar 5. 1 Peta Taiwan dan sebagian Tiongkok. Error! Bookmark not defined.	
Gambar 5. 2 Opini Publik Terhadap Hubungan Taiwan dengan AS dan Tiongkok di Taiwan tahun 2020, dengan afiliasi partai politik.....	75
Gambar 5. 3 Pengunjung Bulanan Taiwan yang berasal dari Tiongkok sejak Mei 2021 hingga Mei 2022	76

DAFTAR SINGKATAN

ARATS = Association for Relations Across the Taiwan Straits

DPP = Democratic Progressive Party

ECFA = Economic Cooperation Framework Agreement

FDI = Foreign Directs Investment

KMT = Kuomintang

MAC = Mainland Affairs Council

OECD = Organisation for Economic Co-operation and Development

PKT = Partai Komunis Tiongkok

PLA = People's Liberation Army

PRC = People's Republic of China

RRT = Republik Rakyat Tiongkok

SEF = Straits Exchange Foundation

UNCTAD = United Nations Conference on Trade and Development

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kajian ilmu Hubungan Internasional, hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok menjadi pembahasan yang menarik. Hal ini dikarenakan dinamika dan kompleksitasnya. Pasca Perang Dunia II dan kalahnya Jepang, Pulau Formosa¹ diberikan kembali kepada Tiongkok setelah berada di bawah kekuasaannya sejak Perang Sino-Jepang pertama yang dimulai pada 1895. Selama Perang Dunia II, Tiongkok dikuasai oleh Kaum Nasionalis atau Kuo Min Tang yang dipimpin oleh Chiang Kai-sek dan bernama resmi Republik Tiongkok (*Republic of China*). Republik Tiongkok sendiri merupakan hasil dari revolusi 1911 setelah lengsernya kekaisaran Qing (Li, 2016). Seiring berjalannya waktu, pada 1947 terjadi perang saudara di Tiongkok yang bermula dari perebutan pengaruh dan legitimasi kelompok komunis dan kaum nasionalis di Tiongkok. Perang saudara ini melibatkan Partai Komunis Tiongkok pimpinan Mao Zedong dan Kuo Min Tang yang dipimpin oleh Chiang Kai-sek. Perang saudara ini berujung pada pemisahan Taiwan dari Tiongkok dengan dibentuknya pemerintahan yang terpisah dengan sistem politik yang berbeda (Westad, 2003). Maka dari itu, tidak mengherankan apabila eksistensi isu Taiwan versus Tiongkok menjadi kajian yang atraktif.

Setelah terjadinya pemisahan ini, status politik Taiwan hingga kini masih diperdebatkan. Hal ini karena kedaulatan Taiwan sebagai sebuah negara masih menjadi kontroversi di dunia internasional. Terlebih bagi pihak Tiongkok yang tetap memiliki ambisi untuk menarik kembali Taiwan sebagai bagian dari negaranya (Brands, 2023). Gertakan baik berupa ancaman hingga tindakan militer telah dilakukan Beijing untuk mengintimidasi Taipei. Pada April 2023, ketegangan negara lintas selat meningkat karena pertemuan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen

¹ Sebutan untuk pulau Taiwan yang diberikan oleh penjelajah dari Portugis pada abad ke-16.

dengan Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy. Dilansir dari CNN World (2023), pertemuan itu ditanggapi dengan agresif oleh Tiongkok. Kelompok pasukan yang bernama *People's Liberation Army* (Tentara Pembebasan Rakyat)² melaksanakan simulasi blokade Taiwan bersamaan dengan dikirimkannya kapal induk dan 12 kapal angkatan laut serta ratusan pesawat tempur. Para analis menyebutkan bahwa Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari negaranya menganggap ancaman militer tersebut sebagai peringatan serius bagi tindakan 'separatis' Taiwan. Joseph Wu sebagai Menteri Luar Negeri Taiwan pun menangkap sinyal bahwa perang akan dilancarkan oleh Tiongkok sebagai usahanya merebut kembali Taiwan (E. Cheung, 2023). Hal inilah yang lantas menjadikan status politik Taiwan masih dipertanyakan hingga kini.

Topik mengenai status politik Taiwan adalah isu yang kontroversial. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan elaborasi berdasarkan status entitas politik berdasarkan hukum internasional. Secara *de facto*, Taiwan berfungsi sebagai negara yang independen dengan pemerintahan, sistem politik, serta kebijakan luar negerinya sendiri (Günther et al., 2022). Akan tetapi, secara *de jure*, Tiongkok masih menganggap Taiwan sebagai pemberontak yang harus segera diintegrasikan kembali ke dalam wilayahnya (S. Lee, 1996). Presiden Xi Jinping mendeklarasikan bahwa reunifikasi dengan Taiwan harus terlaksana (BBC, 2021). Tidak hanya itu, Tiongkok juga menekan Taiwan melalui implementasi "One China Principle". Melansir Komunique Shanghai 1972, prinsip ini berbunyi "hanya ada satu China di dunia, Taiwan adalah bagian yang tidak dapat dicabut dari wilayah Tiongkok, dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok adalah satu-satunya pemerintah sah yang mewakili seluruh China." (MacArthur, 1972). Prinsip ini meruncingkan konflik Taiwan dengan Tiongkok karena berperan signifikan bagi aspek politik, ekonomi, dan diplomasi. Melalui prinsip ini, hanya sedikit negara yang mengakui kedaulatan Taiwan sebagai suatu negara. Selain itu, partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional juga terbatas karena status Taiwan yang tidak pasti. Maka dari itu,

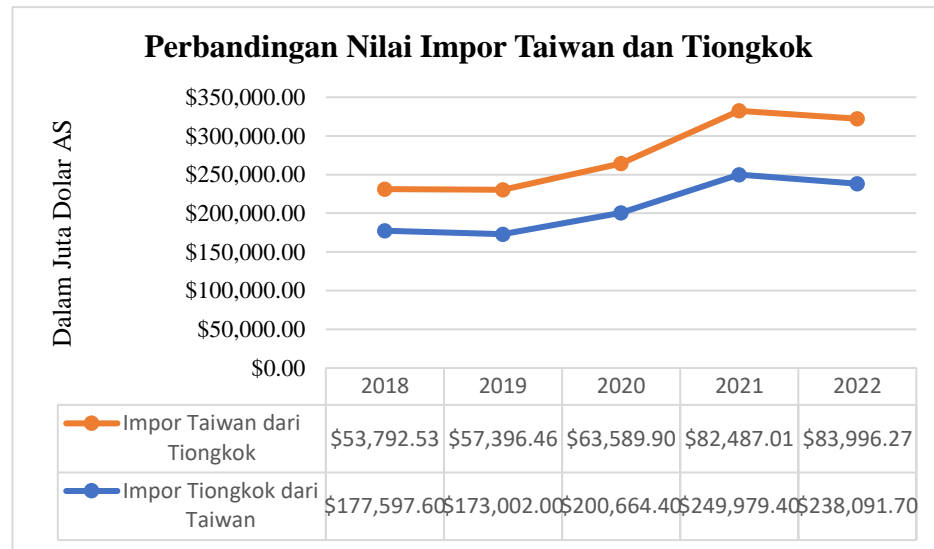
² *People's Liberation Army* (Tentara Pembebasan Rakyat) adalah kekuatan militer utama dari Republik Rakyat Tiongkok dan sayap bersenjata dari Partai Komunis Tiongkok. Pasukan ini terdiri dari lima matra, antara lain Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Roket, dan Pasukan Pendukung Strategis (Sarotte, 2014)

dapat dikatakan bahwa *One China Principle* merupakan salah satu penyebab ketidakpastian status politik Taiwan.

One China Principle juga menjadi limitasi bagi Taiwan untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih luas dan kuat dengan negara lain. Penyebabnya adalah prinsip ini memiliki implikasi yang signifikan terhadap pengakuan Taiwan sebagai sebuah entitas politik. Prinsip ini menekankan bahwa Taiwan tidak diakui sebagai negara berdaulat oleh Beijing dan status politiknya tunduk pada otoritas pemerintah Tiongkok. Negara aliansi bagi Taiwan seperti Jepang pun hingga kini tidak memiliki hubungan diplomatik yang formal dengan negara tersebut (Hughes, 2023). Namun demikian, hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Jepang tetap berjalan dengan didirikannya lembaga khusus yang mengurus perdagangan. Seirama dengan hubungan Taiwan - Jepang, Taiwan dengan Korea Selatan pun tidak memiliki hubungan diplomatik yang resmi (S. Lee, 2022). Demikian pula dengan hubungan Taiwan dengan Hong Kong, negara-negara di Asia Tenggara, India, beberapa negara di Timur Tengah, Israel, hingga Eropa Barat (J. F. Copper, 2013). Negara-negara di kawasan tersebut hanya memiliki hubungan terbatas pada perdagangan saja dengan Taiwan. Hubungan berbasis perdagangan ini menjadi harapan bagi Taiwan untuk mempertahankan dan meningkatkan hubungan non-politik yang diharapkan memunculkan dukungan bagi kedaulatannya (J. F. Copper, 2013). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila keberadaan *One China Principle* adalah tantangan tersendiri bagi Taiwan.

Berbagai konflik politik dari perbedaan persepsi antara negara lintas selat nyatanya tidak menimbulkan surutnya saling ketergantungan ekonomi antar keduanya. Taiwan dan Tiongkok mengalami interdependensi ekonomi apabila menggunakan pengukuran yang ditawarkan oleh ahli yang mengungkapkan bahwa aktivitas perdagangan bilateral berupa ekspor-impor dapat dijadikan indikator telah terjadi interdependensi ekonomi (Polachek, 1980). Selain itu, diperlukan analisis terhadap arus investasi antar negara lintas selat. Dengan memperhitungkan beberapa indikator tersebut, maka dapat disebutkan bahwa perkembangan globalisasi dalam ranah ekonomi telah meningkatkan kadar interdependensi

(Zaroni, 2015). Berdasarkan data yang terkumpul, berikut disajikan data ekspor-impor Taiwan dan Tiongkok sejak 2018 – 2022.



Gambar 1. 1 Perbandingan Nilai Ekspor antara Taiwan dengan Tiongkok

Sumber: situs resmi Kepabeanan Taiwan dan Tiongkok

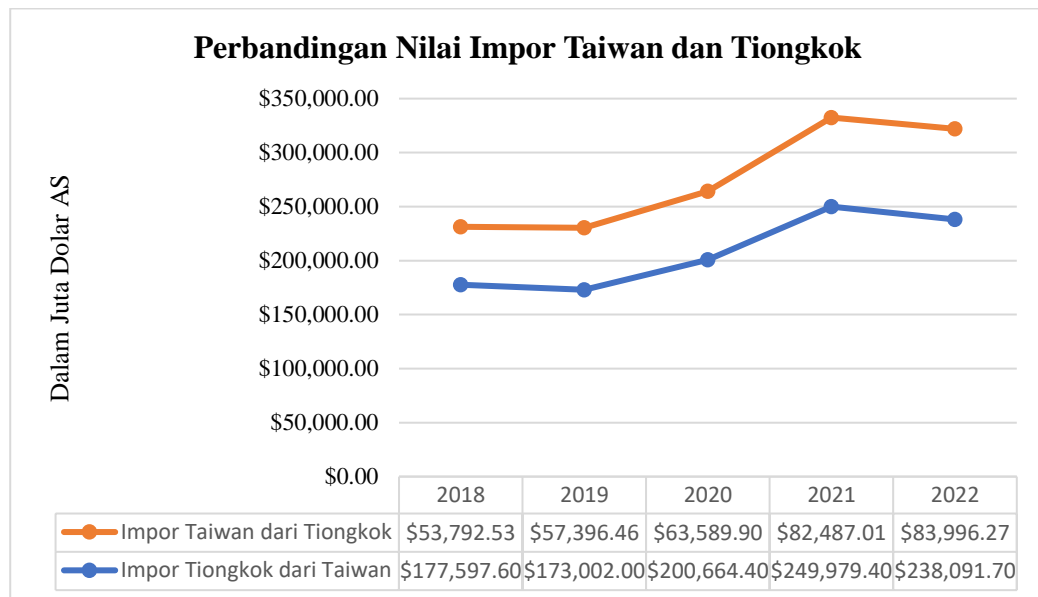
(<http://english.customs.gov.cn> dan <https://www.trade.gov.tw>)

Data di atas disajikan untuk melihat perkembangan nilai perdagangan total antara Taiwan dan Tiongkok. Volume impor dan ekspor yang meningkat dapat menunjukkan indikasi tingkat aktivitas perdagangan. Pada 2018, nilai ekspor dari Taiwan ke Tiongkok berjumlah \$96,499.29 dengan komoditas perdagangan terbesar berupa mesin dan alat elektronik. Sementara itu, nilai ekspor dari Tiongkok ke Taiwan pada tahun yang sama berjumlah \$48,646.70. Menurut Mikron Holding AG (2018), nilai ekspor yang besar ini disebabkan oleh Tiongkok sebagai pusat manufaktur dunia. Berikutnya pada 2019, nilai ekspor Taiwan ke Tiongkok berjumlah \$91,790.12. Nilai ekspor yang menurun pada 2019 dari Taiwan ke Tiongkok ini disebabkan oleh situasi politik yang memanas. Pemerintah Beijing mendiskreditkan ekonomi Taipei yang dipimpin oleh DPP (The Economist, 2019). Akan tetapi, dilansir dari sumber yang sama, pada 2019 Tiongkok mengumumkan 26 langkah yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi dengan Taiwan. Di lain sisi, nilai ekspor dari Tiongkok ke Taiwan meningkat dengan

jumlah \$55,080.20. Menurut laporan Central Bank (2019), Tiongkok adalah salah satu dari mitra dagang terbesar bagi Taiwan.

Kemudian, pada 2020 nilai ekspor dari Taiwan ke Tiongkok berjumlah \$102,446.98 dan sejumlah \$60,141.70 ekspor dari Tiongkok ke Taiwan. Peningkatan tersebut terutama berasal dari suku cadang dan komponen elektronik serta produk informasi, komunikasi dan video. Bagi pihak Taiwan, terjadi peningkatan ekspor melebihi impor, surplus perdagangan dengan Tiongkok meningkat menjadi \$86.671 juta pada tahun 2020 (Miranville, 2021). Tiongkok tetap menjadi sumber terbesar surplus perdagangan Taiwan. Pada 2021, ekspor dari Taiwan ke Tiongkok kembali meningkat menyentuh jumlah \$125,903.68. Demikian pula dengan ekspor Tiongkok ke Taiwan yang melejit ke angka \$78,634.80. Dilansir dari laporan tahunan Central Bank of Taiwan, Tiongkok berturut-turut tetpa menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan dengan perdagangan komponen elektroniknya.

Sementara itu, pada 2022 Taiwan menduduki posisi ke-4 sebagai mitra dagang terpenting bagi Tiongkok. Dilansir dari situs Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok, tercatat sebesar \$81,586.8 nilai komoditas diekspor ke Taiwan. Sementara itu pada tahun yang sama, Taiwan mengekspor total komoditas bernilai \$121.113,9 ke Tiongkok. Kemudian, Tiongkok juga menerima impor dari Taiwan dengan nilai \$238.091,7. Demikian pula dengan Taiwan yang menerima impor dari Tiongkok sebesar \$83.996,2 pada 2022. Sejak 2018, menurut catatan dari Kepabeanan Republik Rakyat Tiongkok, nilai impor dari Taiwan jauh lebih besar daripada nilai ekspor Tiongkok ke Taiwan. Tiongkok mengalokasikan mayoritas belanjanya untuk membeli *chip* ke Taiwan (Williams, 2022). Bukan tanpa alasan, menurut Michael Orme, Tiongkok tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri akan *chip* selama setidaknya satu dekade lagi. Tercatat kurang lebih US\$32,9 miliar digelontorkan oleh Tiongkok untuk membeli *chip* dari Taiwan (VOA, 2020).



Gambar 1. 2 Perbandingan Nilai Impor Taiwan dan Tiongkok

Sumber: situs resmi Kepabeanan Taiwan dan Tiongkok
(<http://english.customs.gov.cn> dan <https://www.trade.gov.tw>)

Tidak berbeda jauh dengan nilai ekspor, nilai impor antara kedua negara menunjukkan perkembangan yang baik. Pada 2018, impor oleh Taiwan ke Tiongkok menyentuh angka \$53,792.53. Sementara nilai impor oleh Tiongkok dari Taiwan menyentuh angka \$177,597.60. Pada 2019, impor Taiwan dari Tiongkok meningkat dengan total \$57,396.46. Meskipun pada tahun ini jumlah impor oleh Tiongkok dari Taiwan menurun dengan jumlah \$173,002, namun di tahun berikutnya impor dari Taiwan meningkat hingga menyentuh nilai \$200.664.40. Demikian pula dengan nilai impor Taiwan dari Tiongkok yang menyentuh angka \$63,589.90. Pada 2021, nilai impor kedua negara menunjukkan perkembangan yang baik. Impor Taiwan dari Tiongkok menyentuh nilai \$82,487,01 dan nilai impor Tiongkok dari Taiwan menyentuh nilai \$249,979.40. Tren impor antar kedua negara menunjukkan penurunan pada 2022 dengan nilai impor Taiwan dari Tiongkok sebesar \$83,996.27 dan nilai impor Tiongkok dari Taiwan sebesar \$238,091.70. Dilansir dari Asia Pacific Foundation of Canada (2022), hal ini disebabkan oleh larangan impor oleh Tiongkok karena kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke Taiwan. Pelosi mendorong industri Taiwan untuk

memisahkan diri dari Tiongkok. Akan tetapi, penurunan impor tersebut tidak menggoyahkan posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Taiwan. Dari paparan di atas, maka dapat dilihat bahwa interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok tetap terjalin secara erat meskipun sempat mengalami penurunan volume perdagangan.

Selain nilai perdagangan yang ditunjukkan dengan data ekspor dan impor, berdasarkan pernyataan Kementerian Perekonomian Taiwan, sebesar US\$ 2,7 juta investasi masuk ke Taiwan dari Tiongkok dari bulan Januari – Juni 2021. Sementara itu, Taiwan diklaim menjadi salah satu investor terbesar di Tiongkok dengan 44.823 investasi dengan nilai total US\$ 198,28 miliar pada 2021 (Government of Taiwan, 2021). Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Taiwan dan Tiongkok memiliki hubungan ekonomi yang erat meskipun menghadapi konflik politik yang kompleks. Taiwan, sebagai sebuah pulau yang terletak di Selat Taiwan, memiliki posisi strategis yang penting dalam hubungan ekonomi dengan Tiongkok. Interdependensi ekonomi ini mencakup berbagai aspek, seperti perdagangan bilateral, investasi, kerja sama industri, dan hubungan keuangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini, dipaparkan mengenai interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok meskipun memiliki konflik politik.

1.2 Perumusan Masalah

Konflik politik yang terjadi antar negara lintas selat nyatanya tidak menyurutkan interdependensi ekonomi antar keduanya. Hal ini menunjukkan adanya hubungan ekonomi yang memberi keuntungan yang setara. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diangkat rumusan masalah sebagai berikut: **“Mengapa terjadi interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok di tengah konflik politik?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interdependensi ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok.

1.4 Manfaat Penelitian

Menurut Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember (2021), manfaat penelitian menguraikan kegunaan hasil penelitian yang terbagi menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis (Tim Penyusun, 2021).

Berikut merupakan manfaat-manfaat yang dikehendaki penulis dari penelitian ini:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya kajian tentang implementasi teori interdependensi kompleks pada negara dengan hubungan yang kurang harmonis dalam konteks politik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya dengan tema interdependensi ekonomi antar dua negara.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Teori Interdependensi Kompleks

Pasca berakhirnya Perang Dingin, terdapat transformasi besar dalam tatanan politik internasional. Agenda kekuatan militer dan keamanan tradisional telah bergeser kepada tatanan global yang stabil dan damai yang lebih kondusif bagi pembangunan ekonomi (Rana, 2015). Muncul kesadaran bagi negara-negara maju bahwa kekuatan tidak hanya diukur melalui kecanggihan senjata, namun juga perekonomian yang efisien dan teknologi yang maju (Keohane & Nye, 2011). Perkembangan ini memulai perdebatan yang menarik antara kelompok realis dan liberalis. Masing-masing kelompok berusaha menjelaskan bahwa argumennya valid dan relevan untuk memaparkan fenomena yang sedang terjadi.

Teori interdependensi kompleks yang dikembangkan oleh Robert O. Keohane dan Joseph S. Nye pada 1970-an merupakan salah satu penantang asumsi realisme. Saat realisme berfokus pada kemampuan militer dan ekonomi untuk menjelaskan perilaku negara, maka interdependensi kompleks membahas sisi lainnya. Interdependensi kompleks menyoroti munculnya aktor-aktor transnasional yang berhadapan dengan negara. Bersamaan dengan ini, Keohane dan Nye menolak dengan tegas bahwa negara adalah aktor tunggal dalam Hubungan Internasional. Interdependensi kompleks juga terfokus pada peran rezim dan institusi internasional dalam kebijakan luar negeri (Rana, 2015). Menurut Keohane dan Nye, kemunculan rezim dan institusi internasional ini mengimbangi kemampuan militer tradisional. Selain itu, kedua ahli juga menyebutkan bahwa kesejahteraan dan perdagangan merupakan fokus utama dalam kebijakan luar negeri dibandingkan masalah status dan keamanan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa teori ini adalah penantang realisme.

Teori ini muncul ketika realisme mendominasi penjelasan terkait apa yang terjadi dalam Hubungan Internasional. Hal ini disebabkan karena selama Perang Dingin, negara adidaya menggunakan ancaman kekerasan untuk mencegah serangan negara lain. Didukung pula oleh penelitian John Vasquez yang menyebutkan bahwa hingga 1970-an, 90% hipotesis pemikir HI dapat dijelaskan melalui realisme. Keohane dan Nye lantas menawarkan pemikiran yang kontras kala itu. Bukan tanpa alasan, berbagai peristiwa seperti kekalahan AS dalam Perang Vietnam hingga embargo minyak oleh OPEC pada 1972. Akibat embargo minyak ini, sifat kekuasaan dalam sistem internasional bergeser karena negara dengan kekuatan militer yang lemah nyatanya masih memiliki pengaruh yang cukup besar. Kemunculan krisis ekonomi pasca kejadian ini yang disebabkan oleh runtuhnya sistem Bretton Woods menunjukkan bahwa hegemoni juga rentan dalam dunia yang saling bergantung. Isu-isu baru yang tidak mampu dijawab oleh realisme lantas menguatkan posisi gagasan Keohane dan Nye yang tertuang dalam *Power and Interdependence*. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila disebutkan bahwa pemikiran Keohane dan Nye adalah tantangan bagi realisme.

Berbicara mengenai interdependensi kompleks, maka tidak dapat terlepas dari pembahasan mengenai globalisasi. Menurut Walker (2013), melalui *Power and Interdependence*, pembahasan mengenai globalisasi dibahas secara sistematis. Pada 1977 ketika Keohane dan Nye merilis karya mereka, saling ketergantungan merupakan konsep yang baru. Saling ketergantungan ini dipercepat oleh kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi yang memungkinkan pertukaran idem barang, serta orang dengan mudah. Untuk mendukung argumentasi mereka, Keohane dan Nye menyebutkan bahwa perdagangan internasional telah tumbuh sebesar 7% per tahun. Bagi sebagian besar negara di Eropa dan Amerika Utara, perdagangan internasional ini menjadi proporsi yang lebih besar daripada produk nasional brutonya. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa globalisasi berperan penting bagi perkembangan interdependensi.

Dalam *Power and Interdependence*, Keohane dan Nye juga menyebutkan beberapa kriteria terjadinya interdependensi kompleks, antara lain:

1. *Multiple channels connect societies.* Keohane dan Nye melalui *Power and Interdependence* (2011) menyatakan bahwa ruang lingkup kebijakan dalam negeri semakin luas, bahkan melampaui batas negara. Pernyataan ini lantas dielaborasi oleh Walker (2013), bahwa kebijakan luar negeri di era saling ketergantungan berbeda karena adanya berbagai saluran yang menghubungkan masyarakat. Dengan berbagai kemudahan dan besaran frekuensi yang lebih luas, maka para birokrat dan elit non-pemerintah dapat bertemu untuk bernegosiasi dan mengoordinasikan berbagai kebijakan global. Pola dan alur komunikasi ini lantas menciptakan lapisan interaksi yang belum terjamah oleh kaum realis. Interaksi yang tercipta dari terbukanya berbagai saluran ini sering kali menciptakan konsekuensinya tersendiri. Keohane dan Nye (2011) menegaskan bahwa komunikasi antarnegara yang semakin intens antarnegara berimbas pada kebijakan ekonomi luar negeri yang bersinggungan dengan aktivitas ekonomi dalam negeri. Artinya, batas antara kebijakan luar negeri dan domestik suatu negara menjadi kabur dalam era saling tergantung. Tidak hanya itu, kedua ahli ini juga menemukan bahwa perkembangan paralel isu-isu lingkungan dan kontrol terhadap teknologi turut memperkuat hal tersebut. Negara sebagai unit tidak berdiri sendiri dan menjadi arus utama dalam hubungan internasional, nyatanya berbagai hasil kebijakan politik dalam negeri dapat dikaitkan dengan kebijakan yang berasal dari luar negeri.
2. *Absence of hierarchy among issues.* Dalam ketergantungan yang kompleks, agenda hubungan antarnegara terdiri dari berbagai isu yang tidak tersusun dalam suatu hierarki yang jelas dan konsisten. Klasifikasi *high politics* dan *low politics* tidak lagi relevan dengan kenyataan yang terjadi dalam sistem internasional kini. Isu-isu antarnegara menjadi semakin tumpang tindih dan saling terkait.

3. *Minor role of military force*. Kekuatan militer tidak lagi menjadi prioritas utama suatu negara. Penggunaan militer dianggap menghabiskan lebih banyak sumber daya namun kerap kali gagal mencapai berbagai tujuan politik. Keohane dan Nye memetakan indikator ini sebagai akibat dari semakin berganya masalah dan meningkatnya ketergantungan ekonomi yang dimiliki berbagai negara di seluruh dunia. Menurut Keohane dan Nye (2011), penggunaan kekuatan militer dalam kondisi yang saling bergantung akan merusak hubungan serta menghilangkan berbagai keuntungan yang tercipta. Kedua ahli ini berpendapat bahwa penurunan penggunaan kekuatan militer sebagai alat kebijakan dan intensifikasi kemitraan ekonomi akan menguatkan kerja sama antar negara (Keohane & Nye, 2011).

Indikator-indikator ini tidak serta merta muncul begitu saja. Menurut rangkuman oleh Walker (2013) mengenai *Power and Interdependence*, saling ketergantungan antar negara semakin intens karena kemajuan teknologi dan meningkatnya tingkat perdagangan. Walker (2013) mengklaim bahwa kajian ulang Keohane dan Nye terkait dengan rezim internasional merupakan kontribusi paling berpengaruh dari karya keduanya. Keohane dan Nye berpendapat bahwa prosedur, aturan, serta institusi dalam rezim internasional mendorong pemerintah mengatur hubungan transnasional antar negara. Dengan mendefinisikan ulang terkait dengan rezim, Keohane dan Nye menyediakan alat ukur untuk memahami politik di dunia yang saling bergantung. Maka dari itu, melalui kajian ulang mengenai rezim internasional ini, maka lahir tiga indikator utama penyebab munculnya interdependensi kompleks.

Konsep interdependensi telah ada sejak lama dalam studi hubungan internasional, namun teori interdependensi kompleks mengembangkannya menjadi konsep yang lebih komprehensif dan sistematis. Interdependensi kompleks merupakan perspektif neoliberal yang dapat digunakan untuk memahami kesediaan negara-negara untuk menjalin aliansi kerja sama antara satu dengan yang lain dalam

kondisi anarki dan ketergantungan (Walker, 2013). Teori ini mengemukakan bahwa negara-negara di dunia ini semakin tergantung satu sama lain melalui berbagai jaringan dan saluran, baik politik, ekonomi, sosial, maupun keamanan. Menurut teori ini, interdependensi antarnegara semakin kompleks dan saling terkait dengan meningkatnya jumlah aktor, saluran, dan tingkat ketergantungan antara negara. Interdependensi membentuk tatanan global yang semakin kompleks, dinamis, dan tidak bisa dipisahkan dari sistem global secara holistik (Rana, 2015). Teori interdependensi kompleks mengasumsikan bahwa kepentingan nasional suatu negara tidak selalu bertentangan dengan kepentingan nasional negara lain, namun bisa saja kepentingan tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Seperti yang ditegaskan oleh Rana (2015) *“In this system of ‘Interdependence’, states cooperate because it is in their own common interest and direct result of this cooperation is prosperity and stability in the international system”*. Oleh karena itu, kerja sama internasional menjadi semakin penting dalam mencapai tujuan bersama serta memelihara stabilitas sistem internasional.

Lebih jauh, dalam *Power and Interdependence* (2011), Keohane dan Nye menjelaskan bahwa dalam pembicaraan mengenai interdependensi, maka globalisme tidak dapat ditinggalkan. Globalisme menurut kedua ahli ini salah adalah keadaan dunia yang melibatkan jaringan yang saling bergantung dalam cakupan multikontinental. Globalisme merupakan salah satu konsep interdependensi terhubung melalui arus dan pengaruh modal, barang, informasi, sumber daya alam, dan pengaruh lingkungan. Globalisme meningkatkan saling ketergantungan yang luas secara spasial. Sebagai suatu konsep interdependensi, globalisme memiliki beberapa dimensi. Dimensi pertama yakni globalisme ekonomi, di mana arus barang, jasa, dan modal terlibat di dalamnya. Selanjutnya yakni globalisme militer yang mengacu pada interdependensi yang melibatkan kekuatan militer. Selanjutnya yakni globalisme lingkungan yang mengacu pada perubahan zat dan material di atmosfer atau lautan serta substansi biologis lain yang memengaruhi kesehatan serta kesejahteraan manusia. Selanjutnya adalah globalisme sosial budaya yang melibatkan pergerakan ide, informasi, dan gambaran

mengenai pergerakan manusia yang membawa berbagai ide dan informasi. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa globalisme memberikan kerangka konsep yang lebih luas untuk memahami kebutuhan akan kerja sama global, sementara saling ketergantungan yang kompleks menawarkan kerangka kerja yang lebih rinci untuk memahami dinamika hubungan internasional.

Dalam konteks interdependensi kompleks antara Taiwan dan Tiongkok, terdapat berbagai saluran yang menghubungkan masyarakat kedua negara, terutama dalam aspek ekonomi. Saluran-saluran ini memperkuat saling ketergantungan dan menciptakan hubungan yang kompleks antara Taiwan dan Tiongkok. Perdagangan bilateral yang ekstensif, dengan Tiongkok mengekspor barang senilai \$6,55 miliar ke Taiwan dan mengimpor \$17,7 miliar dari Taiwan pada Mei 2024 (CPT Taiwan, 2024), menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat. Taiwan memainkan peran penting dalam rantai nilai global industri semikonduktor, mendominasi manufaktur semikonduktor global dengan memproduksi lebih dari 60% semikonduktor dunia (Hsu, 2023). Investasi lintas batas, seperti lebih dari \$200 miliar investasi perusahaan Taiwan di Tiongkok sejak awal 1990-an (Chen, 2022), semakin mengintegrasikan ekonomi kedua negara. Peningkatan frekuensi dan efisiensi transportasi udara antara Taiwan dan Tiongkok memfasilitasi pergerakan tenaga kerja (Wang, 2023), sementara kolaborasi teknologi, terutama dalam industri elektronik, melibatkan transfer teknologi dari Taiwan ke Tiongkok (Lin, 2022). Saluran-saluran ini menggambarkan kompleksitas dan kedalaman interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok, menciptakan jaringan interaksi yang padat yang mempengaruhi berbagai kelompok, organisasi, dan kebijakan di kedua negara.

2.2 Kerangka Pemikiran Operasional Penelitian

Penelitian ini memfokuskan analisis dan identifikasi fenomena interdependensi, utamanya yang terjadi antara Taiwan dengan Tiongkok. Kedua negara memiliki pola relasi yang dinamis dikarenakan kondisinya yang dalam ranah politik sangat konfliktual, namun memiliki saling ketergantungan ekonomi yang cukup tinggi. Dari kesenjangan ini, penelitian ini akan menimbang bagaimana

proses saling ketergantungan ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan terjadi melalui aspek-aspek yang dikemukakan oleh Keohane dan Nye dalam teori interdependensi kompleks. Melalui aspek-aspek tersebut, penelitian ini menelaah mengenai kemungkinan kontinuitas interdependensi Taiwan dengan Tiongkok secara holistik.

Selanjutnya, setelah melaksanakan tinjauan literatur, penelitian ini menggunakan pendekatan teori interdependensi kompleks. Kajian dalam teori ini dinilai mampu menjelaskan fenomena yang diangkat dalam penelitian ini. Peneliti lantas mengembangkan pertanyaan penelitian dari latar belakang yang telah tersusun demi terarahnya analisis data yang berkaitan dengan konsep interdependensi, relasi Taiwan – Tiongkok, serta hasil kajiannya menggunakan teori interdependensi kompleks. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi literatur. Studi literatur digunakan karena sumber data utama yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah buku, jurnal, dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah salah satu bagian terpenting dari penelitian ilmiah. Penelitian terdahulu diidentifikasi sebagai seluruh penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sedang digali oleh peneliti lainnya melalui diskusi dan studi. Untuk membahas suatu topik tertentu, analisis terhadap penelitian terdahulu dilaksanakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara penelitian-penelitian tersebut dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian-penelitian terdahulu berkontribusi dalam meningkatkan dan memperkaya penelitian ilmiah serta memberikan peneliti dasar yang kuat dan informasi substansial tentang penelitian yang sedang dilakukan.

Terdapat berbagai sumber yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dicantumkan berasal dari berbagai sumber yang membahas mengenai dinamika hubungan Taiwan dengan Tiongkok, terutama dalam ruang

lingkup interdependensi antar keduanya, serta berbagai penelitian lainnya yang memiliki kesamaan topik yang diangkat dalam tulisan ini. Berikut merupakan penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi fondasi diadakannya penelitian ini:

1. Tesis yang ditulis oleh Li Zhang berjudul “Cross-strait Economic Interdependence and the Prospects for Peace between Mainland China and Taiwan” (2012) yang diserahkan ke Victoria University of Wellington. Zhang dalam tesisnya secara merinci membahas mengenai perkembangan lanjutan dari globalisasi ekonomi yang memberi dampak pada peningkatan hubungan ekonomi dalam skala internasional. Zhang juga menerangkan bahwa hubungan lintas selat semakin terbuka lebar dengan adanya reformasi dan keterbukaan oleh Tiongkok kepada Taiwan, terutama setelah ditandatanganinya ECFA (Economic Cooperation Framework Agreement) pada 2010. Zhang menemukan bahwa kepentingan bersama antarnegara lintas selat menjadi faktor kunci munculnya saling ketergantungan. Zhang dengan tegas berargumen bahwa saling ketergantungan ekonomi lintas selat mempengaruhi hubungan kedua negara secara inheren dan interaktif. Namun, Zhang lantas membawa penelitiannya ke arah upaya didorongnya interdependensi sebagai jalan perdamaian. Poin inilah yang menjadi penelitian Zhang dan penelitian yang akan dilaksanakan berbeda, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses interdependensi terjadi antara Taiwan dengan Tiongkok terjadi di tengah konflik politik.
2. Penelitian selanjutnya yang relevan dengan penelitian ini bertajuk “Taiwan’s Economic Security in the context of Cross-strait Interdependence” oleh Ewa Trojnar (2016). Trojnar dalam penelitiannya berargumen dengan lugas bahwa kerja sama antara Taiwan dengan Tiongkok bukan hal yang baru dan mengejutkan. Menurutnya, kedua negara saling berhubungan dikarenakan kedekatan geografi, persamaan budaya, serta saling melengkapi satu sama lain dalam hal ekonomi. Fokus penelitian Trojnar secara tajam mengarah pada keamanan ekonomi Taiwan. Menurutnya, Taiwan sangat bergantung pada Tiongkok. Trojnar menyimpulkan bahwa dalam hubungannya dengan Tiongkok, posisi Taiwan cenderung lemah. Kesenjangan kekuatan antar kedua

negara menjadi alasannya. Trojnar dalam penelitiannya berfokus pada arahan kepada Taiwan mengenai strategi ekonomi dan gerak politik demi mengurangi risiko yang dapat muncul akibat hubungan yang menurutnya asimetris. Di sinilah terdapat perbedaan antara penelitian Trojnar dengan penelitian yang dilaksanakan. Penelitian ini tidak memberatkan fokus kepada salah satu negara, namun menelaah dari perilaku kedua negara.

3. Penelitian terdahulu lainnya berjudul “Dalam Perspektif Ekonomi, Mungkinkah Reunifikasi China – Taiwan Dilakukan Melalui Jalan Damai?” yang ditulis oleh Dimasti Dano. Artikel ini dimuat dalam jurnal Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan volume 3 nomor 1 (2023). Penelitian Dano secara komprehensif menganalisis hubungan ekonomi Tiongkok – Taiwan dan faktor dalam negeri dari Taiwan bagi proses reunifikasi. Dano berargumen bahwa dalam persepsi ekonomi, peluang reunifikasi negara lintas selat masih terbuka. Dano berpendapat reunifikasi memiliki kemungkinan yang tinggi dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah hubungan ekonomi antara Taiwan – Tiongkok harus senantiasa menguat yang akan berujung pada integrasi dan interdependensi. Perbedaan antara penelitian oleh Dano dengan penelitian yang dilaksanakan adalah sudut pandang yang digunakan. Penelitian ini secara khusus menggunakan pendekatan teori interdependensi kompleks bagi keberlangsungan saling ketergantungan antar dua negara.

2.4 Ringkasan Penerapan Teori

Dalam bukunya yang berjudul *Power and Interdependence* (2011), Keohane dan Nye

Dalam penelitian ini digunakan teori interdependensi kompleks sebagai bingkai dalam mengidentifikasi bagaimana proses interdependensi ekonomi antara Taiwan – Tiongkok terjadi di tengah konflik politik di antara mereka. Teori interdependensi kompleks menekankan bahwa hubungan internasional tidak hanya terbatas pada satu dimensi seperti ekonomi, tetapi juga melibatkan aspek politik,

sosial, dan budaya. Dalam konteks hubungan antara Taiwan dan Tiongkok, teori ini dapat digunakan untuk menganalisis interaksi yang kompleks antara kedua negara, termasuk interaksi ekonomi dan politik serta isu dari faktor yang saling terkait.

Dalam konteks interdependensi kompleks antara Taiwan dan Tiongkok, terdapat berbagai saluran yang menghubungkan masyarakat kedua negara, terutama dalam aspek ekonomi. Saluran-saluran ini memperkuat saling ketergantungan dan menciptakan hubungan yang kompleks antara Taiwan dan Tiongkok. Perdagangan bilateral yang ekstensif, dengan Tiongkok mengekspor barang senilai \$6,55 miliar ke Taiwan dan mengimpor \$17,7 miliar dari Taiwan pada Mei 2024 (Statistics Database Query, 2024), menciptakan ketergantungan ekonomi yang kuat. Taiwan memainkan peran penting dalam rantai nilai global industri semikonduktor, mendominasi manufaktur semikonduktor global. Investasi lintas batas, seperti lebih dari \$200 miliar investasi perusahaan Taiwan di Tiongkok sejak awal 1990-an, semakin mengintegrasikan ekonomi kedua negara. Peningkatan frekuensi dan efisiensi transportasi udara dan kereta api antara Taiwan dan Tiongkok memfasilitasi pergerakan tenaga kerja, sementara kolaborasi teknologi, terutama dalam industri elektronik, melibatkan transfer teknologi dari Taiwan ke Tiongkok. Saluran-saluran ini menggambarkan kompleksitas dan kedalaman interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok, menciptakan jaringan interaksi yang padat yang mempengaruhi berbagai kelompok, organisasi, dan kebijakan di kedua negara.

2.5 Argumen Utama

Taiwan dan Tiongkok memiliki banyak saluran dalam menjalin kontak dengan satu sama lain. Kontak tersebut utamanya dijalin melalui perdagangan, investasi, serta rantai pasokan global. Interdependensi yang kompleks ini mengartikan bahwa dua negara saling bergantung antar satu dengan yang lain, sehingga menyulitkan salah satu pihak untuk memutus hubungan ekonomi sepenuhnya. Sebagai contoh, industri semikonduktor Taiwan sangat bergantung kepada pasar Tiongkok. Selain itu, kedua belah pihak memiliki kepentingan

ekonomi yang signifikan yang lantas mendorong terjadinya interdependensi. Investasi Taiwan ke Tiongkok sebagai produsen dan perang Tiongkok sebagai pasar utama bagi komoditas Taiwan menciptakan ikatan ekonomi yang kuat. Interdependensi ini tidak hanya berkaitan dengan perdagangan, namun juga integrasi proses produksi dan rantai pasokan. Sebagai contoh, banyak perusahaan Taiwan beroperasi di Tiongkok, pun dengan perusahaan Tiongkok yang berinvestasi ke Taiwan. Lebih jauh, posisi Taiwan dalam rantai pasokan elektronik juga berkontribusi pada interdependensinya dengan Tiongkok. Industri semikonduktor Taiwan merupakan komponen penting dalam banyak rantai pasokan global, termasuk digunakan di manufaktur Tiongkok. Konflik politik nyatanya tidak menghentikan perkembangan hubungan ekonomi antar kedua negara. Seperti yang disebutkan oleh Kastner (2009) bahwa arus perdagangan lintas selat telah berkembang selama beberapa dekade terakhir. Tiongkok bahkan menggantikan posisi AS sebagai mitra dagang utama Taiwan. Tiongkok adalah tujuan utama investasi asing langsung dengan margin yang besar.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Menurut Ghony dan Almanshur dalam Agustiani et al., (2022), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena, kondisi, peristiwa, dan situasi sosial yang dialami oleh subjek penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk menjabarkan penelitian adalah metode deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (Bogdan & Bilken, 1992). Studi literatur merupakan kajian komprehensif terhadap karya-karya yang diterbitkan dalam suatu bidang studi atau penelitian tertentu, serta dalam jangka waktu tertentu pula (Reitz, 2014). Kajian dilakukan terhadap karya-karya yang signifikan.

Dasar pemikiran untuk menggunakan metode tersebut dikarenakan dengan menggunakan kualitatif deskriptif, fenomena yang diteliti dapat dipahami secara luas dan rinci. Pendekatan ini juga dapat menyediakan penjelasan yang sulit dijabarkan melalui angka-angka atau statistik. Studi literatur digunakan karena topik yang diangkat dalam penelitian ini merupakan fenomena yang kompleks dengan banyak faktor yang mempengaruhinya. Penggunaan jenis penelitian studi literatur dapat mengeksplorasi berbagai perspektif serta mengidentifikasi faktor kunci yang menjadi ketergantungan ekonomi Taiwan kepada Tiongkok.

3.2 Batasan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah, batasan penelitian sangat diperlukan karena perlu adanya fokus penelitian. Untuk mempertajam fokus dan topik, maka data yang dikumpulkan menjadi relevan dan analisis yang dihasilkan lebih akurat. Oleh

karena itu, akan dijelaskan mengenai batasan materi serta batasan waktu pelaksanaan penelitian.

3.2.1 Batasan Materi

Dalam penelitian ini, materi yang dibahas adalah terkait dengan saling ketergantungan ekonomi yang terjadi antara Taiwan dengan Tiongkok dan faktor-faktor pendukungnya.

3.2.2 Batasan Waktu

Penelitian ini difokuskan pada rentang waktu 2010 hingga 2022 untuk memperoleh gambaran yang akurat mengenai dinamika hubungan ekonomi Taiwan dan Tiongkok. Alasan utama pemilihan periode ini adalah karena hubungan ekonomi keduanya yang mengalami intensifikasi pasca ditandatanganinya ECFA pada 2010. ECFA bertujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok, dengan fokus pada perdagangan bebas, investasi, dan kerjasama ekonomi lainnya. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pada tahun 2018, beberapa negara yang sebelumnya mengakui kedaulatan Taiwan memutuskan hubungan diplomatisnya karena tekanan dari Tiongkok. Negara-negara tersebut adalah Republik Dominika, El Salvador, serta Burkina Faso (I. Huang, 2023). Isolasi diplomatik ini menyebabkan pengakuan internasional kepada Taiwan berkurang serta meningkatkan ketegangan konflik negara lintas selat. Namun demikian, kerja sama ekonomi tetap menunjukkan kenaikan yang stabil. Nilai perdagangan naik 8.3%, investasi tidak langsung dari Taiwan ke Tiongkok naik 25.2%, dan kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok naik 4.1% (Mainland Affairs Council, 2018).

Sementara pembatasan penelitian hingga tahun 2022 dikarenakan hingga tahun tersebut juga menunjukkan intensifikasi hubungan ekonomi lintas selat yang disebutkan oleh Shacheng (2023) angka bea cukai menunjukkan bahwa keseluruhan perdagangan lintas-Selat pada tahun 2022 adalah \$319,68 miliar, dengan ekspor pulau itu ke daratan berjumlah \$238,09 miliar dan impor dari daratan

menjadi \$81,59 miliar yang menunjukkan bahwa orientasi Taiwan masih bergantung kepada Tiongkok.

3.3 Pengumpulan Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Menurut Hassan (2022), data kualitatif adalah jenis data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam bentuk non-numerik. Bentuk data ini berupa kata-kata, gambar, maupun hasil pengamatan. Data kualitatif biasanya digunakan untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks; seperti perilaku, sikap, serta kepercayaan manusia. Penelitian kualitatif dicirikan oleh misi yang berhubungan dengan pemahaman beberapa aspek kehidupan sosial, dan metodenya yang secara umum menghasilkan kata-kata sebagai data untuk analisis. Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.

Data analisis sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain yang tersedia dari berbagai sumber (Crossman, 2019). Data yang disusun dalam penelitian ini umumnya adalah data sekunder eksternal, yakni data yang berasal dari pemerintah, organisasi non-profit, asosiasi perdagangan, organisasi profesional, publikasi iklan dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi data ekspor – impor Taiwan dan Tiongkok, data investasi Taiwan – Tiongkok, faktor-faktor yang mempengaruhi fenomena tersebut, serta dampak politik. Data yang berkaitan dengan topik tersebut berasal dari buku elektronik, muatan artikel dalam jurnal nasional maupun internasional, situs dari lembaga resmi yang menyediakan data mengenai hubungan ekonomi Taiwan dengan Tiongkok, hingga publikasi portal berita daring.

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Sudaryanto, 1993). Ada beberapa teknik

pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian, di antaranya: observasi, wawancara, survei, dan studi literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi literatur.

Menurut Sarwono (2010), studi pustaka merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara mempelajari teori, pendapat, dan ide yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, dikumpulkan data berupa media cetak, buku, serta referensi lain yang relevan dengan topik yang membahas mengenai hubungan Taiwan dan Tiongkok, terutama yang berkaitan dengan konteks ekonomi.

3.4 Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, data yang digunakan dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan di antara kenyataan yang sesungguhnya terjadi dengan hasil yang disampaikan peneliti. Menurut Moleong (2017), triangulasi adalah pemeriksaan validitas yang memanfaatkan hal lain di luar data tersebut sebagai keperluan pengecekan maupun pembandingan terhadap data yang digunakan.

Dengan menggunakan triangulasi, pemeriksaan data dilaksanakan dengan pengecekan terhadap beberapa sumber dengan topik yang serupa. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilaksanakan dengan memanfaatkan beberapa sumber. Karena penelitian ini mengkaji hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok, maka data utama yang digunakan adalah data sekunder eksternal yang ditriangulasi dengan cara mengecek dari pernyataan resmi dari kedua negara serta dicocokkan dengan pendapat ahli yang ditemukan melalui laporan resmi pemerintah Taiwan dan Tiongkok, laporan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, buku teks, buku elektronik, maupun muatan berita daring.

3.5 Analisis Data

Menurut Miles et al., (1994), analisis data dapat dilakukan melalui beberapa langkah, yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi. Pengumpulan data adalah proses dikumpulkannya data yang dibutuhkan oleh peneliti melalui berbagai teknik. Selanjutnya dilaksanakan reduksi data dengan menimbang data-data yang tidak mengacu pada kajian penelitian. Lalu, pada tahapan penyajian data, interpretasi hasil data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi. Kemudian, pada tahapan terakhir, terdapat penarikan kesimpulan. Pada tahapan kesimpulan, dapat dilihat berbagai temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan.

3.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, berikut merupakan uraian dari lima bab yang disajikan peneliti:

BAB I: Pendahuluan. Bab ini berisi beberapa subbab berupa latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, hingga manfaat penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka. Pada bab dua, peneliti menampilkan kerangka teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian, kerangka operasional penelitian, penelitian terdahulu, ringkasan penerapan teori, dan argumen utama.

BAB III: Metode Penelitian. Pada bab tiga, bagian-bagian yang ditampilkan adalah pendekatan penelitian, batasan penelitian, pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, serta sistematika penulisan.

BAB IV: Pasang Surut Hubungan Lintas Selat Periode. Pada bab keempat, peneliti menampilkan pasang surut interdependensi ekonomi yang terjadi antara Taiwan – Tiongkok dari perspektif kedua negara.

BAB V: Analisis Interdependensi Ekonomi Taiwan - Tiongkok. Peneliti menjabarkan berbagai faktor yang mengakibatkan adanya interdependensi ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok.

BAB VI: Kesimpulan. Pada bab enam, peneliti menarik kesimpulan dari pembahasan yang tertera pada bab sebelumnya.

BAB 4

PASANG SURUT HUBUNGAN TAIWAN DAN TIONGKOK

Konflik Selat Taiwan adalah masalah politik dan keamanan internasional yang mengakar kuat dan kompleks dengan sejarah yang panjang. Jika ditarik ke belakang, asal mula didirikannya Republik Tiongkok yang merupakan cikal bakal Taiwan dimulai pada 1911 (Yu, 1991). Menurut Yu (1991), pendirian Republik Tiongkok ditengarai oleh pemberontakan kelompok revolusioner mengakhiri kekaisaran dinasti Qing. Dinasti ini dianggap tidak mampu menghadapi berbagai tantangan dari pihak luar. Tantangan tersebut di antaranya adalah Perang Candu, Perang Sino-Jepang, dan Perang Rusia-Jepang (Guan, 2023). Dinasti Qing juga gagal mempertahankan kekuasaannya melalui upaya reformasi konsistensi, desentralisasi kekuasaan, serta modernisasi militer. Kegagalan setelah kegagalan ini mendorong Sun Yat-sen sebagai pemimpin revolusi meleburkan kekaisaran di Tiongkok (Fell, 2012). Serangkaian kerumitan ini adalah awal mula dari berbagai konflik lanjutan yang terjadi di Selat Taiwan.

Seiring berjalannya waktu, muncul akar ketegangan lintas selat yang dimulai pada 1927 hingga 1949 yang lantas disebut dengan Perang Saudara (T. Lin, 2021). Menurut Scobell (2014), Perang ini melibatkan Partai Nasionalis Tiongkok atau Kuomintang (KMT) yang dipimpin oleh Chiang Kai-shek dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) yang dipimpin Mao Zedong. Perang ini dimenangkan oleh PKT yang lantas mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan larinya KMT ke kepulauan Taiwan (T. Lin, 2021). Setelah RRT berdiri, Republik Tiongkok atau Taiwan memulai perjuangannya untuk mendapatkan legitimasi dari dunia internasional, salah satu caranya yakni menjadi sekutu Amerika Serikat (AS) (Ko, 2004). Sebagai sekutu, AS memberikan Taiwan dukungan ekonomi dan militer kepada Taiwan di masa Perang Dingin untuk memerangi pengaruh komunis (T. Lin, 2021). Sayangnya, sejak adanya normalisasi Amerika Serikat dengan Tiongkok pasca berakhirnya Perang Dingin--yang ditandai dengan diresmikannya

Konstitusi Hubungan Taiwan (1979)--legitimasi Taiwan sebagai negara di mata dunia mulai runtuh (US-Congress, 1979). Melalui konsistensi ini, AS mengakui prinsip “Satu Tiongkok”. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa Perang Saudara adalah penyebab utama munculnya krisis di Selat Taiwan.

Krisis Selat Taiwan dapat dikatakan sebagai awal mula perjuangan Taiwan mendapatkan rekognisi internasional, sekaligus titik mula ketegangan berkepanjangan dengan Tiongkok. Krisis ini muncul pertama kali pada 1954, ketika angkatan bersenjata RRT, *People's Liberation Army* (PLA) melancarkan serangan ke tiga pulau Taiwan, yakni Jinmen, Matsu, dan Dachen (Office of the States, 2020). Serangan ini lantas mendorong Taiwan untuk menandatangani Perjanjian Pertahanan Bersama dengan AS demi melawan serangan bersenjata dan kegiatan subversif komunis (Taiwan Today, 1955). Krisis Selat Taiwan yang pertama ini lantas berakhir pada 1955 setelah Tiongkok bernegosiasi dengan AS (Munro, 2024). Kemudian, krisis kembali muncul pada 1958 setelah Tiongkok melancarkan serangan ke Pulau Jinmen dan Matsu. Pada masa genting ini, Taiwan juga didepak dari kursi Dewan Keamanan PBB pada 1971 karena dianggap tidak mampu menjadi representasi masyarakat yang tinggal di daratan utama Tiongkok (BBC News Indonesia, 2024). Tindakan saling menyerang ini kemudian diselesaikan pada 1979 ketika AS secara penuh menjalin hubungan diplomatik dengan Tiongkok dan mengakui bahwa Taiwan adalah bagian provinsi dari Tiongkok (Munro, 2024). Oleh karena itu, perjuangan Taiwan mendapatkan kembali legitimasinya sebagai sebuah negara di kancah internasional dimulai pada titik ini.

Meskipun terdapat berbagai ketegangan antar kedua negara, Tiongkok tetap berusaha mereunifikasi Taiwan melalui berbagai upaya. Selain menerapkan prinsip “Satu China”, Tiongkok juga melaksanakan pendekatan ke Taiwan melalui strategi ekonomi. Strategi ini utamanya muncul keyoal Tiongkok melaksanakan reformasi ekonomi 1978 – 1998 (Garnaut & Song, 2012). Tiongkok secara dramatis mengubah mekanisme pendistribusian modal dalam perekonomiannya. Sistem ini berubah dari birokrasi yang terencana secara ketat menjadi hibrida antara alokasi

negara dan pasar.³ Strategi ini dilaksanakan melalui pembongkaran rencana kredit dan mendorong pengembangan pasar keuangan baru untuk melayani perubahan-perubahan di sektor riil. Sejak reformasi ekonomi ini pula, gertakan militer Tiongkok kepada Taiwan bergeser kepada pelembagaan kerja sama ekonomi lintas selat yang dimulai pada awal 1990 (C. Chen, 2009). Kedua belah pihak membuka saluran komunikasi dua arah melalui pembentukan saluran informal yang disebut dengan *Straits Exchange Foundation* (SEF) dan *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) (Wang, 2002). Berbagai strategi dan pelembagaan kerja sama ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok ini dapat dikatakan sebagai transformasi usaha Tiongkok mengintegrasikan Taiwan kembali ke dalam wilayahnya.

4.1 Pergeseran Kekuasaan di Taiwan dan Dinamika Hubungan Lintas Selat

Tahun 1990-an merupakan era baru di mana hubungan lintas selat berkembang menjadi hubungan yang damai. Akan tetapi, hubungan antara Taiwan dan Tiongkok tidak serta merta berjalan secara stabil. Faktor politik terutama dari pihak Taiwan senantiasa mempengaruhi kerja sama dan pertukaran ekonomi lintas selat (Cook, 2005). Pergantian kekuasaan dari dua partai yang dominan di Taiwan dan pemaknaan “Satu Tiongkok” yang berubah-ubah menjadi tantangan bagi hubungan lintas selat (C. Chen, 2009). Menurut M. Chen (2013), terdapat dua partai politik utama di Taiwan yang mendukung status-quo-nya, namun memiliki pendekatan yang bertentangan dalam menghadapi Tiongkok. Dua partai tersebut adalah Kuomintang (KMT) dan Partai Progresif Demokrat (DPP). KMT cenderung memiliki pandangan pro-unifikasi dengan berlandaskan Konsensus 1992 untuk senantiasa mendorong dialog dengan Tiongkok. KMT berupaya membina hubungan yang baik dengan Tiongkok, bahkan mengklaim bahwa satu-satunya cara Taiwan mendapatkan rekognisi internasional adalah dengan menjaga relasi dengan Tiongkok. Sementara DPP yang pro-kemerdekaan, meragukan eksistensi

³ Sistem hibrida ini muncul sebagai respons ketidakefisienan ekonomi yang direncanakan secara terpusat dengan tetap mengandalkan kendali dari Partai Komunis Tiongkok atas sektor utama dan keputusan-keputusan strategis (Wan & Bramwell, 2015)

Konsensus 1992, menolak dengan keras prinsip “Satu Tiongkok”, serta mengutamakan membina hubungan luar negeri dengan negara lain daripada memelihara hubungan lintas selat (Shiquan, 2000). Oleh karena itulah, dapat dikatakan bahwa hubungan kedua negara masih menghadapi tantangan.

Secara intuitif, dapat diasumsikan bahwa kerja sama dan pertukaran ekonomi lintas selat cenderung berkembang di masa kepemimpinan KMT dan mengalami stagnasi di masa kepemimpinan DPP. Hal ini didukung oleh data yang dikumpulkan dan diklasifikasikan berdasarkan transisi kekuasaan di Taiwan. Terdapat fluktuasi kerja sama dan pertukaran ekonomi yang dipengaruhi oleh partai yang berkuasa di Taiwan. Analisis data yang bersumber dari Dewan Urusan Daratan (*Mainland Affairs Council*) dilaksanakan setelah berakhirnya kediktatoran Chiang Kai-shek (1949-1975). Menurut Lin (2016), di bawah pemberlakuan darurat militer oleh Chiang kai-shek, Taiwan terisolasi secara penuh dari Tiongkok dibandingkan empat abad sebelumnya. Tidak ada perdagangan maupun negosiasi bilateral, bahkan kunjungan pun juga turut dilarang. Sebanyak 1,5 juta warga Tiongkok dilarang berkunjung ke Taiwan begitu juga sebaliknya.

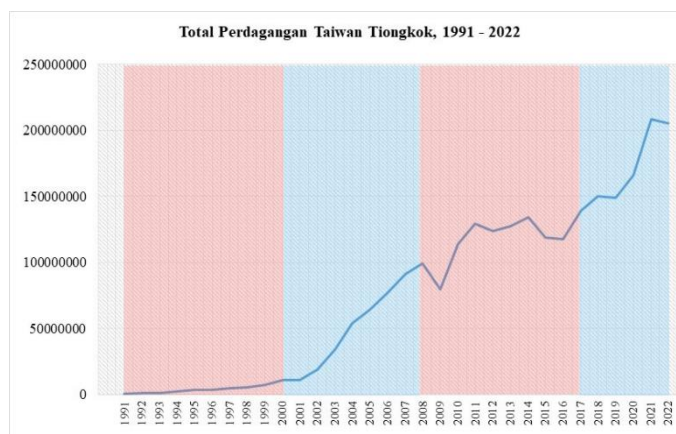
Di bawah kekuasaan putra Chiang Kai-shek yakni Chiang Ching-kuo, hubungan lintas selat berkembang secara bertahap. Di awal kepemimpinannya, Chiang Ching-kuo hendak melanjutkan kebijakan lintas selat Chiang Kai-shek dengan menolak inisiatif Tiongkok mengembangkan kebijakan Tiga Tautan (perdagangan, transportasi, dan persuratan) (Rubinstein, 2007). Kebijakan ini dilawan oleh Chiang Ching-kuo dengan mengeluarkan “Tiga Tidak”, yakni tidak ada negosiasi, tidak ada kontak, dan tidak ada kompromi dengan Partai Komunis Tiongkok (Lin, 2016). Di penghujung masa kepemimpinannya, Chiang Ching-kuo beralih dari kebijakan “Tiga Tidak” ke diplomasi yang lebih pragmatis (Rubinstein, 2007). Peralihan ini menyebabkan adanya perkembangan perdagangan tidak langsung melalui Hong Kong di lintas selat secara dramatis. Kebijakan Chiang Ching-kuo yang moderat ini merupakan tahapan awal bagi ‘keterbukaan’ hubungan ekonomi lintas selat (Hsiung, 2000). Ketika Chiang Ching-kuo wafat pada 1988, dimulailah transformasi sistem politik dari otoriter ke demokrasi di Taiwan.

Taiwan kemudian dipimpin oleh Lee Teng-hui yang mengambil alih komando partai KMT pada Juli 1988. Lee melebarkan visinya untuk membangun kebijakan luar negeri yang kuat, efektif, dan inovatif (Rubinstein, 2015). Lee melanjutkan cita-cita Chiang Ching-kuo mengenai diplomasi pragmatisnya. Selama Lee memimpin selama periode 1988 hingga 2000, terdapat babak baru dalam hubungan lintas selat. Hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok mengalami pelembagaan formal saat Lee menjabat. Salah satu contoh nyatanya adalah pembentukan Dewan Unifikasi Nasional yang didirikan pada tahun 1991 (S. Kastner & Rector, 2008). Melalui pertemuan ketiganya pada 1991, diuraikan mengenai Pedoman Unifikasi Nasional (*National Unification Guidelines*) yang hendak diadopsi. Melalui pertemuan ini pula, dibentuk Dewan Urusan Daratan (*Mainland Affairs Council*) dan Kantor Urusan Taiwan (*Taiwan Affairs Office*) di Tiongkok (Jacobs & Liu, 2007). Selain itu, dibentuk pula badan-badan semi-resmi dan non-pemerintah yang menghubungkan perundingan kedua belah pihak, yakni *Straits Exchange Foundation* (SEF) di Taiwan dan *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS). Perundingan pertama yang melibatkan SEF dan ARATS dilaksanakan pada 1991 untuk membahas konsep “Satu Tiongkok”. Kemudian pada 1992, perundingan antara dua lembaga ini melahirkan Konsensus 1992. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa visi Lee Teng-hui dalam mengembangkan kebijakan luar negeri Taiwan cukup berhasil.

Pasca adanya pelembagaan kerja sama ekonomi melalui SEF dan ARATS, disetujuinya Konsensus 1992 membuka kesempatan baru bagi rekonsiliasi lintas selat. Konsensus 1992 menyatakan bahwa kedua belah pihak, baik Taiwan maupun Tiongkok, menyetujui bahwa hanya ada satu Tiongkok (Wei, 2016). Meskipun konsep Tiongkok bagi kedua negara berbeda, namun konsensus ini membawa kompromi politik pertama yang dicapai oleh negara lintas selat selama 40 tahun lamanya. Dengan disepakatinya Konsensus 1992, maka dorongan dialog lintas selat mulai terjalin dan analisis mengenai hubungan ekonomi keduanya pun dapat dilaksanakan (Muyard, 2012). Pada kurun waktu 1991 hingga 1995, perdagangan lintas selat dilaksanakan secara tidak langsung melalui Hong Kong. Perdagangan keduanya mulai meningkat dengan pertumbuhan tahunan 29% (Lin, 2016).

Menurut Lin (2016), hingga 1995 setengah investasi luar negeri Taiwan diarahkan ke Tiongkok. Tidak mengherankan apabila Konsensus 1992 dikatakan sebagai pembuka jalan bagi kerja sama lintas selat pada masanya.

Sayangnya, pada tahun yang sama tensi hubungan lintas selat memanas akibat beberapa faktor. Faktor tersebut diantaranya karena peristiwa krisis rudal⁴ yang diakibatkan oleh kunjungan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat (Chi, 2004). Krisis rudal berimplikasi pada lahirnya kebijakan “Go South” oleh Lee Teng-hui sebagai landasan perluasan mitra ekonomi ke Asia Tenggara (Lin, 2016). Krisis rudal juga memunculkan sentimen anti-Tiongkok di tengah warga Taiwan (Ho & Lin, 2019). Kebijakan “Go South” dikembangkan menjadi “Go Slow, Be Patient” pada 1996 yang bertujuan untuk membatasi aliran investasi ke Tiongkok (Lin, 2016). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan di masa kepemimpinan Lee Teng-hui nyatanya tidak terlalu berpengaruh signifikan bagi hubungan ekonomi lintas selat, hal ini ditunjukkan dengan volume perdagangan yang disajikan dalam Gambar 1.1.



Gambar 4. 1 Perdagangan Lintas Selat dalam US\$, 1991 – 2022

Catatan: zona bertanda merah menunjukkan kekuasaan dipegang oleh KMT; sementara zona berwarna biru menunjukkan kekuasaan DPP

(Sumber: diolah penulis dari <https://mof.gov.tw> (15 Oktober 2023))

⁴ Serangkaian kejadian latihan militer oleh Tiongkok di Selat Taiwan setelah Lee Teng-hui memberikan pidato di Cornell University mengenai demokratisasi Taiwan. Latihan ini bertujuan untuk menggentarkan Taiwan mengenai upayanya menjadi negara yang demokratis (Lin, 2016).

Sementara itu pada tahun 1998, tingkat pertumbuhan perdagangan lintas selat tumbuh layu karena krisis ekonomi Asia. Kemudian pada 1999, arus perdagangan lintas selat mengalami peningkatan meskipun pada saat yang sama muncul eskalasi ketegangan politik. Perundingan SEF dan ARATS dihentikan sepihak oleh Beijing karena wawancara Lee Teng-hui bersama Deutsche Welle yang menyebutkan bahwa hubungan antara Taiwan dan Tiongkok adalah hubungan antar negara (Jacobs & Liu, 2007).

Ketika Chen Shui-bian menjabat sebagai presiden Taiwan pada tahun 2000, pendekatan ekonomi digunakan sebagai strategi bagi perdamaian dan stabilitas lintas selat. Menurut Wang (2002), di bawah kepemimpinan Chen Shui-bian, Beijing awalnya mengecam dan mendesak agar Chen Shui-bian menerima prinsip “Satu Tiongkok” serta Konsensus 1992 sebagai prasyarat untuk melanjutkan dialog lintas selat. Meskipun awalnya meragukan komitmen Chen Shui-bian dalam membina hubungan lintas selat, namun nyatanya pertukaran ekonomi antar kedua negara berkembang secara dramatis (Wang, 2002). Chen Shui-bian memang menolak mengakui prinsip “Satu Tiongkok”, namun pada saat yang bersamaan ia melaksanakan diplomasi yang lebih pragmatis demi meraup keuntungan melalui diadakannya kerja sama ekonomi dengan Tiongkok (Dagdag, 2003). Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa di bawah kepemimpinan Chen Shui-bian, struktur kerja sama ekonomi yang sistematis dalam hubungan lintas selat.

Meskipun status quo Taiwan dipertahankan di bawah kepemimpinan Chan Shui-bian, pertumbuhan kerja sama ekonomi lintas selat tidak dapat dielakkan. Sejak Chen Shui-bian menjabat sejak 2001 hingga 2007, perdagangan tidak langsung lintas selat (melalui Hong Kong) meningkat secara dramatis dengan pertumbuhan tahunan sebesar 17,3% (Ranjan, 2016). Peningkatan perdagangan pada 2001 adalah buah dari pendirian Tiga Mini-Link (transportasi langsung, perdagangan, dan layanan pos antara pulau lepas pantai Kinmen, Matsu, Penghu, dan Fujian di Tiongkok) (Chao, 2004). Sayangnya, ketegangan antara kedua negara

kembali muncul pada 2002 karena penerapan formula “integrasi politik”⁵ yang diusulkan pada 2001. Namun, hal ini tidak menjadi penghambat bagi berkembangnya kerja sama ekonomi kedua negara.

Kepemimpinan Chen Shui-bian berlanjut dan mengalami perubahan arah pada termin keduanya. Hal ini dikarenakan pada periode kedua kekuasaannya, ia mengambil kebijakan yang lebih tegas bagi hubungan lintas selat. Pada 2007, Chen Shui-bian menyampaikan pidato pada peringatan 25 tahun Asosiasi Urusan Masyarakat Formosa (*Formosan Association for Public Affairs*) mengenai keinginannya memerdekakan Taiwan secara penuh dan menerapkan konstitusi baru (Sullivan & Lowe, 2010). Tentu hal ini berdampak langsung bagi hubungan lintas selat yang menjadi tegang. Ketegangan politik ini nyatanya tidak berdampak terlalu signifikan bagi volume perdagangan lintas selat. Selama Chen Shui-bian berkuasa, hanya sedikit volume perdagangan lintas selat yang menurun, yakni pada 2008 ketika terjadi pemilihan umum di Taiwan (Lychagin & Komarov, 2017). Pada tahun 2008, volume perdagangan lintas selat bernilai 99 juta USD (Ministry of Finance Republic of Taiwan, 2008). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sikap tegas Chen Shui-bian menghadapi tekanan politik Tiongkok tidak berdampak signifikan bagi perdagangan kedua negara.

Pasca terpilihnya KMT pada pemilu Taiwan 2008, hubungan lintas selat di bawah kepemimpinan Ma Ying-jeou merapat ke Beijing. Ma Ying-jou yang berkuasa sejak 2008 hingga 2016 (Copper, 2024). Kebijakan politik Ma Ying-jeou difokuskan untuk menurunkan ketegangan lintas selat dan memperkuat hubungan ekonomi dengan Tiongkok (Jacobs, 2015). Ma Ying-jeou dalam pidato pengukuhanannya menerima Konsensus 1992 dan melanjutkan dialog lintas selat dengan reaktivasi SEF serta ARATS (Office of the President Republic of China (Taiwan), 2009). Perundingan SEF-ARATS pada 2008 yang dilaksanakan setiap enam bulan hingga akhir kepemimpinan Ma Ying-jeou menghasilkan 23 perjanjian

⁵ Integrasi Politik mengacu pada keinginan Chen Shui-bian untuk menekankan bahwa identitas Taiwan berbeda dengan Tiongkok. Hal ini menyebabkan adanya ketegangan hubungan lintas selat karena perbedaan pendapat antara Taipei dan Beijing dalam memandang status politik Taiwan dalam konteks global yang sama sekali bertentangan dengan prinsip “Satu Tiongkok” (Chao, 2004).

lintas selat, yang banyak di antaranya berkaitan langsung dengan pertukaran ekonomi (G. Lin, 2019). Berbagai kebijakan Ma Ying-jeou ini dapat menggambarkan sikapnya yang terbuka kepada Tiongkok.

Ma Ying-jeou berfokus untuk memperkuat hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok, meskipun terdapat berbagai tantangan dari dalam maupun luar negeri. Salah satu contohnya yakni krisis keuangan global pada 2008 yang berimbas kepada penurunan perdagangan lintas selat, terutama pada kuartal keempat (Cheung, 2010). Pada 2009, perdagangan lintas selat kembali pulih secara dramatis. Di bawah kepemimpinan Ma Yoing-jeou, penandatanganan *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) berhasil terlaksana. Pada tahun 2010, ECFA resmi menjadi jembatan negara lintas selat untuk memperluas akses pasar, jaminan investasi, pengurangan tarif, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (Jacobs, 2015). Perlu digarisbawahi bahwa ECFA menjadi salah satu titik balik kerja sama ekonomi lintas selat meskipun pada awal kepemimpinannya, Ma Ying-jeou dihadapkan pada krisis keuangan global.

Bukan hal mudah bagi Ma Ying-jeou dalam menekankan hubungan ekonomi sebagai penguat hubungan lintas selat. Melansir Tsai & Liu (2017), perkembangan ekonomi lintas selat pada 2011 hingga 2015 cenderung fluktuatif. Berikut disajikan tabel mengenai pertukaran perdagangan lintas selat sejak 2011 hingga 2015.

Tabel 4. 1 Pertukaran Perdagangan Lintas Selat (2011 – 2015)

Tahun	Total Volume Perdagangan (per 100 juta USD)	Tingkat Pertumbuhan (%)
2011	1347.8	11.5
2012	1216.4	-4.6
2013	1243.8	2.3
2014	1301.9	4.7
2015	1154.1	-11.3

Sumber: Mainland Affairs Council (MAC) – Dewan Urusan Daratan

(https://www.mac.gov.tw/en/Content_List.aspx?n=DC6266AD4F1349A5)

Fluktuasi tingkat perdagangan di atas disebabkan oleh banyak faktor. Melihat pola hubungan antara Taiwan dan Tiongkok, maka dapat dikatakan bahwa ketegangan politik, konflik geopolitik, dan perubahan perdagangan global turut berpengaruh. Pada 2011, perdagangan lintas selat terus mengalami pertumbuhan hingga 11,5%. Perkembangan ini disebabkan oleh adanya negosiasi antara Taipei dan Beijing berkaitan dengan investasi, perdagangan barang dan jasa, serta pengurangan hambatan perdagangan (Tsai & Liu, 2017). Sayangnya, masa pemilu presiden pada 2012 memberi dampak negatif pada perdagangan kedua negara hingga -4,6% (Glaser & Billingsley, 2012). Akan tetapi, pada tahun selanjutnya perdagangan kembali meningkat menjadi 5,4% di 2013. Pertumbuhan ini ditengarai disebabkan oleh disepakatinya perjanjian antara Taiwan dan Tiongkok mengenai perjanjian lintas selat mengenai perdagangan barang dan jasa (Tsai & Liu, 2017). Pada 2014 setelah adanya perjanjian tindak lanjut ECFA di Nanjing, volume perdagangan lintas selat meningkat 2,9% (Mainland Affairs Council, 2018). Tindak lanjut ECFA ini termasuk perjanjian kerja sama pabean lintas selat. Sayangnya, pada 2015 terjadi penurunan perdagangan yang tajam antar kedua negara hingga 9,8%. Penurunan ini diakibatkan oleh kekhawatiran munculnya ketergantungan ekonomi Taiwan ke Tiongkok serta ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan lintas selat yang diimplementasikan Ma Ying-jeou (Matsuda, 2015). Berdasarkan paparan di atas, tidak mengherankan apabila dalam periode 2011 hingga 2015 perdagangan lintas selat mengalami naik turun.

Tantangan yang dihadapi Ma Ying-jeou dalam usahanya mengintegrasikan kerja sama ekonomi Taiwan dengan Tiongkok tidak dapat dihindari. Masyarakat Taiwan menganggap kebijakan ekonomi lintas Ma Ying-jeou tidak lagi proposional. Kekecewaan masyarakat Taiwan kepada Ma Ying-jeou berakar dari penandatanganan kebijakan lintas selat mengenai Perdagangan Jasa pada 2013 (Tsai & Liu, 2017). Perjanjian ini menurut pihak Taiwan dapat meningkatkan persaingan asimetris karena sektor jasa Taiwan terdiri dari usaha kecil menengah (UKM), berbeda dengan Tiongkok yang sebagian besar pasarnya terdiri atas badan usaha milik negara (BUMN) (Fell, 2012). Karena hal ini, perusahaan Taiwan yang

kala bersaing dengan perusahaan Tiongkok terpaksa meninggalkan kompetisi di tengah pasar melawan Tiongkok. Dampak negatif dari ketimpangan persaingan ini ialah penurunan kesejahteraan penduduk Taiwan yang kehilangan pekerjaan maupun pengurangan gaji. Akibatnya, pada 2014 sekelompok mahasiswa dan aktivis sosial di Taiwan mengorganisir “Sunflower Movement”⁶. Gerakan ini melumpuhkan ratifikasi perjanjian lintas selat mengenai perdagangan barang dan jasa serta limitasi bagi kebijakan lintas selat yang dicetuskan oleh Ma Ying-jeou (Tsai & Liu, 2017). Pada masa krisis ini dapat dilihat bahwa persepsi masyarakat turut menjadi penghambat bagi integrasi ekonomi lintas selat.

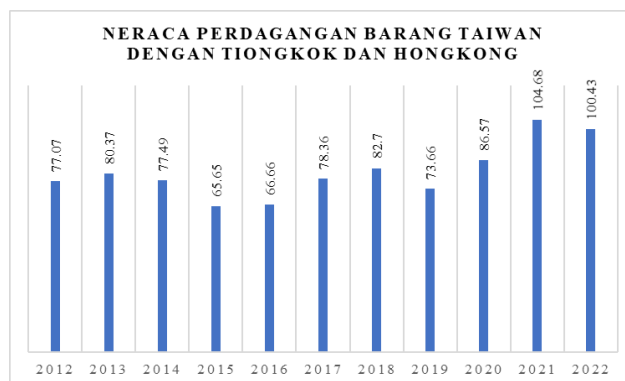
Pada 2016, Taiwan memasuki era baru kepemimpinan setelah kandidat dari partai DPP, Tsai Ing-wen terpilih menjadi presiden. Volume perdagangan lintas selat pada tahun ini meningkat 3,1% dengan segala rintangan di tahun politik dari pihak Taiwan (Mainland Affairs Council, 2018). Kenaikan kecil ini merupakan satu pertanda pemulihan ekonomi setelah sebelumnya lesu pada 2015 (Nakhatakyan, 2021). Transisi politik Taiwan nyatanya memiliki sedikit pengaruh bagi perdagangan lintas selat. Terutama pada masa pemerintahan Chen Shui-bian yang memiliki sikap tegas bagi pro-kemerdekaan Taiwan yang meningkatkan ketegangan hubungan lintas selat (Nakhatakyan, 2021). Bahkan, jika dibandingkan dengan masa pemerintahan Lee Teng-hui dan Ma Ying-jeou dari KMT dan memiliki sikap pragmatis terhadap Tiongkok, volume perdagangan lintas selat di bawah kepemimpinan Chen Shui-bian jauh lebih tinggi.

Di masa pemerintahan Tsai Ing-wen pun perdagangan lintas selat mengalami perkembangan. Data yang dikutip dari Statista di bawah menunjukkan adanya kenaikan secara dramatis bagi neraca perdagangan barang lintas selat. Meskipun pada kenyataannya, setelah terjadi pergeseran kekuasaan Taiwan ke tangan Tsai Ing-wen, muncul kebijakan untuk mengurangi intensitas perdagangan dengan lintas selat. Inisiatif tersebut diwujudkan melalui “New Southbound Policy” (Kasim, 2019). Kebijakan ini dimaksudkan untuk memperkuat jalinan kemitraan

⁶ Merupakan gerakan yang ditengarai oleh kekecewaan warga Taiwan terhadap kebijakan lintas selat Presiden Ma Ying-jeou yang dianggap membahayakan perekonomian, keamanan kedaulatan, serta demokrasi Taiwan (Kasim, 2019).

ekonomi Taiwan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Australia, dan Selandia baru. Meskipun volume perdagangan lintas selat tetap tinggi, namun mengutip pernyataan Hashmi & Yang (2023), kebijakan ini berhasil meningkatkan profil regionalnya. Maka dapat disebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen, perdagangan lintas selat tetap berjalan baik.

Neraca perdagangan barang lintas selat tetap menunjukkan kenaikan sejak Tsai Ing-wen menjabat, meskipun kerap kali isu konflik politik antar negara mencuat. Mengutip Mainland Affairs Council (2018), pada 2016 terdapat kenaikan perdagangan barang sebanyak 2% dari tahun 2015. Kenaikan pesat terjadi pada 2017 yang mencapai total hingga 78,36 miliar USD. Demikian pula pada 2018 yang bertambah menjadi 82,7 miliar USD. Penurunan pada 2019 disebabkan oleh efek samping perang dagang Amerika Serikat – Tiongkok. Perang dagang yang terjadi sepanjang tahun ini mengakibatkan pengusaha Taiwan mengalihkan investasinya kembali ke dalam negeri. Menteri Dewan Urusan Daratan (*Mainland Affairs Council*) di Taiwan, Chen Min-tong juga menyerukan pernyataan bahwa harus ada perlindungan dan konsolidasi bagi perlindungan demokrasi Taiwan. Pernyataan ini tentu membuat tensi lintas selat memanas. Pada pertengahan 2019, Tsai Ing-wen dalam Forum Formosa menyatakan kekhawatirannya terhadap situasi keamanan di Indo-Pasifik secara umum dan keamanan bagi kedaulatan Taiwan secara khusus dari penindasan Tiongkok (Scott, 2019). Ditambah pula dengan sengketa dagang antara AS – Tiongkok yang semakin memanas, sehingga struktur ekonomi Asia secara umum pun juga turut berubah. Dengan elaborasi di atas, tidak mengherankan apabila dikatakan di bawah kepemimpinan Tsai Ing-wen, hubungan lintas selat mengalami tantangan tersendiri.



Gambar 4. 2 Neraca Perdagangan Barang antara Taiwan dengan Tiongkok dan Hong Kong (dalam miliar dolar AS)

(Sumber: Statista, diolah dari MOF Taiwan)

Tantangan lain pada masa kepemimpinan Tsai Ing-wen muncul dari pandemi Covid-19, meskipun tidak serta merta menjadikan volume perdagangan kedua negara turun secara signifikan. Wabah ini mengakibatkan volume perdagangan lintas selat layu pada 2019 (Shih-chung, 2020). Menurut Kuo (2021), perdagangan barang pada 2020 kembali meningkat karena naiknya permintaan dunia bagi barang elektronik yang chip-nya sebagian besar diproduksi di Taiwan lalu dirakit menjadi gadget di Tiongkok. Menurut data yang dikutip dari Direktorat Jenderal Bea Cukai dari Kementerian Keuangan Taiwan, pada 2020 produk teratas yang diimpor dan diekspor dari serta ke Tiongkok adalah mesin dan peralatan listrik. Nilai barang impor menyentuh angka 34.132 USD dengan tingkat pertumbuhan sebesar 14% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, nilai barang yang diekspor menyentuh nilai 57.792 USD yang menunjukkan tingkat pertumbuhan sebesar 25% sejak 2019. Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa Covid-19 cukup berimplikasi pada hubungan ekonomi lintas selat.

Pada 2021 hingga 2022, perdagangan Taiwan dan Tiongkok menunjukkan perkembangan yang positif meskipun terdapat penurunan dipenghujung tahun. Nilai ekspor barang elektronik kembali menjadi peringkat pertama dengan nilai total 57.792 USD dan impor sebesar 41.591 USD, naik sebesar 29% dari tahun sebelumnya (Mainland Affairs Council, 2022). Meskipun terjadi penurunan perdagangan barang pada 2022, namun nilainya tetap tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh tekanan Tiongkok kepada Taiwan

setelah Ketua DPR AS Nancy Pelosi memberikan dukungannya secara terbuka bagi Taiwan. Kunjungan Pelosi ini menimbulkan kemarahan bagi pihak Beijing karena menganggap AS mengingkari prinsip Satu Tiongkok dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan yang disepakati pada 1979. Sebagaimana paparan di atas, perkembangan hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok tetap berkembang meskipun terdapat isu politik yang menyelimutinya.

Jalanan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok senantiasa berkembang pada waktu berikutnya. Hal ini dibuktikan neraca perdagangan barang antara Taiwan dengan Tiongkok (termasuk Hong Kong) mengalami surplus (Ministry of Finance Republic of Taiwan, 2021). Surplus perdagangan yang konsisten untuk Taiwan dalam perdagangan barang dagangannya dengan Tiongkok menunjukkan bahwa Taiwan kompetitif dalam mengeksport barang ke pasar Tiongkok, begitu pula sebaliknya. Selain itu, surplus memberikan kontribusi pada pendapatan devisa yang positif bagi Taiwan. Surplus ini dapat digunakan untuk memperkuat cadangan mata uang Taiwan atau diinvestasikan kembali dalam berbagai kegiatan ekonomi (Ministry of Finance Republic of Taiwan, 2021). Surplus perdagangan dengan Tiongkok dapat berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi Taiwan, yang mencerminkan sektor ekspor yang kuat, peningkatan produksi, dan potensi tingkat pekerjaan yang lebih tinggi.

4.2 Kebijakan Tiongkok dalam Hubungan Lintas Selat

Pendekatan strategis Beijing terhadap Taiwan telah berevolusi dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Secara historis, Beijing senantiasa menahan kemerdekaan Taiwan baik secara *de jure* maupun *de facto* (Bartmann, 2007). Awalnya, setelah berdirinya Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949, Beijing menekankan “pembebasan Taiwan dan pencapaian penyatuan Tiongkok” sebagai prioritas (Bartmann, 2007). Namun, dengan pecahnya Perang Korea dan kebutuhan untuk industrialisasi nasional dan transformasi sosialis, Beijing beralih prioritas strategisnya untuk fokus pada rehabilitasi ekonomi dan modernisasi (Rios,

2010). Hal ini lantas mempengaruhi berbagai perkembangan kebijakan Tiongkok ke Taiwan dalam periode setelahnya.

Kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan cenderung bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Penyebabnya ialah berbagai respons dari Taiwan terhadap daya upaya yang dikerahkan Tiongkok. Mulanya, mengutip Chao (1990) kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan dapat dibagi menjadi empat tahap. Pada 1946, pihak Beijing melalui Partai Komunis Tiongkok (PKT) membentuk Komite Kerja⁷ di Taiwan. Selain Komite Kerja, sebelum rezim komunis secara resmi mengendalikan Beijing pada 1949, hasil Konferensi Konsultasi Politik Rakyat Tiongkok yang pertama adalah perintah kepada Tentara Pembebasan Rakyat (*People's Liberation Army/PLA*) untuk menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok dengan cara apapun. Pimpinan PKT bahkan mengancam akan mengerahkan kekerasan dalam usahanya menundukkan Taiwan kepada pemerintah komunis. Operasi militer⁸ lantas diluncurkan ke Taiwan pada Oktober 1949 atas dasar ambisi Tiongkok untuk mengintegrasikan Taiwan kembali ke teritorialnya. Sayangnya, operasi militer ini berujung kegagalan yang kemudian mengubah strategi reunifikasi Taiwan oleh Tiongkok. Perubahan ini dapat dilihat dari strategi Tiongkok dalam mereunifikasi Taiwan yang mulanya memiliki slogan 'Pembersihan Darah' menjadi 'Pembebasan Damai'. Pergeseran kebijakan dan upaya yang dilaksanakan Tiongkok ini dapat dikatakan merupakan penyesuaian terhadap respons Taiwan.

Pada dekade setelahnya, tindakan Taiwan terhadap Tiongkok cenderung tetap fluktuatif. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai upaya dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Pada 1954, Beijing mengambil tindakan militer untuk merebut pulau-pulau di lepas pantai Ichiangshan dan Tachen dari pihak Taiwan

⁷ Komite Kerja didirikan semasa Perang Saudara Tiongkok, khususnya pasca PKT menguasai Tiongkok dan mundurnya KMT ke Pulau Taiwan. Komite ini didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan dan strategi PKT di Taiwan. Tujuan akhirnya ialah menyatukan kembali Taiwan dengan Tiongkok di bawah kekuasaan PKT (Yuan, 2010).

⁸ Operasi militer ini lantas disebut dengan Perang Guningtou. Perang ini pada masanya memperebutkan Pulau Kinmen di Selat Taiwan.

(Office of the States, 2020). Akan tetapi, setelah isolasi diplomatik⁹ Tiongkok berakhir, Beijing mulai menggunakan cara-cara yang damai untuk menyelesaikan permasalahan Taiwan (J. F. Copper, 2013). Pihak Beijing melalui Perdana Menteri Zhou Enlai kala itu mendesak Amerika Serikat untuk tidak melakukan intervensi dalam rekonsiliasi lintas selat. Di bawah kepemimpinan Chou, kampanye reunifikasi damai mencapai puncaknya pada November 1955 hingga Februari 1956. Chou mengundang Presiden Taiwan yang menjabat masa itu, Chiang Kai-shek, untuk mengunjungi Tiongkok serta menawarkannya untuk mengisi posisi strategis di pemerintahan Beijing jika Taiwan kembali ke Tiongkok. Selain itu, Chou juga mengusulkan adanya pertemuan resmi dengan pihak berwenang Taiwan. Sayangnya, Beijing kembali mengerahkan kekuatan militernya untuk membombardir kepulauan Quemoy pada 1958 (Taiwan Today, 1988). Perubahan demi perubahan kebijakan terhadap Taiwan ini merupakan bentuk ambisi Tiongkok dalam upaya reunifikasi.

Era Perang Dingin antara blok timur dan blok barat turut berpengaruh kepada pasang surut hubungan Taiwan dengan Tiongkok. Hal ini dapat dilihat melalui kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan yang dipengaruhi oleh tensi hubungannya dengan negara lain. Di era 1960an, Tiongkok mendapatkan tekanan dari Uni Soviet yang lantas menyebabkan proses reunifikasi dengan Taiwan dikesampingkan (Tubilewicz, 2005). Beranjak ke 1970-an, reunifikasi melalui jalur damai kembali digalakkan (Albert, 2016). Pada periode ini, diksi 'reunifikasi' secara resmi digunakan untuk menggantikan 'pembebasan' (Chao, 2004). Tahapan berikutnya yang ditempuh Beijing adalah membujuk lima mahasiswa yang memprotes sikap Taiwan pada insiden Tiaoyutai. Beijing juga mengajak mereka untuk menyebarkan paham pro-Tiongkok ke penjuru Taiwan. Insiden ini pada intinya disebabkan oleh perebutan status kepemilikan pulau Tiaoyutai oleh Amerika Serikat, Jepang, dan Tiongkok. Menurut Chao (1990) ketidakpuasan

⁹ Isolasi diplomatik Tiongkok selama periode 1950-an merupakan periode pemutusan hubungan internasional yang signifikan dan keterlibatan yang terbatas dengan komunitas global. Isolasi ini sebagian besar disebabkan oleh dinamika politik internal Tiongkok dan hubungannya dengan negara-negara besar pada masa itu.

aktivis terhadap pasifnya sikap Taiwan dalam memperjuangkan Taoyutai lantas dimanfaatkan Zhou Enlai untuk melancarkan strategi lobi dalam proses reunifikasi Taiwan. Beberapa paham yang ditanamkan oleh Chou kepada para aktivis ini antara lain:

1. Jen-t'ung: bahwa Tiongkok adalah tanah air bagi seluruh penduduk dan Taiwan;
2. hut-kui: agar penduduk dan warga Taiwan mengunjungi dan kembali secara permanen ke Tiongkok.

Upaya lainnya yang ditempuh oleh Zhou Enlai adalah membentuk lembaga berkaitan dengan Taiwan, salah satunya disebut 'Kantor Taiwan' yang berada di bawah naungan Komite Pusat PKT, khususnya Kementerian Luar Negeri (Cathcart & Nash, 2008). Lembaga ini lantas memiliki beberapa cabang yang tersebar di Tiongkok. Selain itu, upaya diplomatis seperti seminar, diskusi, dan pidato terkait dengan Taiwan oleh rezim komunis juga digalakkan (Albert, 2016).

Hubungan lintas selat memasuki era baru pada 1978 pasca diputusnya hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan Taiwan. Beijing menginisiasi adanya 'Surat kepada Rakyat Taiwan' yang berisikan langkah-langkah diplomatik reunifikasi (Chao, 1990). Melalui kebijakan ini, Beijing menghendaki adanya empat pertukaran berupa akademis, budaya, olahraga, dan seni. Segala upaya serangan ke pulau lepas pantai Taiwan juga dihentikan demi membangun keseriusan pengembangan kunjungan dan pertukaran warga lintas selat (Chao, 1990). Perdana Menteri Tiongkok kala itu, Deng Xiaoping juga menyebutkan penolakannya terhadap istilah 'pembebasan Taiwan'. alih-alih ia melahirkan kebijakan 'Satu Negara, Dua Sistem'.

Dekade 1980-an dapat dikatakan sebagai tahun-tahun penuh kebijakan berpengaruh bagi keberadaan Taiwan dewasa ini. Penyebabnya adalah berbagai situasi politik dari dalam dan luar Tiongkok. Di bawah kekuasaan Deng Xiaoping sebagai Perdana Menteri Tiongkok muncul berbagai kebijakan berpengaruh hingga kini (J. F. Copper, 2013). Pada 16 Januari 1980 Deng Xiaoping menargetkan tiga tujuan berupa anti-hegemonisme, reunifikasi, serta Empat Modernisasi. Pada 1981,

Yeh Chien-ying sebagai ketua tetap Kongres Rakyat Nasional (*National People's Congress/NPC*) mendorong adanya periode kerja sama lanjutan antara Taiwan dengan Tiongkok (Chao, 1990). Yeh Chien-ying juga mengusulkan sembilan jaminan untuk Taiwan, termasuk pembentukan Zona Administratif Khusus Taiwan pasca reunifikasi, hak mempertahankan angkatan senjata secara terpisah dari Tiongkok, serta tingkat otonomi yang tinggi (Chiang & Chen, 2021). Proposal oleh Yeh Chien-ying ini didukung penuh oleh Deng Xiaoping dan secara resmi berdampingan dengan usulannya bagi hubungan lintas selat. Deng Xiaoping menambahkan keistimewaan Taiwan jika berkenan menerima reunifikasi, diantaranya otoritas independen urusan luar negeri seperti penerbitan visa dan hubungan ekonomi luar negeri non-diplomatis. Teng juga mengharuskan adanya perubahan secara menyeluruh bagi penyebutan Republik Tiongkok menjadi 'Tiongkok, Taiwan' (Chao, 1990). Bendera Taiwan pun diatur sedemikian rupa oleh Deng Xiaoping agar diubah. Maka dari itu, dapat dikatakan periode 1980-an amat berpengaruh bagi entitas Taiwan kini.

Tidak berhenti di situ, berbagai peristiwa yang tercatat pada 1980-an antara negara lintas selat tetap berlanjut dan tidak kalah penting. Pasca Deng Xiaoping bertemu dengan Zbigniew Brezinski pada 1984, sistem 'Satu Negara, Dua Sistem' terbukti berhasil diterapkan dalam reunifikasi dengan Hong Kong (Chao, 1990). Teng lantas menyebarkan kerangka kerja ini kepada masyarakat Taiwan. Kemudian, pada 1986 sembilan jaminan Yen Chien-ying dikonfirmasi merupakan strategi resmi

Tiongkok senantiasa mendorong adanya reunifikasi Taiwan demi mewujudkan ambisinya. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pendatangannya Konsensus 1992 (Wei, 2016). Konsensus ini berisi mengenai pengakuan prinsip "satu Tiongkok" seraya mengizinkan Taiwan untuk mempertahankan kedaulatan dan ruang internasionalnya sendiri. Konsensus ini dipandang sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan mendorong kerja sama ekonomi antara kedua belah pihak (Nakhatakyan, 2021). Pada dekade 90an juga ditandai dengan adanya krisis misil. Selama Krisis Selat Taiwan 1995-1996, Tiongkok melakukan serangkaian uji coba

rudal dan latihan militer sebagai tanggapan atas kunjungan Presiden Taiwan Lee Teng-hui ke Amerika Serikat (Chi, 2004). Menurut Yang (1996), Tiongkok menembakkan rudal CSS-6 (DF-15) ke Selat Taiwan. Selain itu, Tiongkok juga melakukan latihan tembak langsung dan latihan penyerangan amfibi di dekat Taiwan. Tiongkok juga memobilisasi Pasukan Penjaga Pantai dan milisi maritimnya untuk membatasi akses ke Taiwan (Panter & Luo, 2021). Hal ini berdampak pada pasokan dan pelabuhan yang penting. Selain itu, Tiongkok memberikan tekanan ekonomi terhadap Taiwan dengan membatasi akses ke pelabuhan Taiwan dan mengganggu aktivitas komersial (Lin, 2016). Tindakan-tindakan ini disertai dengan gerakan simbolis, seperti mengirimkan armada angkatan laut Tiongkok ke Selat Taiwan dan melakukan latihan militer di dekat Taiwan. Tindakan-tindakan ini dirancang untuk menunjukkan kemampuan militer Tiongkok dan mengintimidasi Taiwan tanpa secara resmi menyatakan perang.

Selanjutnya, hubungan lintas selat di bawah kepemimpinan Xi Jinping stabil dan progresif secara umum. Akan tetapi, muncul sentimen anti-Beijing di kalangan pemuda Taiwan (J. Huang, 2017). Sentimen ini lantas memunculkan “Sunflower Movement”, atau Gerakan Bunga Matahari. Kemunculan gerakan ini berakar dari protes pengesahan “Cross-Strait Service Trade Agreement” (CSSTA) atau Perjanjian Perdagangan Jasa Lintas Selat.¹⁰ Selain itu, protes juga disebabkan oleh Partai KMT yang kekuasaannya dianggap gagal karena teralu menekankan pembuatan wadah penguatan hubungan ekonomi Taiwan-Tiongkok pada pemilu 2014 (J. Huang, 2017). Sentimen anti-Beijing ini muncul bertepatan dengan masa jabatan kedua Ma Ying-jeou. Akan tetapi, kemunculan setntimen ini tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hubungan lintas selat.

Selama masa kepemimpinannya, Xi Jinping berpegang pada prinsip “Satu Tiongkok” dalam menghadapi resistensi Taiwan mempertahankan diri. Menurut Huang (2017), Tiongkok paham bahwa Taiwan semakin antipati terhadapnya. Oleh

¹⁰ Merupakan pakta lanjutan dari ECFA yang disepakati antara Taiwan dan Tiongkok pada 2010. Melalui CSSTA, kedua negara menyetujui aturan-aturan yang dilembagakan demi perdagangan lintas selat dalam bidang jasa, termasuk pembukaan pasar jasa, liberalisasi di bidang jasa, serta pembukaan 80 jenis layanan oleh Tiongkok khusus untuk Taiwan. (Mainland Affairs Council, 2014)

karena itu strategi ekonomi merupakan salah satu strategi yang terkuat bagi Beijing demi menarik kembali Taiwan. Tiongkok membuat Taiwan tidak memiliki opsi lain selain menerima kenyataan bahwa hubungan ekonomi lintas selat menguntungkan kedua belah pihak (J. Huang, 2017). Keuntungan yang mutual ini secara tidak langsung diakui oleh Taiwan melalui kesukarelaannya dalam membentuk ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) (Zhang, 2012). Bagi pihak Tiongkok, penandatanganan ECFA merupakan satu langkah lebih dekat kepada “Pasar Satu Tiongkok”, yakni integrasi ekonomi dan kerja sama antara negara lintas selat berdasarkan prinsip “Satu Tiongkok” (Liang, 2024). Oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa Xi Jinping dalam menyusun segala kebijakan dan strateginya senantiasa berlandaskan kepada prinsip “Satu Tiongkok”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Xi Jinping memainkan peran penting bagi perkembangan hubungan lintas selat. Hal ini disebabkan dalamnya pemahaman Xi Jinping terhadap permasalahan kedua negara. Melansir Grasso et al (2017), Xi Jinping pernah menduduki jabatan sebagai sekretaris partai di Provinsi Fujian, Zhejiang, dan Shanghai, di mana pemerintah daerah Tiongkok tersebut membangun hubungan yang substansial dengan Taiwan. Provinsi-provinsi ini tidak hanya menjadi agen pemerintah pusat Beijing, namun juga mengembangkan hubungan sosial, budaya, ekonomi, dan politik dengan Taiwan (Romualdi & Rochmat, 2023). Maka tidak mengherankan apabila Xi Jinping memiliki andil penting bagi kemajuan hubungan kedua negara.

Dialog reunifikasi secara pragmatis senantiasa digaungkan oleh Xi Jinping dalam berbagai momentum. Salah satunya adalah ketika Xi Jinping bertemu dengan Wu Po-hsiung yang menjabat ketua kehormatan KMT pada 2013 (Weihua, 2013). Xi Jinping menyodorkan empat proposal baru bagi kemajuan hubungan lintas selat, proposal tersebut diantaranya berbunyi:

1. Kedua belah pihak harus mempertimbangkan kepentingan keseluruhan bangsa Tiongkok ketika menilai situasi keseleruhan hubungan lintas selat;

2. kedua belah pihak harus dengan jelas mengenali tren perkembangan sejarah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai prospek masa depan hubungan lintas selat;
3. Tiongkok dan Taiwan harus meningkatkan rasa saling percaya, terlibat dalam interaksi yang baik, mencari kesamaan, dan mengesampingkan perbedaan;
4. kedua belah pihak harus terus mendorong pengembangan keseluruhan hubungan lintas selat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing tetap berpendirian kepada komitmennya untuk mencapai modernisasi¹¹ yang komprehensif sebagai prasyarat reunifikasi. Beijing menekankan reunifikasi merupakan salah satu pemenuhan ambisinya untuk pemulihan nasional pada tahun 2049 (Nouwens, 2023). Hal menunjukkan bahwa Beijing terus memprioritaskan pencapaian modernisasi komprehensif sebelum penyelesaian masalah Taiwan dengan kekuatan militer, kecuali dihadapkan dengan kebijakan kemerdekaan *de jure* yang radikal dari pemerintahan Taiwan (Nouwens, 2023). Tujuan utama Beijing tidak hanya menciptakan reunifikasi, namun juga untuk mencegah kemerdekaan Taiwan secara *de facto* maupun *de jure* (Xin, 2021). Pergeseran demi pergeseran prioritas dalam strategi Beijing terhadap Taipei mencerminkan upaya menghadapi tantangan yang dihadapi oleh kepemimpinan Xi Jinping dalam mengatasi hubungan lintas selat dan mencapai tujuan pembangunan nasionalnya.

4.3 Arus Perdagangan dan Investasi Lintas Selat

4.3.1 Perdagangan Lintas Selat

Perdagangan internasional adalah perdagangan internasional yang melibatkan pertukaran barang dan jasa lintas batas. Aktivitas ini telah menjadi pendorong ekonomi global selama berabad-abad. Penelitian Okenna (2020)

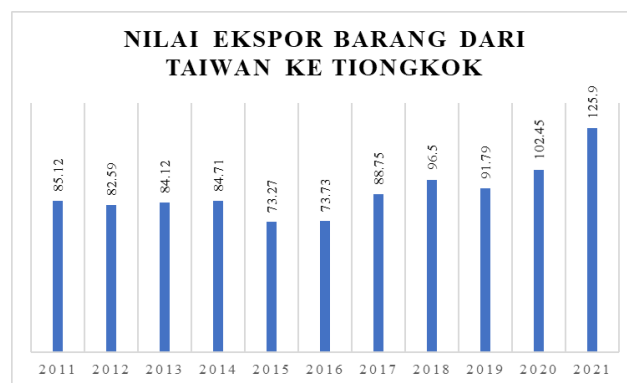
¹¹ Modernisasi bagi Tiongkok adalah upaya meraih cita-cita negara melalui budaya dan etika yang bertujuan untuk mendorong kemajuan sosial dan pembangunan manusia secara menyeluruh (Yongnoan, 2023).

menyebutkan bahwa perdagangan internasional memiliki potensi untuk mendorong tujuan makroekonomi dan pembangunan jangka panjang. Dewasa ini, perdagangan internasional merupakan hal yang wajar. Bahkan bagi negara yang berseteru satu sama lain pun, perdagangan tidak bisa dihindari. Hal ini pula yang terjadi pada Taiwan dan Tiongkok. Dalam tujuh dekade terakhir, hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok telah mengalami perubahan dramatis. Sejak didirikannya Republik China atau Taiwan pada 1949, negara lintas selat beberapa kali mengalami pasang surut ketegangan. Titik balik hubungan negara lintas selat dimulai pada 1987 ketika Tiongkok menghapus status darurat militer. Penghapusan darurat militer ini memungkinkan adanya interaksi antara warga sipil Taiwan – Tiongkok. Kemudian, pada 1991 Taiwan mendirikan *Straits Exchange Foundation* (SEF), sebuah lembaga nonpemerintah yang dipimpin oleh Dewan Urusan Daratan (*Mainland Affairs Council*, MAC) yang ditanggapi oleh Tiongkok dengan mendirikan *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) (Hui-ching, 2018). Sejak didirikannya lembaga-lembaga ini, intensitas perdagangan antar kedua negara mengalami peningkatan.

Dewasa ini, hubungan perdagangan Taiwan – Tiongkok semakin berkembang, terutama setelah ditandatanganinya ECFA (*Economic Cooperation Framework*) pada 2010. Tujuan utama dari ECFA adalah penguatan hubungan ekonomi antara kedua belah pihak dengan mengurangi hambatan perdagangan dan mempromosikan kerja sama ekonomi. ECFA mencakup penghapusan tarif, pembukaan sektor jasa, perlindungan investasi, hingga penyelesaian sengketa (Chen et al., 2012). Menurut penelitian oleh Huang & Soong (2016), ECFA menunjukkan efek positif bagi Taiwan. Demikian pula dampaknya bagi Tiongkok. Beijing beranggapan bahwa ECFA memberi dampak yang positif bagi integrasi ekonomi regional. ECFA dianggap mendorong penguatan peran Tiongkok bersama dengan Hong Kong dan Taiwan dalam rantai pasokan global serta menguatkan pergeseran modal kerja sama ekonomi lintas selat.

Nilai ekspor barang dari Taiwan ke Tiongkok sejak 2011 hingga 2021 mengalami perkembangan, meskipun nilainya naik turun. Akan tetapi, pada tahun

2017 ke 2018, terdapat kenaikan yang signifikan. Dikutip dari situs resmi Kementerian Keuangan Taiwan, pada 2018 jumlah perdagangan Taiwan ke Tiongkok mencapai 24% dengan total US\$ 150 juta. Data tersebut dibagi menjadi US\$ 96,6 juta ekspor dan US\$ 53 juta impor. Pada 2019, Tiongkok tetap menjadi mitra dagang terbesar bagi Taiwan. Tiongkok menduduki peringkat pertama dengan perdagangan bernilai US\$ 149 juta, yakni 24% perdagangan internasional Taiwan. Nilai ekspor pada 2019 bernilai US\$ 91,7 juta dengan impor sebesar US\$ 57 juta. Pada 2019, terjadi kenaikan nilai perdagangan antara Taiwan dengan Tiongkok yang menyentuh angka US\$ 166 juta. Nilai ini menunjukkan sebesar 26% dari total perdagangan internasional Taiwan menuju atau berasal dari Tiongkok. Pada tahun tersebut, ekspor ke Tiongkok bernilai US\$ 102,45 juta dengan impor sebesar US\$ 63,5 juta. Selanjutnya pada 2020, Tiongkok kembali menjadi mitra dagang nomor satu bagi Taiwan dengan total perdagangan internasional sebesar 29%. Senilai US\$ 166 juta transaksi dilaksanakan kedua negara pada tahun ini, dengan US\$ 102,4 juta diantaranya adalah ekspor dan US\$ 63,5 lainnya merupakan impor. Volume perdagangan Taiwan dan Tiongkok mengalami kenaikan jumlah pada 2021 dengan angka menyentuh US\$ 208 juta atau sekitar 25%. US\$ 125,9 juta diantaranya merupakan ekspor dan US\$ 82,4 juta lainnya adalah impor.



Gambar 4. 3 Nilai Ekspor Barang dari Taiwan ke Tiongkok, 2011 hingga 2021 (dalam miliar dolar AS)

(Sumber: Statista, diolah dari MOF Taiwan)

Pada 2018, perdagangan meningkat antara kedua negara disinyalir merupakan buah dari diluncurkannya 31 langkah kebijakan preferensial¹². Kebijakan ini menghasilkan perlakuan istimewa bagi perusahaan asal Taiwan di Tiongkok berkenaan dengan pajaknya. Lebih dari itu, iklim perdagangan kedua negara semakin harmonis didorong dengan adanya dukungan keuangan khusus di bawah program transformasi dan peningkatan industri ramah lingkungan serta manufaktur cerdas bagi lebih 100 perusahaan Taiwan di Tiongkok. Terjadi sedikit penurunan perdagangan antara Taiwan dengan Tiongkok pada tahun berikutnya disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, Presiden Xi Jinping menegaskan kembali keinginannya mengenai satu negara dua sistem bagi Taiwan yang tentu saja ditolak secara tegas oleh Presiden Tsai Ing-wen. Akibatnya, terdapat konfrontasi militer yang dilaksanakan oleh Tiongkok pada tahun ini. *People's Liberation Army* (PLA) mempersiapkan diri untuk 'menghadapi' Taiwan. Menurut catatan dalam buku putih pertahanan dilansir dari CFR, PLA mengungkapkan bahwa mereka akan mengalahkan siapapun yang mencoba memisahkan Taiwan dari Tiongkok (Maizland, 2023). Ketegangan ini berlanjut hingga pada titik Presiden Xi menekan Taiwan melalui cara non-militer, seperti pembatasan kunjungan turis ke Taiwan. Presiden Tsai-pun juga menghadapi Tiongkok dengan tegas. Menantang 31 langkah kebijakan preferensial oleh Tiongkok kepada pengusaha Taiwan, Presiden Tsai meluncurkan rencana tiga tahun untuk memberikan insentif kepada produsen Taiwan agar memindahkan usaha mereka dari Tiongkok. Pada 2020, ketika Covid-19 menjadi pandemi, volume perdagangan Taiwan dan Tiongkok meningkat karena permintaan chip melonjak. TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) menerima permintaan yang cukup tinggi akibat produksi gawai juga meningkat. TSMC menurut CNBC juga memiliki pabrik yang beroperasi di Tiongkok. berlanjut pada 2021, Taiwan mengekspor sebanyak US 188,91 miliar barang ke Tiongkok dan Hong Kong yang hampir setengahnya merupakan komponen elektronik.

¹² 31 Kebijakan Preferensial yang dikeluarkan Tiongkok merupakan serangkaian kebijakan yang bertujuan untuk membina hubungan ekonomi dan sosial yang lebih erat antara Tiongkok dengan Taiwan (Mainland Affairs Council, 2019).

4.3.2 Investasi Lintas Selat

Investasi memainkan peran penting dalam mendorong interdependensi ekonomi antara dua negara. Melalui investasi, negara-negara dapat terhubung secara ekonomi dan membangun hubungan yang erat. Investasi asing, baik berupa investasi langsung asing (FDI) maupun investasi portofolio, menciptakan aliran modal antara negara-negara tersebut (James, 2003). Selain itu, investasi membantu menciptakan hubungan yang lebih kuat melalui transfer teknologi dan pengetahuan dari negara asal investasi ke negara tuan rumah (UNCTAD, 2017). Transfer teknologi ini berkontribusi pada peningkatan daya saing dan kemampuan produksi negara tuan rumah. Investasi juga mendorong diversifikasi pasar ekspor negara tuan rumah dengan memanfaatkan jaringan distribusi global dan akses ke pasar baru (IMF, 2021). Selain itu, investasi dapat meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui praktik manajemen yang maju dan pelatihan karyawan yang intensif (World Bank, 2019). Pertumbuhan ekonomi yang dicapai melalui investasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Dalam konteks ini, investasi memberikan dampak multiplier yang menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Secara keseluruhan, investasi berperan penting dalam menciptakan interdependensi ekonomi yang saling menguntungkan antara negara-negara.

Baik bagi pihak Taiwan maupun Tiongkok, investasi memainkan peran penting bagi perkembangan ekonomi. Perkembangan perekonomian Tiongkok bagi Lin (2016) merupakan salah satu 'keajaiban' investasi. Lin meneliti pola pertumbuhan Tiongkok yang sejak awal reformasi menegaskan dalam kebijakan ekonomi nasionalnya mengenai privatisasi, investasi asing, serta keterbukaan bagi modal asing. Lin yang berpartisipasi langsung dalam Perundingan Koo Wang dialog antara Taiwan dengan Tiongkok pada 1993 menjadi saksi peliknya awal mula kerja sama investasi antar kedua belah pihak. Ada banyak faktor terkait dengan proses kerja sama ekonomi lintas selat. Menurut Lin, variabel ekonomi belum cukup untuk menjabarkan kompleksitas masalah ini. Terdapat faktor lain seperti identitas nasional yang menjadi salah satu tolok ukur preferensi ekonomi

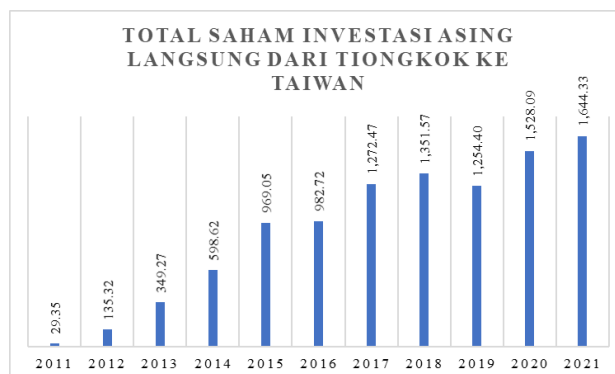
lintas selat. Belum lagi terkait dengan tekanan-tekanan yang diterima oleh Taiwan dari Tiongkok. Ambisi “Satu Tiongkok” menimbulkan respons yang tidak konsisten dari pihak Taiwan. Selama ini, banyak kebijakan yang silih berganti dan terkadang berkontradiksi satu sama lain. Evolusi kebijakan ekonomi Taiwan bagi perdagangan dan investasi lintas selat tidak selalu berjalan mulus dan berkesinambungan. Seperti yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, liberalisasi perdagangan lintas selat kerap kali diterapkan namun tidak jarang juga dilakukan pembatasan.

Taiwan mulai mengizinkan investasi langsung ke Tiongkok pada tahun 1991, setelah sebelumnya pada 1979 Tiongkok mendirikan zona ekonomi khusus. Dinamika investasi mulai terjadi pada 1994 ketika Pemerintah Taiwan mendiversifikasi mitra ekonominya ke Asia Tenggara (S. S. Lin, 2016). Pada 1996, Taiwan secara resmi melaksanakan pembatasan formal terhadap investasi berskala besar dan strategis di Tiongkok melalui kebijakan “No Haste” (J. F. Copper, 2013). Pada tahun berikutnya, ketika DPP berkuasa di Taiwan, “Active Opening” menjadi kebijakan baru yang menggantikan “No Haste”. Melalui “Active Opening”, liberalisasi aspek ekonomi lintas selat dilaksanakan. Namun demikian, pada 2006 kebijakan baru yang bertajuk “Active Management” lebih banyak merestriksi hubungan ekonomi lintas selat. Ketika pergeseran kekuasaan kembali ke tangan KMT, pada 2008 liberalisasi kembali dilaksanakan dengan membangun hubungan udara reguler dan langsung antara Taiwan dan Tiongkok. Tidak hanya itu, pembatasan investasi juga dilonggarkan pada tahun ini (V. Z. Chen et al., 2023). Kebijakan lanjutan seperti ECFA juga merupakan salah satu dasar pendorong interdependensi ekonomi lintas selat, meskipun dalam implementasinya mengalami berbagai tantangan. Setelah diberlakukan pada 2011, nyatanya hingga 2014 proyek investasi langsung oleh Taiwan ke Tiongkok masih memerlukan persetujuan per kasus jika nominalnya lebih dari \$50 juta atau terkait dengan produk/industri yang dibatasi (LIAO, 2020). Selain itu, perusahaan Taiwan hanya diperbolehkan berinvestasi maksimal 60% dari total kekayaan bersihnya ke Tiongkok (Tsai & Liu, 2017).

Tidak dapat dipungkiri, Tiongkok memiliki andil yang besar bagi perekonomian Tiongkok. Menurut pengamatan Chen (2023), perekonomian Taiwan selama satu dekade terakhir secara struktural lebih bergantung kepada Tiongkok, baik sebagai pasar maupun basis manufaktur. Dengan berlanjutnya tren globalisasi ekonomi, semakin banyak perusahaan bisnis yang berinvestasi ke Tiongkok demi pertumbuhan dan kinerja pendapatan mereka. Mulanya, usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan perusahaan asal Taiwan yang melakukan ekspansi ke luar negeri. Namun seiring berjalannya waktu, perusahaan multinasional turut mengepakkan sayapnya ke luar negeri. Investasi Taiwan di Tiongkok utamanya dimotivasi oleh faktor-faktor produksi yang murah, terutama tenaga kerjanya. Perusahaan-perusahaan yang berbasis di Taiwan mulai memasuki pasar Tiongkok pada tahun 1983. Pelonggaran pembatasan terhadap warga Taiwan yang mengunjungi kerabat di Tiongkok pada tahun 1987 memicu gelombang investasi besar-besaran. Sejak tahun 1990an, Tiongkok telah menjadi tujuan utama investasi luar negeri Taiwan. Dengan munculnya Tiongkok sebagai jaringan produksi dan pasar ekspor akhir untuk kawasan Asia Timur, perdagangan dan investasi Tiongkok-Taiwan telah meningkat. Kegiatan ekonomi dan perdagangan lintas selat terus meningkat, begitu pula ketergantungan Taiwan pada impor dan ekspor Tiongkok. Ketika kerja sama ekonomi dan keuangan lintas selat menjadi semakin penting, kedua belah pihak berupaya menormalisasi hubungan ekonomi lintas Selat dan membangun kerangka kerja sama ekonomi yang dilembagakan.

Uniknya, investasi negara lintas selat turut disumbang pula oleh faktor lain seperti adanya komunitas bisnis serta ikatan etnis. Para pelaku usaha di dua negara menggunakan koneksi pribadi atau yang sering disebut "*guanxi*" untuk mengatasi kelemahan kompetitif dan sumber daya yang mereka miliki (Jean et al., 2011). Hubungan relasional antara pelaku bisnis semakin memudahkan investasi Taiwan di Tiongkok. Jika dibandingkan, nilai investasi luar negeri langsung dari Tiongkok ke Taiwan sejak 2011 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada 2018, investasi luar negeri langsung yang berasal dari Tiongkok ke Taiwan bernilai US\$ 1.351,57 juta. Meskipun mengalami penurunan pada 2019, namun investasi tetap bernilai lebih dari US\$ 1.254,4 juta. Berlanjut ke tahun 2020 yang menyentuh angka

US\$ 1.528,09 dan berlanjut pada 2021 yang bernilai US\$ 1.644,33. Menurut Chen (2023), hal ini dipengaruhi oleh jaringan produksi Taiwan yang sangat efisien.



Gambar 4. 4 Total Persediaan Investasi Luar Negeri Langsung dari Tiongkok ke Taiwan selama 2011 – 2021 (dalam juta dolar AS)
(Sumber: Statista, diolah dari MOF Tiongkok)

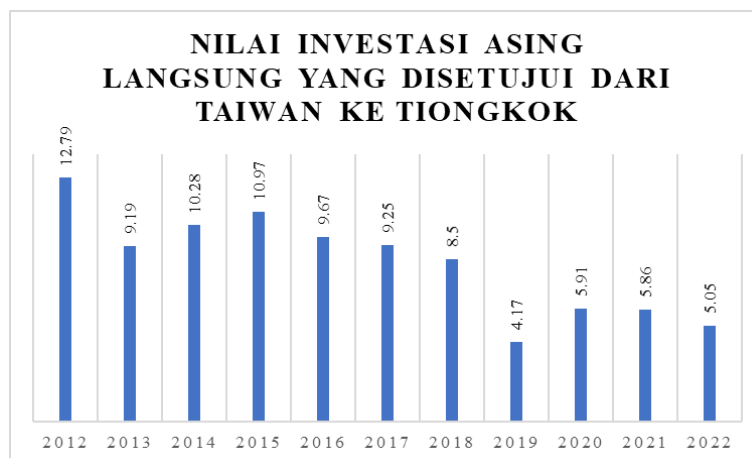
Ada banyak faktor yang mempengaruhi derasnya arus investasi Tiongkok ke Taiwan. Salah satunya adalah amandemen Undang-Undang Merger dan Akuisisi¹³ oleh Taiwan pada 2016. Dalam amandemen terbaru, terdapat berbagai fleksibilitas yang memudahkan pihak pengakuisisi dan pemegang saham. Pada 2018, kenaikan investasi langsung luar negeri dari Tiongkok ke Taiwan ditengarai oleh naiknya tren struktur pertukaran saham *cash-out*. Lebih lanjut, amandemen terkait dengan merger dan akuisisi diakui pihak Taiwan untuk mengatur investasi dari Tiongkok demi mencegah pengelakan pengendalian investasi. Dikutip dari Hsieh et al., (2023), terdapat beberapa perubahan dalam Undang-Undang Merger dan Akuisisi, berupa:

1. Kriteria yang lebih ketat diterapkan untuk mengidentifikasi investasi Tiongkok yang dilakukan melalui perantara wilayah ketiga;
2. Investor Tiongkok yang ingin mengendalikan perusahaan Taiwan melalui pengaturan kontrak juga diharuskan untuk mengajukan persetujuan peraturan.

¹³ Undang-undang yang mengatur mengenai penggabungan dua entitas bisnis menjadi satu. Merger terjadi ketika dua bisnis membentuk entitas ketiga yang baru. Dalam akuisisi, satu perusahaan membelu dan melebur ke dalam operasi perusahaan lain (McSweeney & Happonen, 2012).

Dengan adanya amandemen ini, Pemerintah Taiwan menghendaki agar segala transaksi lintas selat disusun secara berhati-hati demi memenuhi persyaratan bagi investor Tiongkok di Taiwan. Selama dekade terakhir, merger dan akuisisi yang terjadi di Taiwan. Pada 2018, muncul tren investor keuangan yang kembali ke pasar setelah minimnya kegiatan selama satu dekade. Terdapat berbagai serangkaian kesepakatan, termasuk akuisisi LCY (Lee Chang Yung) secara privat oleh KKR (Kohlberg Kravis Roberts), akuisisi Microlife secara privat oleh Morgan Stanley, akuisisi portofolio tenaga surya oleh Blackrock, dan investasi Permira ke perusahaan akuakultur Grobest, yang semuanya dipimpin oleh dana ekuitas swasta. Meskipun tren investasi keuangan ini tidak berlanjut setelah tahun 2019, masih ada beberapa transaksi yang dilakukan oleh dana ekuitas swasta sepanjang tahun 2020 hingga 2021. Transaksi ini termasuk akuisisi swasta atas On-Bright oleh Magicapital, Pavilion Capital, dan Axiom Capital pada tahun 2020 dan akuisisi swasta atas Ginko oleh Baring Private Equity Asia pada tahun 2021.

Sementara itu, apabila melihat sisi lain, investasi Taiwan ke Tiongkok tetap berjalan. Pada 2018, sebesar US\$ 8,5 miliar investasi luar negeri langsung yang disetujui di Tiongkok berasal dari Taiwan. Sayangnya, terjadi penurunan pada 2019, nilai investasi luar negeri langsung hanya mencapai US\$ 4,17 miliar. Sementara itu, pada 2020, senilai US\$ 5,9 miliar investasi disetujui dari Taiwan ke Tiongkok. Pada tahun berikutnya, terjadi penurunan yakni hanya US\$ 5,86 miliar dan US\$ 5,05 miliar pada 2020 dan 2022. Menurut Times of India (2023), penurunan investasi ini disinyalir karena faktor geopolitik, yakni ketegangan antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Perubahan kebijakan perdagangan Amerika Serikat ke Tiongkok berpengaruh terhadap investasi Taiwan ke Tiongkok.



**Gambar 4. 5 Nilai Investasi Langsung Luar Negeri dari Taiwan ke Tiongkok (2011 – 2022)
(dalam miliar dolar AS)**

(Sumber: Statista, diolah dari MOEA Taiwan)

Menurunnya investasi perusahaan Taiwan ke Tiongkok juga disebabkan oleh upaya diversifikasi investasi ke belahan dunia lain. Perusahaan-perusahaan Taiwan, yang biasanya merupakan investor terbesar di Tiongkok, telah mengurangi belanja modal baru di negara dengan Tiongkok selama dekade terakhir (Ellis, 2023). Perlambatan ini semakin cepat sejak mantan presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai mendorong perusahaan-perusahaan AS untuk memisahkan diri dari Tiongkok, sebuah kebijakan yang sebagian besar dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden (Asia Report N°333, 2023). Maka tidak mengherankan apabila investasi dari perusahaan Taiwan ke Tiongkok mengalami penurunan.

BAB 5

ANALISIS INTERDEPENDENSI EKONOMI TAIWAN DAN TIONGKOK

Interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok merupakan hubungan yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang telah berkembang secara signifikan selama beberapa dekade terakhir. Interdependensi ini tidak dihentikan oleh ketegangan politik yang sedang berlangsung (Chiang, 2021). Interdependensi antar dua negara ditandai dengan perdagangan, investasi, dan hubungan rantai pasokan yang luas, terutama di industri elektronik dan semikonduktor (Chen & Hou, 2022). Pada tahun 2020, perdagangan lintas selat mencapai rekor tertinggi, dengan ekspor Taiwan ke Tiongkok (termasuk Hong Kong dan Makau) menyumbang hampir 44% dari total ekspornya (Dewan Urusan Daratan, 2021). Perusahaan-perusahaan Taiwan telah menginvestasikan lebih dari \$188 miliar di Tiongkok sejak tahun 1991, membangun jaringan manufaktur dan rantai pasokan yang mendalam (Komisi Investasi, 2021). Namun, interdependensi ini tidak hanya sepihak, karena Tiongkok sangat bergantung pada Taiwan untuk teknologi canggih, terutama semikonduktor, yang saat ini tidak memiliki kemampuan untuk diproduksi secara mandiri (Hsu, 2022). Kedua negara terkunci dalam keadaan interdependensi ekonomi dengan masing-masing pihak memiliki pengaruh yang unik, menciptakan keseimbangan yang rumit yang sebagian besar tetap terisolasi dari ketegangan politik (Chiang, 2021; Chen & Hou, 2022). Seiring dengan berkembangnya lanskap ekonomi global, dinamika interdependensi ini dapat bergeser, tetapi ikatan ekonomi yang mendalam antara Taiwan dan Tiongkok kemungkinan besar akan tetap menjadi ciri khas hubungan mereka (Chiang, 2021; Hsu, 2022).

Menurut laporan dari Pemerintah Taiwan, kedua negara lintas selat merupakan mitra ekonomi yang strategis bagi satu sama lain. Interdependensi ekonomi muncul di antara negara lintas selat sebagai suatu kesadaran bahwa reformasi dalam negeri dapat tumbuh apabila hubungan eksternal stabil dan damai.

Interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok dapat dilihat dari intensifikasi perdagangan barang dan investasi. Richard Cooper dalam Baldwin (1980) menegaskan bahwa ketergantungan ekonomi biasanya mengacu pada nilai dolar dari transaksi ekonomi antar wilayah atau negara secara absolut, atau relatif, terhadap total transaksinya. Perkembangan hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok tidak terjadi secara instan. Menurut Baldwin (1980), saling ketergantungan ekonomi internasional merupakan akibat dari kemajuan teknologidan kebijakan terkait yang membuka perekonomian nasional untuk bersaing di tingkat global. Terdapat berbagai faktor pendorong interdependensi ekonomi secara umum, diantaranya:

1. Pertumbuhan ekonomi dunia seiring dengan pertumbuhan ekonomi dunia, interaksi perdagangan antar negara dan antar-kawasan meningkat pesat (Baalam et al., 2012).
2. Meningkatnya *foreign direct investment* (FDI). Internasionalisasi produksi dapat ditempuh dengan masuknya investasi luar negeri langsung. Investasi asing langsung telah tumbuh pada tingkat yang jauh melampaui pertumbuhan perdagangan atau output internasional sejak akhir tahun 1980an. Khususnya pada paruh kedua tahun 1990an, perusahaan-perusahaan sangat aktif dalam merger dan akuisisi (M&A) lintas negara. Stok FDI global yang beredar meningkat lebih dari dua kali lipat dalam waktu sepuluh tahun dari 8,3% PDB dunia pada tahun 1990 menjadi 17,5% pada tahun 2000 (UNCTAD, 2002). Menurut penelitian oleh Wong & Tang (2020) ditemukan bahwa investasi masuk maupun keluar dari Taiwan ke Tiongkok berfluktuasi sesuai dengan kebijakan pemegang kekuasaan. Pada masa kepemimpinan Ma Ying-jeou, terdapat kenaikan bagi kedua arus investasi; baik masuk maupun keluar. Sementara itu, pada masa kepemimpinan Tsai Ing-wen, lebih banyak investasi yang dikeluarkan daripada diterima oleh Taiwan ke Tiongkok.
3. Kerja sama ekonomi: interdependensi ekonomi tentu didasari dengan adanya kerja sama ekonomi. Menurut Zhang (2012), sejak Tiongkok dan

Taiwan menandatangani *Economic Cooperation Framework Agreement* (ECFA) pada tahun 2010, pembangunan ekonomi telah menjadi salah satu isu terpenting di antara kedua belah pihak. Sejak adanya ‘perdamaian’ antara Tiongkok dan Taiwan pada tahun 1980-an, ekonomi dan perdagangan lintas selat telah menunjukkan dua karakteristik utama. Pertama, volume perdagangan, jumlah investasi, dan terutama saling ketergantungan ekonomi antara kedua belah pihak terus meningkat. Kedua, meskipun berada di bawah pengaruh hubungan politik yang berfluktuasi, hubungan ekonomi lintas selat masih mempertahankan kecenderungan perkembangan yang stabil. Karena dampak globalisasi ekonomi, baik Tiongkok maupun Taiwan memperhitungkan kembali kepentingan ekonomi nasionalnya.

Jika diruntut ke belakang, pertumbuhan hubungan ekonomi negara lintas selat mulanya didorong oleh kepentingan nasional kedua negara. Mengutip penelitian oleh Chen (2003), pasca bergesernya kepemimpinan PKT ke Deng Xiaoping karena kematian Mao Zedong pada 1976, hubungan lintas selat beralih ke jalur yang lebih damai. Hingga tahun 1995, kebijakan Tiongkok ke Taiwan sebagian besar bersifat damai dan jarang mengerahkan kekuatan militer maupun ancaman politik. Xu Xiangqian yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Tiongkok berkomitmen pada Januari 1979 untuk menghentikan segala serangan ke Pulau Quemoy dan Matsu sebagai upaya damai dalam menormalisasi hubungan dengan Taiwan (Chen, 2003). Pada saat yang bersamaan, Kongres Rakyat Nasional atau *National People's Congress* (NPC) berpesan untuk mempromosikan proses unifikasi yang damai melalui pembentukan jaringan perdagangan, transportasi, dan surat menyurat melintasi Selat Taiwan. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap Taiwan berubah menjadi lebih damai dan kooperatif, ditandai dengan penghentian serangan militer dan fokus pada normalisasi hubungan.

Upaya unifikasi melalui jalur damai ini berlanjut pada dekade berikutnya. Pada 30 September 1981, Ye Jianying¹⁴ mengajukan proposal upaya reunifikasi secara damai melalui pembukaan tiga hubungan. Selain itu, Ye juga menyerukan empat pertukaran yakni pertukaran akademik, budaya, ekonomi, serta olahraga sebagai tahapan awal untuk menghilangkan antagonism antara kedua belah pihak. Selain itu, pihak Beijing juga menawarkan berbagai keringanan brupa pajak khusus serta persyaratan yang jauh lebihsederhana bagi investasi dari Taiwan menuju Tiongkok (Chen, 2003). Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempererat hubungan lintas selat dan mendorong proses reunifikasi secara damai.

Taiwan menanggapi berbagai upaya Tiongkok di atas dengan sikap yang penuh pertimbangan. Mulanya, Taipei bersikeras menerapkan “Tiga Tidak”¹⁵ karena menganut prinsip kehati-hatian dalam membuka kontak dengan Tiongkok. Akan tetapi, pada 1986 Taiwan melonggarkan pembatasan kontak dengan Tiongkok. Hal ini dimulai dengan melonggarkan perbatasan perdagangan, investasi, dan perjalanan ke Tiongkok pada 1987. Selain itu, Taiwan juga mulai melonggarkan pembatasan perdagangan, investasi, dan perjalanan ke Tiongkok pada 1987. Meskipun demikian, pada 1990 berbagai kelonggaran ini dicabut oleh Pemerintah Taiwan. Hal ini disebabkan kesulitan pengendalian terhadap perdagangan tidak langsung akibat larangan kunjungan Tiongkok dicabut. Selain itu, untuk menanggapi delapan poin proposal perdamaian Jiang Zemin¹⁶, Taipei secara resmi mengumumkan bahwa hubungan lintas selat akan bergantung pada ekonomi dan perdagangan.

Berbagai kepentingan kedua negara dikemas dalam berbagai perjanjian dan pelembagaan organisasi yang menjembatani kepentingan kedua negara. Dengan

¹⁴ Ye Jianying adalah seorang pemimpin revolusioner komunis Tiongkok dan politikus yang sangat berpengaruh. Setelah Deng Xiaoping naik ke tampuk kekuasaan, Ye menjabat sebagai Ketua Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional dari 1978 hingga 1983, yang membuatnya menjadi kepala negara nominal Tiongkok pada periode tersebut (Britannica, 2024).

¹⁵ Tiga Tidak merupakan kebijakan yang diterapkan di masa kepemimpinan Chiang Ching-kuo. Kebijakan ini antara lain memuat tidak ada kontak dengan Tiongkok, tidak bernegosiasi bersama Tiongkok, serta tidak ada kompromi dengan Tiongkok (J. F. Copper, 2013).

¹⁶ Pada 30 Januari 1995, Jiang Zemin, yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok dan Presiden Tiongkok, mengajukan sebuah proposal perdamaian yang dikenal sebagai "Delapan Poin Jiang Zemin" untuk pengembangan hubungan antara Tiongkok dan Taiwan serta reunifikasi damai.

dibentuknya *Strait Exchange Foundation* (SEF) dan *The Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS), maka promosi kerja sama ekonomi, budaya, dan politik antar kedua belah pihak dapat diintensifikasikan. Tidak hanya itu, pembentukan organisasi-organisasi ini bertujuan untuk mengurangi ketegangan serta meningkatkan keamanan di sekitar Teluk Taiwan (Romualdi & Rochmat, 2023). Interdependensi antara Taiwan dan Tiongkok ini menggambarkan bahwa bukan hanya keadaan saling membutuhkan, namun juga melibatkan kekuatan, kepentingan, dan hubungan yang melintasi batas-batas nasional (Keohane & Nye, 2011).

Berbagai kepentingan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok lantas dijabatani dengan berbagai perundingan. Pada Agustus 2015, terdapat 11 putaran perundingan yang menghasilkan 2 konsensus serta 23 perjanjian formal yang 21 di antaranya telah berlaku. Berbagai perjanjian ini menegaskan bahwa isu ekonomi dan interdependensi mendapat posisi yang diperhatikan dalam agenda politik kedua negara. Perjanjian paling signifikan yang dihasilkan dari perundingan tersebut adalah ECFA (*Economic Cooperation Framework Agreement*) yang ditandatangani bulan Juni 2010 yang bertujuan untuk melembagakan perdagangan dan hubungan ekonomi antara kedua negara (Chang & Hayakawa, 2014). Isu ekonomi tidak begitu saja dipertimbangkan baik oleh Taiwan maupun Tiongkok dalam dialog antar negara pada mulanya.

Dalam hubungan lintas selat, terdapat faktor lain yang dapat mendorong adanya interdependensi ekonomi. Faktor-faktor tersebut adalah terbukanya berbagai saluran selain saluran ekonomi. Saluran lain yang ditemukan sebagai pendorong adanya interdependensi ekonomi kedua negara antara lain saluran sosial budaya, saluran ilmiah dan teknologi, serta politik informal. Maka dari itu, berbagai faktor ini akan dielaborasi berdasarkan kerangka kerja yang disediakan oleh teori interdependensi kompleks, terutama indikator berupa berbagai saluran yang menghubungkan masyarakat.

5.1 Saluran Ekonomi

Meningkatnya hubungan antara Taiwan dengan Tiongkok tercermin dalam berbagai indikator. Menurut penelitian oleh Bukhari (2016), langkah awal keterlibatan ekonomi pada 1979 diambil oleh Tiongkok dengan tujuan unifikasi setelah penerapan reformasi dan kebijakan terbuka pada akhir tahun 1978. Namun, karena adanya peningkatan tren identitas nasional pro-Taiwan, tanggapan negatif mulanya muncul terhadap usaha Tiongkok ini. Ditambah pula dengan kehadiran kebijakan ‘Three Noes’ atau Tiga Tidak.¹⁷ Akan tetapi, Taiwan segera mengadopsi prinsip non-intervensi dalam perdagangan tidak langsung ke Tiongkok. Tidak pungkiri bahwa Tiongkok sangat membutuhkan pertukaran bilateral dalam hal modernisasi, teknologi, modal, serta keahlian manajerial pasca kebijakan ekonomi autarkis pada akhir kepemimpinan dengedong (Bukhari, 2016). Oleh karena itu, Tiongkok mengambil beberapa langkah signifikan seperti mengadopsi kebijakan, undang-undang, serta peraturan preferensial yang menawarkan relaksasi pajak, *Special Economic Zone* (SEZ) atau Zona Ekonomi Khusus, dan perlindungan yang lebih besar bagi investor dari Taiwan. Oleh karena itu, berbagai indikator ini mendorong adanya perkembangan hubungan ekonomi antara Taiwan dengan Tiongkok. Selain itu, keamatan ekonomi kedua negara juga disebabkan oleh posisi Tiongkok sebagai mitra ekonomi utama Taiwan. Kemudian, hubungan kedua negara juga tidak dapat dipisahkan karena posisinya dalam rantai pasokan global.

5.1.1 SEZ (*Special Economic Zone*) Tiongkok dan Kaitannya dengan Taiwan

Peningkatan perdagangan antar kedua negara tidak lepas dari adanya pembentukan SEZ oleh Tiongkok. SEZ adalah area khusus area khusus di dalam suatu negara yang memiliki hukum bisnis dan perdagangan yang berbeda dengan wilayah lain di negara tersebut (Crane et al., 2018). Zona-zona ini dibuat untuk menarik investasi asing, meningkatkan ekspor, dan menciptakan lapangan kerja dengan menawarkan berbagai insentif seperti keringanan pajak, pengurangan

¹⁷ Three Noes atau Tiga Tidak merupakan kebijakan Taiwan yang diimplementasikan pada masa kepemimpinan Chiang Ching-kuo. Tiga Tidak termasuk tidak ada negosiasi, tidak ada kontak, dan tidak ada kompromi. Tujuan utama kebijakan ini adalah merespons bagi percobaan Tiongkok melaksanakan kontak langsung dengan Taiwan (Copper, 2013).

peraturan, dan manfaat ekonomi lainnya. Di Tiongkok, SEZ telah berperan penting dalam transisi dari ekonomi yang direncanakan secara terpusat ke ekonomi yang lebih berorientasi pasar (The World Bank, 2014). Menurut Crane dkk (2018), konsep SEZ di Tiongkok diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an dan awal tahun 1980-an sebagai bagian dari reformasi ekonomi Deng Xiaoping. Empat SEZ pertama didirikan pada tahun 1980 di kota-kota pesisir tenggara Shenzhen, Zhuhai, Shantou, dan Xiamen (The World Bank, 2014). Zona-zona ini dipilih secara strategis karena kedekatannya dengan Hong Kong, Makau, dan Taiwan, yang memfasilitasi investasi dan perdagangan luar negeri. Tujuan utama SEZ di Tiongkok adalah untuk menarik investasi asing langsung (FDI), mempromosikan ekspor, menciptakan lapangan kerja, dan memfasilitasi transfer teknologi. Dengan menawarkan lingkungan ekonomi yang lebih liberal, zona-zona ini bertujuan untuk menjadi tempat uji coba reformasi ekonomi yang nantinya dapat diimplementasikan secara nasional.

SEZ di Tiongkok menawarkan berbagai insentif untuk menarik bisnis. Insentif ini termasuk pembebasan pajak, pengurangan bea masuk, prosedur administrasi yang disederhanakan, dan fleksibilitas yang lebih besar dalam kontrak tenaga kerja dan keuangan (Crane et al., 2018). Selain itu, SEZ sering kali memiliki otoritas legislatif mereka sendiri untuk menciptakan lingkungan bisnis yang menguntungkan (Lu, 2011). Tidak dapat dipungkiri bahwa SEZ oleh Tiongkok memainkan peran penting dalam mendorong adanya interdependensi kompleks antara Taiwan dengan Tiongkok. SEZ yang terletak di Provinsi Fujian berlokasi strategis di dekat Taiwan. Kedekatan ini lantas memfasilitasi integrasi ekonomi dan perdagangan bagi kedua negara. SEZ, khususnya di Provinsi Fujian, memainkan peran penting dalam mendorong interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok karena lokasinya yang strategis di dekat Taiwan, yang memfasilitasi integrasi ekonomi dan perdagangan antara kedua wilayah tersebut.

SEZ Fujian telah secara signifikan meningkatkan perdagangan antara Taiwan dan Tiongkok. Dilansir dari The People's Government of Fujian Province (2024), ekspor Fujian ke Taiwan meningkat lebih dari 20% dari tahun ke tahun

pada tahun 2022. Peningkatan ini menyoroti tumbuhnya ketergantungan ekonomi yang difasilitasi oleh lokasi strategis SEZ dan kebijakan yang menguntungkan. Selain itu di Xiamen, kota utama di Fujian dan bagian dari SEZ, mengalami peningkatan perdagangan luar negerinya dari \$141 juta pada tahun 1980 menjadi 691,6 miliar yuan (sekitar \$108,6 miliar) pada tahun 2020, dengan tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata sebesar 18%. Pertumbuhan ini menggarisbawahi peran SEZ dalam meningkatkan kegiatan perdagangan, termasuk dengan Taiwan.

Kemudian, investasi Taiwan di Fujian sangat besar. Pada akhir tahun 2020, Xiamen sendiri telah menarik investasi dari 63 perusahaan Fortune Global 500, dengan investasi asing yang telah digunakan sebesar \$ 3,63 miliar (Fujian International Investment Promotion Center, 2023). Masuknya investasi dari bisnis Taiwan ini sangat penting dalam memperkuat hubungan ekonomi. PDB Fujian mencapai 5,4 triliun yuan (sekitar \$747 miliar) pada tahun 2022, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 4,7% (Fujian International Investment Promotion Center, 2023). Pertumbuhan ekonomi ini sebagian didorong oleh kemampuan SEZ untuk menarik investasi Taiwan dan memfasilitasi perdagangan lintas selat. Nilai tambah sektor manufaktur di Fujian mewakili 32% dari PDB provinsi tersebut. Perusahaan-perusahaan Taiwan telah memberikan kontribusi yang signifikan pada sektor ini, terutama dalam industri teknologi tinggi dan manufaktur, yang semakin mengintegrasikan ekonomi Taiwan dan Tiongkok.

Tiongkok telah menerapkan rencana jangka panjang untuk meningkatkan infrastruktur dan konektivitas antara Fujian dan Taiwan. Hal ini mencakup pengembangan jaringan gas, listrik, dan transportasi, serta proposal untuk jalur kereta api berkecepatan tinggi lintas selat. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi ekonomi dan memfasilitasi arus perdagangan dan investasi yang lebih lancar. Kebijakan baru-baru ini telah memperkenalkan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan akses Taiwan ke Fujian, seperti mendukung perusahaan-perusahaan Taiwan untuk terdaftar di bursa saham Tiongkok dan menciptakan lingkungan yang lebih santai untuk perjalanan lintas selat. Langkah-langkah ini dirancang untuk memperdalam hubungan ekonomi dan

mempromosikan keuntungan bersama. Output dari industri strategis yang sedang berkembang di Fujian menyumbang 28,3% dari perusahaan industri di atas ukuran yang ditentukan, naik 3,4 poin persentase (Fujian International Investment Promotion Center, 2023). Investasi Taiwan telah memainkan peran dalam pertumbuhan ini, terutama di sektor-sektor seperti petrokimia dan baterai listrik.

Ekonomi kelautan Fujian mencapai 1,2 triliun yuan pada tahun 2023, dan pendapatan pariwisata mencapai 698,1 miliar yuan. Sektor-sektor ini telah mendapat manfaat dari investasi Taiwan dan peningkatan kegiatan ekonomi yang difasilitasi oleh SEZ. Terlepas dari keberhasilannya, SEZ Fujian menghadapi tantangan seperti harga properti yang tinggi dan kesenjangan ekonomi dibandingkan dengan SEZ lain seperti Shenzhen. Selain itu, ketegangan politik antara Taiwan dan Tiongkok dapat berdampak pada hubungan ekonomi, sehingga memerlukan adaptasi dan penyesuaian kebijakan yang berkelanjutan. Singkatnya, SEZ Fujian telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap integrasi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok. Lokasi yang strategis, insentif investasi, pengembangan infrastruktur, dan langkah-langkah khusus untuk perusahaan Taiwan telah menumbuhkan lingkungan yang kuat untuk kegiatan ekonomi lintas selat, yang menghasilkan arus perdagangan dan investasi yang substansial antara kedua wilayah tersebut.

5.1.2 Tiongkok sebagai Pasar Utama bagi Taiwan

Interdependensi ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan sangat luas dan rumit, dengan implikasi yang signifikan bagi kedua negara. Hubungan ini ditandai dengan arus perdagangan yang besar, terutama di sektor elektronik, dan kerentanan ekonomi yang saling menguntungkan yang dapat berdampak global jika terjadi konflik. China adalah mitra dagang terbesar Taiwan, dan angka-angka tersebut menyoroti kedalaman hubungan ekonomi ini. Menurut laporan oleh The Observatory of Economic Complexity (2023), pada tahun 2021, total perdagangan Taiwan mencapai sekitar \$922 miliar, dengan sekitar 25% dari perdagangan ini

dilakukan dengan Tiongkok. Perdagangan termasuk impor dan ekspor, yang menekankan hubungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara. Sektor elektronik, khususnya semikonduktor, memainkan peran penting dalam hubungan perdagangan ini, dengan Taiwan menjadi pemimpin global dalam manufaktur semikonduktor (The Observatory of Economic Complexity, 2023).

Pada Mei 2024, Tiongkok mengekspor barang senilai \$6,55 miliar ke Taiwan dan mengimpor \$17,7 miliar dari Taiwan, menghasilkan neraca perdagangan negatif sebesar \$11,2 miliar untuk Tiongkok (CPT Taiwan, 2024). Dilansir dari CPT Taiwan (2024), antara Mei 2023 dan Mei 2024, ekspor Tiongkok ke Taiwan meningkat sebesar \$ 1,33 miliar (25,5%), sementara impor dari Taiwan meningkat sebesar \$ 2,64 miliar (17,5%). Ekspor teratas dari Tiongkok ke Taiwan termasuk sirkuit terpadu (\$1,48 miliar), telepon (\$304 juta), komoditas yang tidak disebutkan di tempat lain (\$278 juta), komputer (\$180 juta), dan suku cadang mesin kantor (\$143 juta). Sebaliknya, impor teratas dari Taiwan ke Tiongkok adalah sirkuit terpadu (\$9,54 miliar), layar panel datar (\$365 juta), komputer (\$235 juta), perangkat semikonduktor (\$176 juta), dan suku cadang mesin kantor (\$172 juta) (CPT Taiwan, 2024). Data ini menggambarkan hubungan perdagangan yang erat dan interdependensi ekonomi yang signifikan antara kedua negara.

Taiwan mendominasi pasar semikonduktor global, memproduksi 92% chip logika terancang di dunia, yang berukuran kurang dari 10 nanometer. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pembuat chip kontrak terbesar di dunia, adalah pusat dari dominasi ini (Department for Business and Trade of United Kingdom, 2024). TSMC sendiri memproduksi 35% mikrokontroler otomotif dunia dan 70% chipset ponsel pintar. Angka-angka ini menggarisbawahi peran penting Taiwan dalam rantai pasokan global untuk semikonduktor, yang merupakan komponen penting dalam berbagai industri, mulai dari otomotif hingga elektronik konsumen (Vest et al., 2022). Interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok menciptakan kerentanan bagi kedua belah pihak. Ekonomi Taiwan sangat bergantung pada industri semikonduktor, yang sangat terintegrasi dengan rantai pasokan global (Vest et al., 2022). Gangguan di sektor ini akan berdampak

buruk tidak hanya pada Taiwan tetapi juga pada industri global yang bergantung pada chip ini, seperti otomotif, elektronik, dan telekomunikasi.

Implikasi dari interdependensi ekonomi ini sangat luas. Konflik atau blokade di Selat Taiwan akan sangat mengganggu perdagangan antara Taiwan dan Tiongkok, dengan implikasi yang lebih luas bagi ekonomi global. Diperkirakan bahwa blokade dapat membahayakan aktivitas ekonomi senilai lebih dari \$2 triliun, yang akan berdampak pada industri di seluruh dunia (Alperovitch, 2024). Rantai pasokan semikonduktor akan sangat terpengaruh, yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan dan efek tingkat kedua di berbagai sektor. Ekonomi global akan menghadapi gangguan substansial karena peran sentral Taiwan dalam manufaktur semikonduktor. Industri seperti *e-commerce*, logistik, dan hiburan, yang mengandalkan chip ini, akan sangat terpengaruh. Kelangkaan komponen penting dapat menyebabkan penghentian produksi, peningkatan biaya, dan ketidakstabilan ekonomi yang meluas.

Untuk mengurangi risiko ini, negara dan perusahaan sedang mengeksplorasi alternatif. Hal ini termasuk meningkatkan persediaan chip penting, mendiversifikasi rantai pasokan, dan berinvestasi dalam kemampuan manufaktur semikonduktor di luar Taiwan. Namun, mengingat dominasi Taiwan di sektor ini, menemukan alternatif jangka pendek merupakan tantangan. Sentimen investor terhadap Tiongkok semakin berhati-hati karena risiko yang dirasakan terkait dengan ketegangan lintas selat. Sejak kunjungan Perwakilan Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, investor telah mengembangkan kesadaran yang lebih cangguh tentang risiko-risiko ini dan mulai memperhitungkannya dalam proses pengambilan keputusan mereka (N. Huang, 2022). Hal ini telah menyebabkan pergeseran bertahap dari pasar Tiongkok, dengan beberapa investor dan perusahaan memilih untuk keluar dari posisi mereka lebih awal untuk menghindari potensi gangguan di masa depan.

Tiongkok secara historis telah menggunakan paksaan ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perusahaan dan negara asing sebagai tanggapan atas tindakan

yang berhubungan dengan Taiwan. Hal ini termasuk memberlakukan pembatasan perdagangan dan investasi, yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Taiwan. Namun, langkah-langkah tersebut juga berisiko merugikan ekonomi Tiongkok sendiri, mengingat interdependensi antara kedua negara. Implikasi strategis jangka panjang dari interdependensi ekonomi ini sangat kompleks. Meskipun Tiongkok dan Taiwan mendapatkan keuntungan dari hubungan perdagangan mereka, potensi konflik menimbulkan risiko yang signifikan. Para pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis harus menavigasi risiko-risiko ini dengan hati-hati, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pertimbangan geopolitik.

Kesimpulannya, interdependensi ekonomi antara Tiongkok dan Taiwan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, hal ini mendorong pertumbuhan dan integrasi ekonomi; di sisi lain, hal ini menciptakan kerentanan yang dapat menimbulkan dampak global yang parah jika terjadi konflik. Memahami dan memitigasi risiko-risiko ini sangat penting untuk menjaga stabilitas di kawasan ini dan memastikan ketahanan rantai pasokan global. Angka-angka tersebut menceritakan kisah yang menarik tentang betapa terjalinnya ekonomi Tiongkok dan Taiwan, dan potensi konsekuensi dari setiap gangguan terhadap hubungan ini sangat signifikan dan luas jangkauannya.

5.1.3 Rantai Pasokan Global dalam Hubungan Ekonomi Taiwan – Tiongkok

Rantai nilai global (global value chain/GVC) adalah jaringan produksi dan perdagangan yang menjangkau banyak negara, di mana berbagai tahap produksi dilakukan di berbagai lokasi di seluruh dunia. Rantai ini telah menjadi ciri khas ekonomi global modern, yang memungkinkan negara-negara untuk berspesialisasi dalam tahap produksi tertentu, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya (C. Lee, 2017). GVC memfasilitasi aliran barang, jasa, informasi, dan modal lintas batas, yang menghubungkan ekonomi dalam jaringan interdependensi. Bagi negara-negara berkembang, partisipasi dalam GVC dapat menyediakan mekanisme untuk pembelajaran, inovasi, dan peningkatan industri yang cepat, karena mereka mendapatkan akses ke teknologi canggih dan pasar baru (C. Lee, 2017). Di sisi lain,

negara-negara maju mendapatkan keuntungan dari biaya produksi yang lebih rendah dan peningkatan daya saing.

Integrasi Tiongkok ke dalam GVC telah menjadi proses transformatif. Sejak akhir 1970-an, Tiongkok memanfaatkan biaya tenaga kerja yang rendah dan kebijakan investasi yang menguntungkan untuk menarik investasi asing dalam industri padat karya (C. Lee, 2017). Seiring berjalannya waktu, perusahaan-perusahaan Tiongkok telah bergerak naik dalam rantai nilai, bergeser ke arah kegiatan bernilai tambah yang lebih tinggi melalui peningkatan industri, penelitian dan pengembangan, adopsi teknologi, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Pada tahun 2019, pangsa ekspor global Tiongkok telah meningkat menjadi 13%, menjadikannya pemain utama dalam GVC (C. Lee, 2017). Peningkatan ini ditandai dengan transisi Tiongkok dari perakitan global menjadi pemasok dan inovator yang canggih di berbagai industri.

Taiwan, di sisi lain, telah memainkan peran penting dalam menghubungkan kemampuan manufaktur Tiongkok dengan pasar negara maju, terutama dalam industri elektronik. Total perdagangan Taiwan pada tahun 2021 mencapai sekitar \$922 miliar, dengan sekitar 25% dari perdagangan ini dilakukan dengan Tiongkok (Ferenczy, 2022). Sektor elektronik, terutama semikonduktor, merupakan komponen penting dari hubungan perdagangan ini. Taiwan mendominasi pasar semikonduktor global, memproduksi 92% chip logika tercanggih di dunia, yang berukuran kurang dari 10 nanometer (Ferenczy, 2022). Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pembuat chip kontrak terbesar di dunia, adalah pusat dari dominasi ini. TSMC sendiri memproduksi 35% mikrokontroler otomotif dunia dan 70% chipset ponsel pintar (Ferenczy, 2022). Angka-angka ini menggarisbawahi peran penting Taiwan dalam rantai pasokan global untuk semikonduktor, yang merupakan komponen penting dalam berbagai industri, mulai dari otomotif hingga elektronik konsumen.

Hubungan ekonomi lintas selat adalah hubungan yang memiliki banyak aspek dan mengakar kuat, yang secara signifikan dipengaruhi oleh rantai nilai

global. Interdependensi ini terutama terlihat di sektor elektronik dan semikonduktor, di mana Taiwan memainkan peran penting sebagai pemasok utama ke Tiongkok dan dunia. Evolusi rantai nilai global hanya memperkuat ikatan ekonomi ini, membuat kedua negara sangat bergantung satu sama lain untuk pertumbuhan dan stabilitas. Pada tahun 2021, total perdagangan Taiwan mencapai sekitar \$922 miliar, dengan sekitar 25% dari perdagangan ini dilakukan dengan Tiongkok (Song & Zhou, 2023). Perdagangan ini termasuk impor dan ekspor, yang menekankan hubungan ekonomi yang mendalam antara kedua negara. Sektor elektronik, khususnya semikonduktor, memainkan peran penting dalam hubungan perdagangan ini, dengan Taiwan menjadi pemimpin global dalam manufaktur semikonduktor. Dominasi Taiwan di pasar semikonduktor global sangat mencolok, dengan memproduksi 92% chip logika terancang di dunia, yang berukuran kurang dari 10 nanometer (C. Lee, 2017). Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), pembuat chip kontrak terbesar di dunia, adalah pusat dari dominasi ini. TSMC sendiri memproduksi 35% mikrokontroler otomotif dunia dan 70% chipset ponsel pintar (Song & Zhou, 2023). Angka-angka ini menggarisbawahi peran penting Taiwan dalam rantai pasokan global untuk semikonduktor, yang merupakan komponen penting dalam berbagai industri, mulai dari otomotif hingga elektronik konsumen.

Interdependensi ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok menciptakan kerentanan bagi kedua belah pihak. Ekonomi Taiwan sangat bergantung pada industri semikonduktor, yang sangat terintegrasi dengan rantai pasokan global (C. Lee, 2017). Gangguan di sektor ini akan berdampak besar tidak hanya pada Taiwan tetapi juga pada industri global yang bergantung pada chip ini, seperti otomotif, elektronik, dan telekomunikasi. Misalnya, selama kekurangan semikonduktor tahun 2021, rata-rata produksi kendaraan penumpang Eropa turun sekitar 13%, dengan produksi Jerman jatuh hampir 20% dan produksi Italia lebih dari 25% (Song & Zhou, 2023). Gangguan ini menyoroti potensi dampak yang lebih besar jika terjadi konflik atau blokade yang melibatkan Taiwan. Implikasi dari interdependensi ekonomi ini sangat luas. Konflik atau blokade di Selat Taiwan akan

sangat mengganggu perdagangan antara Taiwan dan Tiongkok, dengan implikasi yang lebih luas bagi ekonomi global. Diperkirakan bahwa blokade dapat membahayakan aktivitas ekonomi senilai lebih dari \$2 triliun, yang akan berdampak pada industri di seluruh dunia (Song & Zhou, 2023). Rantai pasokan semikonduktor akan sangat terpengaruh, yang menyebabkan hilangnya pendapatan yang signifikan dan efek tingkat kedua di berbagai sektor. Ekonomi global akan menghadapi gangguan substansial karena peran sentral Taiwan dalam manufaktur semikonduktor. Industri seperti *e-commerce*, logistik, dan hiburan, yang mengandalkan chip ini, akan sangat terpengaruh. Kelangkaan komponen penting dapat menyebabkan penghentian produksi, peningkatan biaya, dan ketidakstabilan ekonomi yang meluas.

Untuk mengurangi risiko ini, negara dan perusahaan sedang mengeksplorasi alternatif. Hal ini termasuk meningkatkan persediaan chip penting, mendiversifikasi rantai pasokan, dan berinvestasi dalam kemampuan manufaktur semikonduktor di luar Taiwan. Namun, mengingat dominasi Taiwan di sektor ini, menemukan alternatif jangka pendek merupakan tantangan. Sentimen investor terhadap Tiongkok semakin berhati-hati karena risiko yang dirasakan terkait dengan ketegangan lintas selat. Sejak kunjungan Perwakilan Nancy Pelosi ke Taiwan pada Agustus 2022, investor telah mengembangkan kesadaran yang lebih cangguh tentang risiko-risiko ini dan mulai memperhitungkannya dalam proses pengambilan keputusan mereka (N. Huang, 2022). Hal ini telah menyebabkan pergeseran bertahap dari pasar Tiongkok, dengan beberapa investor dan perusahaan memilih untuk keluar dari posisi mereka lebih awal untuk menghindari potensi gangguan di masa depan. Tiongkok secara historis telah menggunakan paksaan ekonomi sebagai alat untuk mempengaruhi perusahaan dan negara asing dalam menanggapi tindakan yang berhubungan dengan Taiwan. Hal ini termasuk memberlakukan pembatasan perdagangan dan investasi, yang dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap Taiwan. Namun, langkah-langkah tersebut juga berisiko merugikan ekonomi Tiongkok sendiri, mengingat interdependensi antara kedua negara. Implikasi strategis jangka panjang dari interdependensi ekonomi ini sangat kompleks. Meskipun Tiongkok dan Taiwan

mendapatkan keuntungan dari hubungan perdagangan mereka, potensi konflik menimbulkan risiko yang signifikan. Para pembuat kebijakan dan pemimpin bisnis harus menavigasi risiko-risiko ini dengan hati-hati, menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan pertimbangan geopolitik.

5.2 Saluran Sosial dan Budaya

Hubungan sosial budaya dapat menjadi faktor penentu untuk saling ketergantungan ekonomi karena interaksi sosial dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal. Hubungan komunitas yang terjadi di Taiwan dan Tiongkok mengalami pasang surut karena berbagai ketegangan politik antar keduanya. Berbagai pembatasan digalakkan kedua negara terhadap segala bentuk komunikasi dan perjalanan baik dari maupun menuju negara lintas selat. Menurut laporan oleh Maizland (2023), pada dua dekade pertama pasca Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok, perjalanan lintas selat dibatasi secara ketat. Kemudian, pada 1987, Taiwan melonggarkan pembatasan perjalanan ke Tiongkok yang lantas diikuti berbagai pembukaan perdagangan dan investasi langsung pada 2001 (BBC News, 2019). Hubungan sosial dan budaya kedua negara semakin berkembang dengan dibukanya “Mini Three Links” yang menyediakan jalur perdagangan langsung, layanan pos, serta transportasi antara Kepulauan Kinmen dan Matsu di Taiwan dengan beberapa kota di Provinsi Fujian (Chen & Lai, 2015). Akan tetapi, pasca terpilihnya Tsai Ing-wen sebagai presiden Taiwan, pembatasan kunjungan ke Tiongkok digalakkan kembali oleh Tiongkok sebagai upaya menekan ekonomi dan politik Taiwan (Scott, 2019). Pembatasan ini berlanjut pasca merebaknya wabah Covid-19, namun dibuka kembali pada 2023 melalui jalur perairan (Antara News, 2023). Semua perkembangan ini menunjukkan dinamika kompleks yang memengaruhi interaksi kedua negara.

Hubungan sosial budaya antara Taiwan dan Tiongkok sangat kompleks dan memiliki banyak segi. Terlepas dari ketegangan politik dan perselisihan antara kedua pemerintah, ada berbagai bentuk pertukaran budaya, pendidikan, dan

kemanusiaan yang telah membantu menjembatani kesenjangan antara kedua belah pihak (Ferenczy, 2022). Pertukaran budaya telah menjadi aspek penting dalam hubungan antar masyarakat. Taiwan dan Tiongkok telah berkolaborasi dalam pameran, dan para cendekiawan dan akademisi sering mengunjungi institusi di seberang Selat Taiwan. Buku-buku yang diterbitkan di masing-masing pihak secara teratur diterbitkan ulang di pihak lain. Namun, pembatasan impor langsung, sistem penulisan yang berbeda, dan sensor menghambat pertukaran buku dan ide. Pertukaran pendidikan juga cukup signifikan. Mahasiswa Taiwan dapat mendaftar ke universitas di Tiongkok daratan tanpa mengikuti ujian nasional terpadu Tiongkok, yang disebut Gaokao. Terdapat program reguler bagi siswa sekolah dari masing-masing pihak untuk mengunjungi pihak lain. Pada tahun 2019, terdapat 30.000 pelajar Tiongkok daratan dan Hong Kong yang belajar di Taiwan, dan lebih dari 7.000 pelajar Taiwan yang belajar di Hong Kong (Aryodiguno & Cornelia, 2022).

Pertukaran pendidikan adalah salah satu saluran sosial budaya utama yang menghubungkan Taiwan dan Tiongkok. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelajar Taiwan yang belajar di daratan Tiongkok mengalami pertumbuhan yang signifikan. Menurut Statista (2023), pada tahun akademik 2021/22, sekitar 56.798 siswa dari Taiwan belajar di luar negeri. Meskipun angka spesifik untuk mereka yang belajar di Tiongkok tidak termasuk dalam statistik, ini menyoroti tren yang lebih luas dari siswa Taiwan yang mengejar pendidikan di luar negeri. Selain itu, banyak pelajar Tiongkok yang juga pergi ke Taiwan untuk menempuh pendidikan tinggi. Dewan Urusan Daratan (2023) melaporkan bahwa beberapa ribu mahasiswa Tiongkok terdaftar di berbagai universitas Taiwan, berkontribusi pada pertukaran akademis dan budaya antara kedua wilayah.

Pertukaran media dan produk budaya juga memainkan peran penting. Selama beberapa dekade terakhir, hubungan budaya telah berkembang antara Taiwan dan Tiongkok melalui pertukaran film, musik, program televisi, dan produk media lainnya (Lee et al., 2022). Pertukaran ini tidak hanya memperkuat pemahaman budaya tetapi juga meningkatkan industri kreatif di kedua wilayah. Sebuah studi yang meneliti pertukaran media/budaya antara Tiongkok dan Taiwan

menyoroti karakteristik dan implikasi utamanya selama 15 tahun terakhir (Lee et al., 2022). Pertukaran ini menunjukkan bagaimana media dapat bertindak sebagai jembatan, mempromosikan rasa saling menghormati dan apresiasi budaya.

Acara dan festival budaya adalah saluran penting lainnya untuk mempromosikan saling ketergantungan sosial-budaya. Berbagai festival budaya, pameran, dan pertunjukan diadakan setiap tahun di Taiwan dan Tiongkok untuk merayakan warisan dan tradisi bersama (Dewan Urusan Daratan, 2023). Misalnya, perayaan bersama Tahun Baru Imlek telah melihat partisipasi dari kedua sisi selat, memupuk rasa persatuan. Dewan Urusan Daratan (2023) melacak jumlah acara pertukaran budaya yang diadakan antara Taiwan dan Tiongkok setiap tahun, menyoroti upaya berkelanjutan untuk mempertahankan ikatan budaya. Acara-acara semacam itu berkontribusi secara signifikan terhadap interaksi antarwarga dan membantu mengurangi ketegangan politik.

Pariwisata adalah komponen penting dari pertukaran sosial budaya. Sebelum pandemi COVID-19, jutaan wisatawan Tiongkok mengunjungi Taiwan setiap tahunnya, sementara sejumlah besar wisatawan Taiwan mengunjungi Tiongkok daratan (Biro Pariwisata Taiwan, 2019). Perjalanan ini memberikan kesempatan untuk interaksi pribadi dan pencelupan budaya. Menurut statistik pemerintah, pada tahun 2019, Taiwan menerima sekitar 2,71 juta pengunjung dari Tiongkok daratan, yang menggambarkan skala interaksi yang didorong oleh pariwisata (Tourism Bureau Taiwan, 2019). Sebaliknya, banyak wisatawan Taiwan yang mengunjungi tempat-tempat terkenal di Tiongkok setiap tahunnya.

Kemudian, pertukaran pengunjung dari Tiongkok ke Taiwan dan juga sebaliknya dapat dilihat melalui data yang dihimpun dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok serta Agensi Imigrasi Nasional Taiwan berikut:

Tabel 5. 1 Pertukaran Kunjungan antara Warga Taiwan ke Tiongkok dan Warga Tiongkok ke Taiwan

No	Pertukaran Kunjungan	Tahun	Jumlah kunjungan
----	----------------------	-------	------------------

1	Kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok	2018	300.000.000
	Kunjungan warga Tiongkok ke Taiwan		266.200.000
2	Kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok	2019	614.000.000
	Kunjungan warga Tiongkok ke Taiwan		268.300.000
3	Kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok	2020	-
	Kunjungan warga Tiongkok ke Taiwan	2020	10.800.000
4	Kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok	2021	-
	Kunjungan warga Tiongkok ke Taiwan		1.300.000
5	Kunjungan warga Taiwan ke Tiongkok	2022	-
	Kunjungan warga Tiongkok ke Taiwan		2.400.000

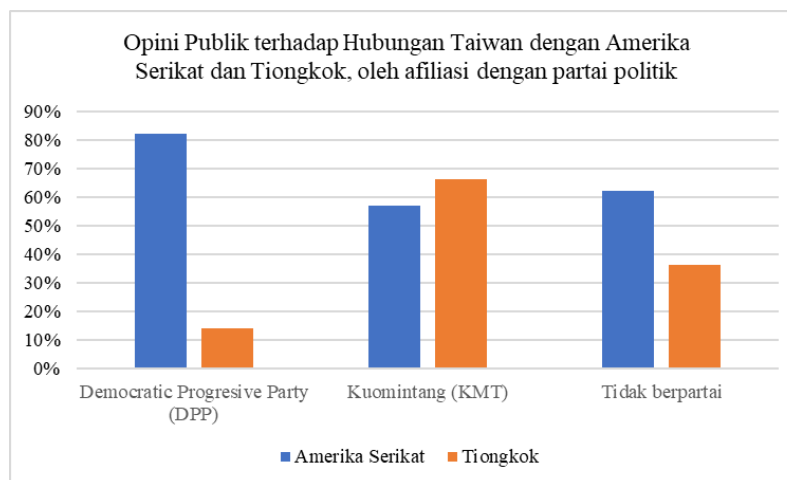
(Sumber: Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Tiongkok & Agensi Imigrasi Nasional Taiwan)

Dari tabel 5.1, dapat dilihat bahwa kunjungan warga lintas selat, baik menuju Taiwan maupun Tiongkok, senantiasa tercatat setiap tahunnya. Meskipun terjadi kehilangan kunjungan oleh warga Taiwan ke Tiongkok sejak 2020 karena mewabahnya Covid-19, namun tetap terdapat kunjungan warga Tiongkok ke

Taiwan meskipun dalam skala kecil pada periode tersebut. Data ini mengindikasikan bahwa tetap ada hubungan yang terjalin antar masyarakat.

Selain itu, bantuan kemanusiaan telah menjadi bidang lain di mana pertukaran antar masyarakat telah memainkan peran penting. Taiwan dan Tiongkok telah memberikan bantuan satu sama lain pada beberapa kesempatan, seperti saat terjadi bencana alam dan pandemi. Sebagai contoh, setelah gempa bumi Sichuan tahun 2008, sebuah tim pencarian dan penyelamatan ahli dikirim dari Taiwan untuk membantu menyelamatkan para korban di Sichuan. Pengiriman bahan bantuan juga diberikan di bawah koordinasi Masyarakat Palang Merah Republik Tiongkok dan badan amal seperti Tzu Chi (Jennings, 2008).

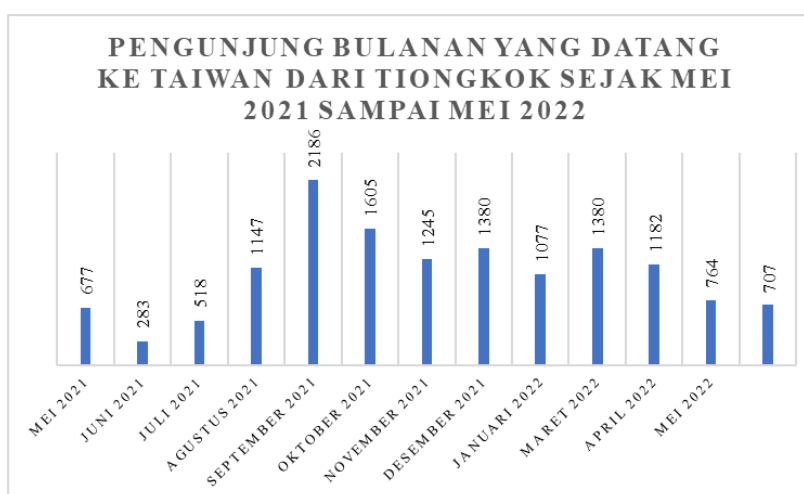
Akan tetapi, ada juga tantangan dan keterbatasan dalam pertukaran antar masyarakat. Ketegangan politik dan perselisihan antara kedua pemerintah telah menciptakan lingkungan di mana pertukaran langsung menjadi terbatas. Ada pembatasan impor langsung, sistem penulisan yang berbeda, dan sensor yang menghambat pertukaran buku dan ide. Selain itu, masalah keamanan telah menjadi tantangan yang signifikan, dengan militer Taiwan yang tidak diakui oleh Tiongkok, dan ada kekhawatiran tentang potensi konflik militer antara kedua belah pihak. Hubungan secara politik antara Taiwan dengan Tiongkok memang sangat dinamis dan cenderung tendensius dari kedua sisi. Namun, mengutip data dari Pew Research Centre (2022), menunjukkan bahwa masyarakat yang menjunjung Kuomintang sebagai partai pilihannya lebih menyukai hubungan Taiwan dengan Tiongkok, dibandingkan dengan hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat. Responden yang 'lebih menyukai' hubungan Taiwan dengan Amerika Serikat tentu berasal paling banyak dari pemilih DPP dengan angka 82%, namun 14% di antaranya tetap menyukai Taiwan – Tiongkok. Selain itu, masyarakat yang tidak mengafiliasikan diri dengan partai dominan manapun, sebagian besar lebih menyukai Taiwan – AS dengan angka 62% dibandingkan Taiwan – Tiongkok dengan angka 36%.



Gambar 5. 1 Opini Publik Terhadap Hubungan Taiwan dengan AS dan Tiongkok di Taiwan tahun 2020, dengan afiliasi partai politik

(Sumber: statista.com)

Pengunjung tahunan dari Taiwan ke Tiongkok pun tercatat cukup tinggi pada 2022. Terdapat 24.380 dari Tiongkok, dan 32.090 dari Makau dan Hongkong. seperti yang dilaporkan oleh Biro Turisme Taiwan. Sementara itu, pengunjung bulanan yang berasal dari Taiwan ke Tiongkok sejak Mei 2021 hingga Mei 2022 terbilang fluktuatif dengan puncaknya pada September 2021 berjumlah 2.186 pengunjung. Diikuti bulan berikutnya yakni Oktober 2021 dengan 1.605 pengunjung dan Desember 2021 serta Februari 2022 dengan jumlah pengunjung sebesar 1.380. Sementara itu, jumlah pengunjung terendah terdapat pada bulan Juni 2021 dengan total 283 pengunjung.



Gambar 5. 2 Pengunjung Bulanan Taiwan yang berasal dari Tiongkok sejak Mei 2021 hingga Mei 2022

(Sumber: statista.com)

Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat ikatan ekonomi dan sosial yang kuat antara kedua wilayah tersebut, dengan Taiwan menjadi mitra perdagangan terbesar Tiongkok dan banyak warga Taiwan memiliki hubungan bisnis dan keluarga melintasi selat (BBC News, 2024). Selain itu, hubungan komunitas, termasuk ikatan keluarga dan jaringan sosial, memainkan peran penting dalam mempromosikan saling ketergantungan ekonomi antara Taiwan dan Tiongkok, memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pertukaran antar manusia (Devlin & Huang, 2020). Namun, terdapat juga ketegangan dan perbedaan pendapat antara kedua wilayah tersebut, dengan Taiwan menganggap dirinya berbeda dari daratan Tiongkok dan banyak warga Taiwan memiliki pandangan negatif terhadap daratan Tiongkok. Oleh karena itu, meskipun terdapat ikatan ekonomi dan sosial yang kuat antara Taiwan dan Tiongkok, hubungan antara rakyat kedua wilayah tersebut kompleks dan beragam.

5.3 Saluran Politik Informal

Saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi dan mengelola ketegangan dalam hubungan lintas selat. Meskipun tidak ada hubungan diplomatik formal, saluran-saluran tidak resmi ini telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog dan negosiasi antara kedua belah pihak. Perkembangan saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok dapat ditelusuri kembali ke tahun 1990-an ketika kedua belah pihak membentuk organisasi tidak resmi untuk mewakili pemerintah masing-masing dalam negosiasi lintas selat. Menurut Crisis Group (2023), “Tiongkok dan Taiwan mengadakan pertemuan politik pertama mereka melalui organisasi tidak resmi yang dibentuk untuk mewakili kedua pemerintah.” Organisasi-organisasi ini, yaitu *Association for Relations Across the Taiwan Straits* (ARATS) untuk Tiongkok dan

Straits Exchange Foundation (SEF) untuk Taiwan, sejak saat itu memainkan peran penting dalam memfasilitasi dialog lintas selat.

Saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok memiliki berbagai bentuk, termasuk diplomasi jalur ganda, pertukaran akademis, jaringan bisnis, dan interaksi budaya. Menurut penelitian oleh Qiang (2020), saluran-saluran ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk berdialog dan bertukar pandangan mengenai isu-isu sensitif tanpa batasan protokol diplomatik formal. Diplomasi jalur ganda, yang melibatkan dialog tidak resmi antara akademisi, mantan pejabat, dan kelompok pemikir, telah menjadi saluran informal yang signifikan untuk komunikasi lintas selat. Dialog-dialog ini sering kali berfokus pada isu-isu seperti kerja sama ekonomi, pertukaran budaya, dan keamanan regional. Meskipun data numerik spesifik tentang frekuensi dialog ini terbatas, dialog-dialog ini telah memainkan peran penting dalam menjaga jalur komunikasi selama periode ketegangan yang meningkat. Pertukaran akademis antara universitas dan lembaga penelitian Taiwan dan Tiongkok berfungsi sebagai saluran politik informal penting lainnya (Qiang, 2020). Pertukaran ini memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan perspektif tentang berbagai isu, termasuk hubungan lintas selat. Meskipun angka pastinya tidak tersedia, pertukaran ini telah berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang posisi masing-masing dan terkadang menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk kedua belah pihak.

Kebijakan diplomasi jalur ganda ini utamanya diinisiasi oleh Beijing terhadap Taipei. Menurut Qiang (2020), diplomasi jalur ganda merupakan kerangka kerja strategis yang menggabungkan langkah-langkah keterlibatan dan penbatasan untuk mengelola hubungan lintas selat yang kompleks. Lebih lanjut, Qiang menjelaskan bahwa diplomasi jalur ganda ini utamanya diterapkan pasca kejayaan DPP di pemilu Taiwan pada 2016. Dari penjeasan Qiang dan penerapan kebijakan oleh Tiongkok terhadap Taiwan, maka dapat dikatakan bahwa pendekatan melalui jalur ganda ini ditandai dengan perpaduan langkah konfrontatif di bidang keamanan, politik, dan diplomatik di samping pendekatan yang inklusif di bidang ekonomi dan sosial budaya yang telah di jelaskan pada subbab sebelumnya. Hal ini

didukung oleh Qiang (2020), yang berargumen bahwa Kombinasi ini bertujuan untuk mengatasi kebuntuan di Selat Taiwan dengan memberikan tekanan pada kekuatan pro-kemerdekaan sambil membina kerja sama dengan entitas yang tidak pro-kemerdekaan.

Jaringan dan asosiasi bisnis juga telah muncul sebagai saluran informal yang signifikan untuk komunikasi lintas selat. Bisnis Taiwan yang beroperasi di Tiongkok sering kali berfungsi sebagai perantara, menyampaikan pesan dan memfasilitasi dialog tidak resmi antara kedua belah pihak. Hubungan ekonomi yang luas antara Taiwan dan Tiongkok, dengan perdagangan bilateral mencapai \$166 miliar pada tahun 2020 (Chiang, 2021), menggarisbawahi pentingnya saluran informal yang digerakkan oleh bisnis ini. Interaksi budaya, termasuk pertunjukan artistik, festival film, dan pertukaran sastra, menyediakan jalan lain untuk komunikasi politik informal. Acara-acara ini sering kali berfungsi sebagai platform untuk diplomasi antarwarga dan dapat membantu membentuk opini publik tentang hubungan lintas selat. Meskipun tidak secara eksplisit bersifat politis, pertukaran budaya ini berkontribusi pada keseluruhan suasana hubungan lintas selat. Partai-partai politik di Taiwan juga berperan dalam membangun saluran informal dengan Tiongkok. Kuomintang (KMT), khususnya, telah mempertahankan kontak tidak resmi dengan Partai Komunis Tiongkok (PKT) melalui dialog antar partai. Interaksi ini terkadang menghasilkan terobosan dalam hubungan lintas selat, seperti pertemuan bersejarah antara ketua KMT saat itu, Lien Chan, dan Sekretaris Jenderal PKT, Hu Jintao, pada tahun 2005.

Selain itu, media di kedua sisi Selat Taiwan telah berfungsi sebagai saluran informal untuk komunikasi dan pengaruh. Sementara media yang dikontrol oleh negara di Tiongkok sering kali mencerminkan posisi resmi, perspektif media Taiwan yang beragam berkontribusi pada pemahaman yang lebih bernuansa tentang isu-isu lintas selat. Platform media sosial juga telah muncul sebagai saluran informal baru untuk komunikasi lintas selat, yang memungkinkan interaksi langsung antara warga kedua belah pihak. Lembaga pemikir dan lembaga penelitian kebijakan di Taiwan dan Tiongkok telah memainkan peran penting dalam

membentuk kebijakan lintas selat melalui analisis dan rekomendasi mereka. Lembaga-lembaga ini sering terlibat dalam dialog Jalur 1.5, yang melibatkan campuran peserta resmi dan tidak resmi. Meskipun data spesifik tentang frekuensi interaksi ini terbatas, pengaruh mereka terhadap perumusan kebijakan cukup signifikan. Organisasi keagamaan juga berfungsi sebagai saluran informal untuk komunikasi lintas selat. Kuil-kuil Buddha dan Tao, misalnya, telah memfasilitasi pertukaran antara Taiwan dan Tiongkok, terkadang bertindak sebagai perantara dalam dialog tidak resmi. Hubungan keagamaan ini menyediakan platform unik untuk pertukaran budaya dan spiritual yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi hubungan politik.

Acara dan pertukaran olahraga telah muncul sebagai bentuk lain dari saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok. Meskipun Taiwan berpartisipasi dalam acara olahraga internasional dengan nama “Chinese Taipei”, acara-acara ini memberikan kesempatan untuk interaksi tidak resmi antara atlet, ofisial, dan penggemar dari kedua belah pihak. Taipei Universiade 2017, misalnya, melihat partisipasi atlet Tiongkok, menunjukkan potensi olahraga sebagai saluran untuk keterlibatan lintas selat. Masalah lingkungan telah menyediakan platform untuk kerja sama informal antara Taiwan dan Cina. Upaya bersama untuk mengatasi tantangan lingkungan di Selat Taiwan, seperti polusi laut dan pengelolaan perikanan, telah menghasilkan dialog dan kolaborasi tidak resmi antara para ahli dan pejabat dari kedua belah pihak. Inisiatif lingkungan ini berfungsi sebagai bentuk kerja sama fungsional yang dapat membangun kepercayaan dan memfasilitasi komunikasi tentang isu-isu lainnya.

Munculnya platform digital dan media sosial telah menciptakan saluran informal baru untuk komunikasi lintas selat. Forum daring, grup obrolan, dan situs jejaring sosial memfasilitasi interaksi langsung antara *netizen* Taiwan dan Tiongkok, memungkinkan pertukaran ide dan perspektif tentang berbagai masalah, termasuk hubungan lintas selat. Meskipun interaksi digital ini sulit untuk diukur, mereka mewakili saluran informal yang berkembang dan berpengaruh. Dengan tidak adanya hubungan diplomatik formal, Taiwan dan Tiongkok telah mendirikan

kantor perwakilan tidak resmi di wilayah masing-masing. Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Taipei Taiwan di Tiongkok dan Asosiasi Pertukaran Pariwisata Lintas Selat Tiongkok di Taiwan berfungsi sebagai kedutaan besar *de facto*, memfasilitasi berbagai bentuk pertukaran dan menyediakan layanan konsuler. Misi-misi tidak resmi ini memainkan peran penting dalam mengelola urusan lintas selat sehari-hari dan berfungsi sebagai saluran politik informal yang penting.

Saluran informal juga sangat penting dalam membangun mekanisme manajemen krisis antara Taiwan dan Tiongkok. Meskipun tidak diakui secara resmi, *hotline*, dan komunikasi jalur belakang antara pejabat militer dan sipil di kedua belah pihak telah dilaporkan ada. Saluran tidak resmi ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengelola potensi krisis di Selat Taiwan. Meskipun penting, saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok menghadapi beberapa tantangan. Ketegangan politik, seperti yang muncul dari meningkatnya tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan, dapat mengganggu saluran-saluran ini. Institut Perdamaian Amerika Serikat (2024) mencatat bahwa “selama delapan tahun terakhir, Tiongkok harus bergantung pada saluran informal dan perantara untuk mengelola ketegangan dengan Taiwan,” menyoroti kebutuhan dan kerentanan komunikasi tidak resmi ini. Efektivitas saluran politik informal dalam hubungan lintas selat masih diperdebatkan. Meskipun saluran-saluran ini telah memainkan peran penting dalam menjaga komunikasi dan mengelola ketegangan, dampaknya dalam menyelesaikan perbedaan politik yang mendasar masih terbatas. Sifat informal dari saluran-saluran ini memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga berarti bahwa kesepakatan yang dicapai melalui saluran-saluran ini mungkin tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal.

Masa depan saluran politik informal antara Taiwan dan Tiongkok masih belum pasti, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti politik dalam negeri di Taiwan dan Tiongkok, geopolitik regional, dan tatanan internasional yang terus berkembang. Karena hubungan diplomatik formal masih belum memungkinkan dalam waktu dekat, pentingnya jalur-jalur informal ini dalam mengelola hubungan lintas selat kemungkinan akan terus berlanjut. Namun, efektivitasnya akan

bergantung pada kemauan politik dari kedua belah pihak untuk terlibat dalam dialog dan kerja sama yang berarti. Maka dari itu, saluran politik informal memainkan peran penting dalam hubungan yang kompleks antara Taiwan dan Tiongkok. Saluran-saluran ini, mulai dari diplomasi jalur dua hingga pertukaran budaya dan interaksi digital, menyediakan jalan penting untuk komunikasi dan keterlibatan tanpa adanya hubungan diplomatik formal. Meskipun data kuantitatif tentang interaksi informal ini sering kali terbatas, dampak kualitatifnya terhadap hubungan lintas selat sangat signifikan. Karena lanskap politik terus berkembang, memahami dan memanfaatkan saluran informal ini akan tetap penting untuk mengelola ketegangan dan membina kerja sama di Selat Taiwan.

BAB 6

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan paparan mengenai interdependensi antara Taiwan dan Tiongkok berkembang melalui berbagai saluran. Keduanya memiliki ikatan interdependensi ekonomi meskipun terjadi ketegangan politik. Berdasarkan kerangka kerja yang disediakan oleh teori interdependensi kompleks oleh Robert Keohane dan Joseph Nye (2011), maka dapat disimpulkan bahwa saling ketergantungan antar kedua negara ditimbulkan dari saluran-saluran berikut:

1. Saluran Ekonomi: reformasi dan kebijakan terbuka Tiongkok pada 1979 menjadi pembuka bagi penerapan strategi ekonomi terhadap upaya reunifikasi Taiwan. Melalui perubahan ini, realisasi *Special Economic Zone* (SEZ) memberikan peluang yang lebih lebar terhadap saling ketergantungan ekonomi bagi kedua negara. Utamanya SEZ yang terletak di Fujian karena kedekatannya dengan Taiwan. Menurut paparan data sebelumnya, dapat dilihat bahwa SEZ Fujian telah membawa investasi, pembangunan infrastruktur, serta beberapa kebijakan khusus bagi pengusaha dari Taiwan. Selain itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Tiongkok menyediakan pasar yang besar bagi produk semikonduktor Taiwan yang melibatkan keduanya dalam rantai pasokan global.
2. Saluran Sosial dan Budaya: terdapat berbagai bentuk pertukaran sosial dan budaya antara negara lintas selat. Termasuk diantaranya adalah pertukaran pelajar, pertukaran media dan budaya, serta pariwisata serta kunjungan baik dari kedua negara ke satu sama lain.
3. Saluran Politik Informal: kedua negara diwadahi oleh organisasi non-formal seperti ARATS dan SEF. Kemudian, jalur diplomasi ganda juga menghubungkan saluran kedua negara. Saluran ini memang tidak signifikan saluran lain dalam megeratkan interdependensi kedua negara,

namun kehadirannya meredakan ketegangan tensi kedua negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., L., W., Angelinawati, Meliana, I., Alfiani, E., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikhrum, F., Andirani, A. D., Rahayu, S. I., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In *Nucl. Phys.* (Vol. 23, Issue 1).
- Albert, E. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 1–6. <http://www.cfr.org/china/china?taiwan?relations/p9223>
- Alperovitc, D. (2024). *A CHINESE ECONOMIC BLOCKADE OF TAIWAN WOULD FAIL OR LAUNCH A WAR*. <https://warontherocks.com/2024/06/a-chinese-economic-blockade-of-taiwan-would-fail-or-launch-a-war/>
- Antara News. (2023). *Perbatasan China-Taiwan dibuka setelah tiga tahun tutup*. <https://www.antaranews.com/berita/3340266/perbatasan-china-taiwan-dibuka-setelah-tiga-tahun-tutup>
- Aryodiguno, H., & Cornelia, T. (2022). Mainland China Student Study in Taiwan: Motivation, Impression, Potential Political Reform Agent. *AEGIS : Journal of International Relations*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.33021/aegis.v6i1.3530>
- Asia Pacific Foundation of Canada. (2022). *China's Import Bans on Taiwan Show Economic Coercion is Here to Stay*. Asia Pacific Foundation of Canada. <https://www.asiapacific.ca/publication/chinas-import-bans-taiwan-show-economic-coercion-here-stay>
- Asia Report N°333. (2023). Preventing war in the Taiwan Strait: Restraining Taiwan--and Beijing. In *International Crisis Group*. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=30386056&Fmt=7&clientId=55007&RQT=309&VName=PQD>
- Baalam, D. N., Veseth, M., & Grbic, M. (2012). Introduction to international political economy. *Economic Horizons*, 14(May-August 2012), 137–139.
- Baldwin, D. A. (1980). Interdependence and power: A conceptual analysis. In *International Organization* (Vol. 34, Issue 4). <https://doi.org/10.1017/S0020818300018828>
- Bartmann, B. (2007). Between De Jure and De Facto Statehood: Revisiting the Status Issue for Taiwan. *Island Studies Journal*, 2(1), 27–46.
- BBC. (2021). *China-Taiwan tensions: Xi Jinping says "reunification" must be fulfilled*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081>
- BBC News. (2019). *Taiwan Profile*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>
- BBC News. (2024). *China and Taiwan: A really simple guide*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139>
- BBC News Indonesia. (2024). *Ada apa di balik ketegangan China-Taiwan yang memanas?* BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gg3z79j3no>

- Bogdan, B., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to theory and methods. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods : : Allyn and Bacon.*, 106–156.
- Brands, H. (2023). *How Would China Take Over Taiwan? One of These 5 Strategies*. Bloomberg. <https://www.aei.org/op-eds/how-would-china-take-over-taiwan-one-of-these-5-strategies/>
- Britannica. (2024). *Ye Jianying*. Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Ye-Jianying>
- Bukhari, S. S. H. (2016). The Dynamics of China-Taiwan Politico-Economic Interdependence: Divergence to Raproachment. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 36(1), 25–37.
- Cathcart, A., & Nash, P. (2008). War Criminals and the Road to Sino-Japanese Normalization: Zhou Enlai and the Shenyang Trials, 1954-1956. *Twentieth-Century China*, 34(2), 89–111. <https://doi.org/10.1353/tcc.0.0014>
- Central Bank. (2019). *Annual Report 2019*.
- Chang, K. I., & Hayakawa, K. (2014). Details in the China-Taiwan free trade agreement. *Journal of Economic Integration*, 29(4), 676–699. <https://doi.org/10.11130/jei.2014.29.4.676>
- Chao, C. M. (1990). China's policy towards taiwan. *Pacific Review*, 3(2), 125–137. <https://doi.org/10.1080/09512749008718855>
- Chao, C. M. (2004). National security vs. economic interests: Reassessing Taiwan's mainland policy under Chen Shui-bian. *Journal of Contemporary China*, 13(41), 687–704. <https://doi.org/10.1080/1067056042000281431>
- Chen, C. (2009). China and Taiwan: A Future of Peace? A Study of Economic conomic Interdependence, dependence, Taiwanese Domestic Politics and Cross-Strait Relations. *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies*, 1(Summer 2009), 14–25.
- Chen, C. (2023). *Prospects for Taiwan ' s Outward Investment in China*. 116578.
- Chen, C. (Frank), & Lai, Y. (Jane). (2015). Modeling and Optimizing Intermodal Logistics Route across the Taiwan Straits. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 11, 666–677. https://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/11/0/11_666/_pdf
- Chen, E. N. H. (2003). *The Economic Integration on Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations*. July, 46. <https://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf%0Ahttp://program.s.wcfia.harvard.edu/fellows/files/chen.pdf>
- Chen, M. (2013). Embracing or resisting the giant neighbour: Debates between KMT and DPP on the mainland policy. *China Report*, 49(4), 399–411. <https://doi.org/10.1177/0009445513506649>

- Chen, V. Z., Kao, M., & Kuo, A. (2023). Taiwan: Inward FDI and its policy context, 2012. *World*, 3(2013), 1066–1081.
file:///Users/alex.neumann/Documents/Mendeley Desktop/Edited by Edited by/World/[Darren_Swanson]_Creating_Adaptive_Policies_A_Gui(BookSee.org).pdf
- Cheung, E. (2023). *A weapons stockpile and asymmetric warfare: how Taiwan could thwart an invasion by China – with America’s help*. CNN World.
<https://edition.cnn.com/2023/04/15/asia/taiwan-china-invasion-defense-us-weapons-intl-hnk-dst/index.html>
- Cheung, G. (2010). *New Approaches to Cross-Strait Integration*.
- Chi, C. (2004). *LEE TENG-HUI ’ S POLITICAL CROSS-STRAITS by TABLE OF CONTENTS*. February.
- Chiang, Y., & Chen, T. H. (2021). What’s in a name? Between “Chinese Taipei” and “Taiwan”: The contested terrain of sport nationalism in Taiwan. *International Review for the Sociology of Sport*, 56(4), 451–470.
<https://doi.org/10.1177/1012690220913231>
- Cook, M. (2005). *Taiwan ’ s Identity Challenge*. 2, 83–92.
- Copper, J. C. (2024). *The Ma Ying-jeou presidency*. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Taiwan/The-Ma-Ying-jeou-presidency>
- Copper, J. F. (2013). Taiwan: nation-state or province? In *Choice Reviews Online* (Vol. 51, Issue 03). Westview Press. <https://doi.org/10.5860/choice.51-1715>
- CPT Taiwan. (2024). *Interactive Data Visualisation of Bilateral Trade between Taiwan and China*. <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA35E>
- Crane, B., Albrecht, C., Duffin, K. M., & Albrecht, C. (2018). China’s special economic zones: An analysis of policy to reduce regional disparities. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), 98–107.
<https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1430612>
- Crossman, A. (2019). *Pros and Cons of Secondary Data Analysis*.
<https://www.thoughtco.com/secondary-data-analysis-3026536>
- Dagdag, E. E. (2003). Chen Shui-Bian and Taiwan-China (Cross-Strait) Relations : An Initial Assessment. *Asian Studies*, 39(1–2), 63–85.
- Dano, D. (2023). DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, MUNGKINKAH REUNIFIKASI CHINA–TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 1–12.
- Department for Business and Trade of United Kingdom. (2024). *Trade and Investment Factsheets*. Department for Business and Trade of United Kingdom.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6672de5b64e554df3bd0db48/taiwan-trade-and-investment-factsheet-2024-06-20.pdf>

- Devlin, K., & Huang, C. (2020). *In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative*. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/>
- Ellis, S. (2023). *Taiwan Firms Pull Back in China as Investments Elsewhere Surge*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/taiwan-firms-pull-back-in-china-as-investments-elsewhere-surge>
- Fell, D. (2012). Government and politics in Taiwan. In *Government and Politics in Taiwan*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203567333>
- Ferenczy, Z. A. (2022). *EU-Taiwan Ties: Towards Resilient Global Value Chains*. China Observers. <https://chinaobservers.eu/eu-taiwan-ties-towards-resilient-global-value-chains/>
- Fujian International Investment Promotion Center. (2023). *Fujian's GDP increased by 3.8% year-on-year in the first half of the year, up 2.1 percentage points compared to the first quarter*. FDI Fujian.
<https://fdi.swt.fujian.gov.cn/en/show-19007.html>
- Garnaut, R., & Song, L. (2012). China: Twenty Years of Economic Reform. In *China: Twenty Years of Economic Reform*.
https://doi.org/10.26530/oapen_459887
- Glaser, B., & Billingsley, B. (2012). *Taiwan's 2012 Presidential Elections and Cross-Strait Relations*. November 2011.
- Government of Taiwan. (2021). *CROSS-STRAIT RELATIONS*.
https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php
- Grasso, J., Corrin, J. P., & Kort, M. (2017). Modernization and revolution in China. *Modernization and Revolution in China*, 1–239.
<https://doi.org/10.2307/2760322>
- Guan, E. (2023). *The Domino Effect: Abolishing the Imperial Examination System and the Downfall of the Qing Dynasty*.
- Günther, H., Alexandra, H., & Gudrun, S. (2022). *Dealing with Taiwan*. September, 3.
- Hashmi, S., & Yang, H. A. (2023). *Taiwan's New Southbound Policy: A Strategic Triumph*. National Interest. <https://nationalinterest.org/feature/taiwan's-new-southbound-policy-strategic-triumph-206896>
- Hassan, M. (2022). *Qualitative Data – Types, Methods and Examples*. Research Method. <https://researchmethod.net/qualitative-data/>
- Ho, M., & Lin, T. (2019). 11. The Power of Sunflower. The Origin and the Impact of Taiwan's Protest against Free Trade with China. In *The Umbrella Movement* (Issue December 2019). <https://doi.org/10.1515/9789048535248-013>

- Hsieh, Y., Chan, E., Lin, P., & Huang, J. (2023). *M&A Report 2023: Taiwan*. IFLR. <https://www.iflr.com/article/2bditz7a1pighy0ey30n4/expert-analysis/mergers-acquisitions-report/m-a-report-2023-taiwan>
- Hsiung, J. C. (2000). Diplomacy against adversity: Foreign relations under Chiang Ching-kuo. *Asian Affairs*, 27(2), 111–123. <https://doi.org/10.1080/00927670009598834>
- Huang, I. (2023). *China vs. Taiwan: The battle for diplomatic allies*. Common Wealth Magazine. <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3407>
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China: Fitful Embrace*. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>
- Huang, N. (2022). *A Taiwan perspective on what is at stake after Nancy Pelosi's visit to Taiwan*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/articles/a-taiwan-perspective-on-what-is-at-stake-after-nancy-pelosis-visit-to-taiwan/>
- Hughes, E. S. (2023). *Japan and Taiwan: A Relationship Filled With Promise, But Not Without Limits*. Global Taiwan. <https://globaltaiwan.org/2023/04/japan-and-taiwan-a-relationship-filled-with-promise-but-not-without-limits/>
- Jacobs, J. B. (2015). Political Changes in Taiwan under Ma Ying-jeou: Partisan Conflict, Policy Choices, External Constraints and Security Challenges, edited by Jean-Pierre Cabestan and Jacques deLisle. Abingdon: Routledge, 2014. xviii + 307 pp. £85.00/US\$145.00 (hardcover). *The China Journal*, 74(July 2015), 196–199. <https://doi.org/10.1086/681738>
- Jacobs, J. B., & Liu, I. H. Ben. (2007). Lee Teng-hui and the idea of “Taiwan.” *China Quarterly*, 190, 375–393. <https://doi.org/10.1017/S0305741007001245>
- James, J. (2003). Bridging the global digital divide. *Bridging the Global Digital Divide*, June, 1–135. <https://doi.org/10.4337/9781843767169>
- Jean, R. J. B., Tan, D., & Sinkovics, R. R. (2011). Ethnic ties, location choice, and firm performance in foreign direct investment: A study of Taiwanese business groups FDI in China. *International Business Review*, 20(6), 627–635. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.02.012>
- Jennings, R. (2008). *Politics aside, Taiwan gives generously in China quake aid*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/idU5TP289530/>
- Kasim, K. (2019). Power Shift in Taiwan and Its Implications on Cross-Strait Relations. *Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations*. <https://doi.org/10.18778/8142-287-1.03>
- Kastner, S. L. (2009). Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond. *Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond*. <https://doi.org/10.1515/9781503627321>

- Kastner, S., & Rector, C. (2008). National unification and mistrust: Bargaining power and the prospects for a PRC/Taiwan agreement. *Security Studies*, 17(1), 39–71. <https://doi.org/10.1080/09636410801894159>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). Power and interdependence (4th ed.). In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (4th Editio, Vol. 44, Issue 8). Longman.
- Ko, J. W. (2004). *Cold War Triumph - Taiwan Democratized in Spite of U . S . Efforts*. 36(1).
- Kuo, C. C. (2021). Covid-19 in taiwan: Economic impacts and lessons learned. *Asian Economic Papers*, 20(2), 99–117. https://doi.org/10.1162/asep_a_00805
- Lee, C. (2017). Taiwan and China in a global value chain: the case of electronic industry. *University of Nottingham*, 01, 1–7.
- Lee, S. (1996). *American Policy Toward Taiwan : The Issue of the De Facto and De Jure Status of Taiwan and Sovereignty*. 2(2).
- Lee, S. (2022). *South Korean Angle on the Taiwan Strait: Familiar Issue, Unfamiliar Option*. Stimson. <https://www.stimson.org/2022/south-korean-angle-on-the-taiwan/>
- Li, X. (2016). *A History of the Modern Chinese Army*. University Press of Kentucky.
- Liang, X. (2024). *Mainland China pins its hopes on Taiwan's former leader Ma Ying-jeou after meeting Xi Jinping during 'journey of peace.'* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/economy/article/3260729/global-impact-mainland-china-pins-its-hopes-taiwans-former-leader-ma-ying-jeou-after-meeting-xi>
- LIAO, C. S. (2020). Evaluation and Comparison of Bank Efficiency in Cross-Strait after ECFA. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 783–793. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.783>
- Lin, G. (2019). *Taiwan 's Party Politics and Cross-Strait Relations in Evolution*.
- Lin, S. S. (2016). *Taiwan's China Dilemma*. Stanford University Press.
- Lin, T. (2021). *Peace in the Taiwan Strait: the Triangular Relationship Among the United States, Taiwan, and China*. May.
- Lu, R. (2011). Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters. In *Regional Studies* (Vol. 45, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.608259>
- Lychagin, A. I., & Komarov, I. (2017). *THE TAIWAN QUESTION: EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS*. 17(2), 290–300. <https://doi.org/10.22363/2313>
- MacArthur, F. (1972). *Joint Communiqué between the United States and China*.

- February 27, 1972. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/joint-communicate-between-united-states-and-china>
- Mainland Affairs Council. (2018). *Preliminary Statistics of Cross-Strait Economic Relations*.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=07E6EAF4852D1FD1&sms=66E8484ACCBF8A86&s=825F366A31FC8425
- Mainland Affairs Council. (2019). *A Year After Mainland China Announced the 31 Taiwan-Related Measures, the Implementation Results are Overstated and the so-called “Favor Taiwan and Encourage Integration” intends to “Benefit China and Promote Unification.”* Mainland Affairs Council.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&s=420004972769A4DB
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2014). *Cross-Strait Trade in Service Agreement*. MAC.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=69EE7CEA8C7550BB&sms=D6D0A9E658098CA2&s=2129B397A168C5CA
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2022). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on “Public Views on Current Cross-Strait Relations.”* 2, 63–66. <http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/44239533553.pdf>
- Maizland, L. (2023). *Why China-Taiwan Relations Are So Tense*. CFR.
<https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- Matsuda, Y. (2015). Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to Political Dependence? *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 4(2), 3–35.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2015.11869083>
- McSweeney, B., & Happonen, E. (2012). Pre-Deal deal Management. In *The Handbook of Mergers and Acquisitions* (pp. 171–194).
- Mikron Holding AG. (2018). *Annual Report 2018*.
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2008). *Value By Country: Trade between Taiwan and Mainland China in 2008*.
<https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=220&ym=9700&yml=9700&kind=21&type=1&funid=e9111&cycle=4&outmode=0&compmode=00&ratenm=Annual growth rate&outkind=1&fld0=1&cod02=1&codlst1=111&rdm=R161528>
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2021). *Statistic of External Trade*.
- Miranville, A. (2021). Annual report 2020. *AIMS Mathematics*, 6(12), 14064–14068. <https://doi.org/10.3934/math.2021814>

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosakarya.
- Munro, A. (2024). *Taiwan Strait Crises*. Britannica.
<https://www.britannica.com/event/Taiwan-Strait-crises>
- Muyard, F. (2012). Taiwanese national identity, cross-strait economic interaction, and the integration paradigm. In *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*.
<https://doi.org/10.1057/9781137011053>
- Nakhatakyan, E. O. (2021). Political economy of cross-strait relations. *Vestnik RUDN. International Relations*, 21(1), 136–147.
<https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-1-136-147>
- Nouwens, M. (2023). *China and its Military Ambitions – More than*. 96–107.
- Office of the President Republic of China (Taiwan). (2009). *President Ma Meets Negotiation Delegation from Taiwan's Straits Exchange Foundation*.
<https://english.president.gov.tw/NEWS/3134>
- Office of the States. (2020). *The Taiwan Straits Crises: 1954–55 and 1958*.
<https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises>
- Okenna, N. P. (2020). The Importance of International Trade to the Economies of Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*, 9.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3664322>
- Panter, J. G., & Luo, S. (2021). China's Maritime Militia and Fishing Fleets. *Military Review*, 1(January-February), 8–17.
<https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/>
- Polachek, S. W. (1980). Conflict and Trade. *Journal of Conflict Resolution*, 24(1), 55–78. <https://doi.org/10.1177/002200278002400103>
- Qiang, X. (2020). Selective Engagement: Mainland China's Dual-Track Taiwan Policy. *Journal of Contemporary China*, 29(124), 535–552.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1677363>
- Rana W. (2015). Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. In *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 6, Issue 2).
https://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_2_February_2015/33.pdf
- Ranjan, R. (2016). *Taiwan's Election 2016 and Cross -Strait Policy*.
- Reitz, J. M. (2014). *Online Dictionary for Library and Information Science*.
https://odlis.abc-clio.com/odlis_1.html
- Rios, D. N. (2010). Conflicts and Survival in the “Voluntary Repatriation” of Chinese POWs in the Korean War A. In *UC San Diego Electronic Theses and Dissertations*.
- Romualdi, K. B., & Rochmat, S. (2023). Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor. *Review of International*

- Relations*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i1.35279>
- Rubinstein, M. A. (2007). *Taiwan: A New History*. M.E. Sharpe.
- Rubinstein, M. A. (2015). *Taiwan: A New History*.
- Sarotte, M. E. (2014). Princeton Studies in International History and Politics (1989). In *Princeton Studies in International History and Politics (1989)*. <https://doi.org/10.1515/9781400852307>
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Andi.
- Scobell, A. (2014). China and Taiwan: Balance of rivalry with weapons of mass democratization. *Political Science Quarterly*, 129(3), 449–468. <https://doi.org/10.1002/polq.12216>
- Scott, D. (2019). Taiwan's Pivot to the Indo-Pacific. *Asia-Pacific Review*, 26(1), 29–57. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618602>
- Shacheng, W. (2023). *Cross-Straits bonds boon for Taiwan*. China Daily. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202302/07/WS63e187c3a31057c47ebad3b8.html>
- Shih-chung, L. (2020). *Taiwan faces changed economic outlook in Asia following COVID-19*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/29/taiwan-faces-a-changed-economic-outlook-in-asia-following-covid-19/>
- Shiquan, X. (2000). The one-china principle: The positions of the communist party of China (CCP), the Kuomintang (KMT), and the Democratic Progressive Party (DPP). *American Foreign Policy Interests*, 22(6), 22–31. <https://doi.org/10.1080/10803920.2000.10392071>
- Song, L., & Zhou, Y. (2023). *China is invaluable to global value chains*. East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2023/07/24/china-is-invaluable-to-global-value-chains/>
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Sullivan, J., & Lowe, W. (2010). Chen Shui-bian: On independence. *China Quarterly*, 203, 619–638. <https://doi.org/10.1017/S0305741010000627>
- Taiwan Today. (1955). *The Sino-American Treaty of Mutual Defense/The Mirage of Two Chinas*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=7745>
- Taiwan Today. (1988). *Bombardment Of Quemoy*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=4657>
- The Economist. (2019). *China tries to deepen economic ties with Taiwan yet more*. <https://www.economist.com/asia/2019/11/07/china-tries-to-deepen-economic-ties-with-taiwan-yet-more>

- The Observatory of Economic Complexity. (2023). *China-Chinese Taipei Trade*.
<https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/twn>
- The People's Government of Fujian Province. (2024). *Highlights of Fujian Provincial Government Work Report 2024*.
https://www.fujian.gov.cn/english/news/202403/t20240305_6409168.htm
- The World Bank. (2014). Chinese Special Economic Zones. *China Development Bank*, 2.
[http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing in Africa Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf)
- Tim Penyusun. (2021). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Times of India. (2023). *Taiwanese firms exiting China amidst rising tension*. Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/taiwanese-firms-exiting-china-amid-rising-tensions/articleshow/99705323.cms?from=mdr>
- Trojnar, E. (2016). *TAIWAN ' S ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF CROSS-STRAIT INTERDEPENDENCE*. 139–149.
- Tsai, T. C., & Liu, T. T. T. (2017). Cross-Strait relations and regional integration: A review of the Ma Ying-Jeou era (2008–2016). *Journal of Current Chinese Affairs*, 46(1), 11–35. <https://doi.org/10.1177/186810261704600102>
- Tubilewicz, C. (2005). Taiwan and the Soviet Union during the Cold War: Enemies or ambiguous friends. *Cold War History*, 5(1), 75–86.
<https://doi.org/10.1080/1468274042000339179>
- UNCTAD. (2002). *World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness*.
- UNCTAD. (2017). *Investment and the digital economy*.
<https://doi.org/10.18356/0e077c50-en>
- US-Congress. (1979). *Taiwan Relations Act: Public Law 96-8*. 5, 8.
<https://uscode.house.gov/statutes/pl/96/8.pdf>
- Vest, C., Kratz, A., & Goujon, R. (2022). *The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict*. Rhodium Group. <https://rhg.com/research/taiwan-economic-disruptions/>
- VOA. (2020). *China Is Buying Up Computer Chips Made in Taiwan Title*.
<https://learningenglish.voanews.com/a/china-is-buying-up-computer-chips-made-in-taiwan/5670744.html>
- Walker, T. C. (2013). A circumspect revival of liberalism: Robert O. Keohane and Joseph S. Nye's Power and Interdependence. *Classics of International Relations: Essays in Criticism and Appreciation*, 148–156.
<https://doi.org/10.4324/9780203761472-20>

- Wan, Y. K. P., & Bramwell, B. (2015). Political economy and the emergence of a hybrid mode of governance of tourism planning. *Tourism Management*, 50, 316–327. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.010>
- Wang, V. W. (2002). The Chen Shui-Bian Administration's Mainland Policy: Toward a Modus Vivendi or Continued Stalemate? *American Asian Review*, 20(3), 91–124.
- Wei, C. H. (2016). China-Taiwan relations and the 1992 consensus, 2000-2008. *International Relations of the Asia-Pacific*, 16(1), 67–95. <https://doi.org/10.1093/irap/lcv009>
- Weihua, C. (2013). *Cross-Straits interaction Title*. China Daily. https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2013-06/14/content_16618587.htm
- Westad, O. A. (2003). *Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950*. Stanford University Press.
- Williams, L. (2022). *Why Taiwan matters to China (and the rest of the world)*. <https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/taiwan-matters-china-semiconductors-russia/>
- Wong, P. Y., & Tang, T. C. (2020). Should I Stay or Should I Go? Taiwan's Foreign Direct Investment (FDI) Inflows and Outflows. *Contemporary CHinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, 6(May 2020), 263=291.
- World Bank. (2019). *World Development Indicators*. <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>
- Xin, Q. (2021). Having much in common? Changes and continuity in Beijing's Taiwan policy. *Pacific Review*, 34(6), 926–945. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1773908>
- Yang, A. N. (1996). *The 1996 Missile Exercises : China ' s political manipulation and Taiwan ' s crisis management*. March.
- Yongnoan, Z. (2023). *How Chinese civilization contributes to modernity*. Global Times China. <https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292846.shtml>
- Yu, G. T. (1991). The 1911 Revolution: Past, Present, and Future. *Asian Survey*, 31(10), 895–904. <https://doi.org/10.2307/2645062>
- Yuan, X. (2010). How The CPC Taiwan Working Committee Came To Be Destroyed. In *ACS Nano* (Vol. 4, Issue 4, pp. 1921–1926). <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%7B%25%7D0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A20>
- Zaroni, N. A. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara Berkembang. *Al-Tijary*, 1(1), 1–22.
- Zhang, L. (2012). *Cross-strait Economic Interdependence and the Prospects for*

Peace between Mainland China and Taiwan.

- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., L., W., Angelinawati, Meliana, I., Alfiani, E., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikham, F., Andirani, A. D., Rahayu, S. I., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In *Nucl. Phys.* (Vol. 23, Issue 1).
- Albert, E. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 1–6. <http://www.cfr.org/china/china?taiwan?relations/p9223>
- Alperovitc, D. (2024). *A CHINESE ECONOMIC BLOCKADE OF TAIWAN WOULD FAIL OR LAUNCH A WAR*. <https://warontherocks.com/2024/06/a-chinese-economic-blockade-of-taiwan-would-fail-or-launch-a-war/>
- Antara News. (2023). *Perbatasan China-Taiwan dibuka setelah tiga tahun tutup*. <https://www.antaraneews.com/berita/3340266/perbatasan-china-taiwan-dibuka-setelah-tiga-tahun-tutup>
- Aryodiguno, H., & Cornelia, T. (2022). Mainland China Student Study in Taiwan: Motivation, Impression, Potential Political Reform Agent. *AEGIS : Journal of International Relations*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.33021/aegis.v6i1.3530>
- Asia Pacific Foundation of Canada. (2022). *China's Import Bans on Taiwan Show Economic Coercion is Here to Stay*. Asia Pacific Foundation of Canada. <https://www.asiapacific.ca/publication/chinas-import-bans-taiwan-show-economic-coercion-here-stay>
- Asia Report N°333. (2023). Preventing war in the Taiwan Strait: Restraining Taiwan--and Beijing. In *International Crisis Group*. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=30386056&Fmt=7&clientId=55007&RQT=309&VName=PQD>
- Baalam, D. N., Veseth, M., & Grbic, M. (2012). Introduction to international political economy. *Economic Horizons*, 14(May-August 2012), 137–139.
- Baldwin, D. A. (1980). Interdependence and power: A conceptual analysis. In *International Organization* (Vol. 34, Issue 4). <https://doi.org/10.1017/S0020818300018828>
- Bartmann, B. (2007). Between De Jure and De Facto Statehood: Revisiting the Status Issue for Taiwan. *Island Studies Journal*, 2(1), 27–46.
- BBC. (2021). *China-Taiwan tensions: Xi Jinping says "reunification" must be fulfilled*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081>
- BBC News. (2019). *Taiwan Profile*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>
- BBC News. (2024). *China and Taiwan: A really simple guide*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139>
- BBC News Indonesia. (2024). *Ada apa di balik ketegangan China-Taiwan yang memanas?* BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gg3z79j3no>

- Bogdan, B., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to theory and methods. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods* : : Allyn and Bacon., 106–156.
- Brands, H. (2023). *How Would China Take Over Taiwan? One of These 5 Strategies*. Bloomberg. <https://www.aei.org/op-eds/how-would-china-take-over-taiwan-one-of-these-5-strategies/>
- Britannica. (2024). *Ye Jianying*. Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Ye-Jianying>
- Bukhari, S. S. H. (2016). The Dynamics of China-Taiwan Politico-Economic Interdependence: Divergence to Raproachment. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 36(1), 25–37.
- Cathcart, A., & Nash, P. (2008). War Criminals and the Road to Sino-Japanese Normalization: Zhou Enlai and the Shenyang Trials, 1954-1956. *Twentieth-Century China*, 34(2), 89–111. <https://doi.org/10.1353/tcc.0.0014>
- Central Bank. (2019). *Annual Report 2019*.
- Chang, K. I., & Hayakawa, K. (2014). Details in the China-Taiwan free trade agreement. *Journal of Economic Integration*, 29(4), 676–699. <https://doi.org/10.11130/jei.2014.29.4.676>
- Chao, C. M. (1990). China's policy towards taiwan. *Pacific Review*, 3(2), 125–137. <https://doi.org/10.1080/09512749008718855>
- Chao, C. M. (2004). National security vs. economic interests: Reassessing Taiwan's mainland policy under Chen Shui-bian. *Journal of Contemporary China*, 13(41), 687–704. <https://doi.org/10.1080/1067056042000281431>
- Chen, C. (2009). China and Taiwan: A Future of Peace? A Study of Economic conomic Interdependence, dependence, Taiwanese Domestic Politics and Cross-Strait Relations. *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies*, 1(Summer 2009), 14–25.
- Chen, C. (2023). *Prospects for Taiwan ' s Outward Investment in China*. 116578.
- Chen, C. (Frank), & Lai, Y. (Jane). (2015). Modeling and Optimizing Intermodal Logistics Route across the Taiwan Straits. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 11, 666–677. https://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/11/0/11_666/_pdf
- Chen, E. N. H. (2003). *The Economic Integration on Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations*. July, 46. <https://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf%0Ahttp://program.s.wcfia.harvard.edu/fellows/files/chen.pdf>
- Chen, M. (2013). Embracing or resisting the giant neighbour: Debates between KMT and DPP on the mainland policy. *China Report*, 49(4), 399–411. <https://doi.org/10.1177/0009445513506649>

- Chen, V. Z., Kao, M., & Kuo, A. (2023). Taiwan: Inward FDI and its policy context, 2012. *World*, 3(2013), 1066–1081.
file:///Users/alex.neumann/Documents/Mendeley Desktop/Edited by Edited by/World/[Darren_Swanson]_Creating_Adaptive_Policies_A_Gui(BookSee.org).pdf
- Cheung, E. (2023). *A weapons stockpile and asymmetric warfare: how Taiwan could thwart an invasion by China – with America’s help*. CNN World.
<https://edition.cnn.com/2023/04/15/asia/taiwan-china-invasion-defense-us-weapons-intl-hnk-dst/index.html>
- Cheung, G. (2010). *New Approaches to Cross-Strait Integration*.
- Chi, C. (2004). *LEE TENG-HUI ’ S POLITICAL CROSS-STRAITS by TABLE OF CONTENTS*. February.
- Chiang, Y., & Chen, T. H. (2021). What’s in a name? Between “Chinese Taipei” and “Taiwan”: The contested terrain of sport nationalism in Taiwan. *International Review for the Sociology of Sport*, 56(4), 451–470.
<https://doi.org/10.1177/1012690220913231>
- Cook, M. (2005). *Taiwan ’ s Identity Challenge*. 2, 83–92.
- Copper, J. C. (2024). *The Ma Ying-jeou presidency*. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Taiwan/The-Ma-Ying-jeou-presidency>
- Copper, J. F. (2013). Taiwan: nation-state or province? In *Choice Reviews Online* (Vol. 51, Issue 03). Westview Press. <https://doi.org/10.5860/choice.51-1715>
- CPT Taiwan. (2024). *Interactive Data Visualisation of Bilateral Trade between Taiwan and China*. <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA35E>
- Crane, B., Albrecht, C., Duffin, K. M., & Albrecht, C. (2018). China’s special economic zones: An analysis of policy to reduce regional disparities. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), 98–107.
<https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1430612>
- Crossman, A. (2019). *Pros and Cons of Secondary Data Analysis*.
<https://www.thoughtco.com/secondary-data-analysis-3026536>
- Dagdag, E. E. (2003). Chen Shui-Bian and Taiwan-China (Cross-Strait) Relations : An Initial Assessment. *Asian Studies*, 39(1–2), 63–85.
- Dano, D. (2023). DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, MUNGKINKAH REUNIFIKASI CHINA–TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 1–12.
- Department for Business and Trade of United Kingdom. (2024). *Trade and Investment Factsheets*. Department for Business and Trade of United Kingdom.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6672de5b64e554df3bd0db48/taiwan-trade-and-investment-factsheet-2024-06-20.pdf>

- Devlin, K., & Huang, C. (2020). *In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative*. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/>
- Ellis, S. (2023). *Taiwan Firms Pull Back in China as Investments Elsewhere Surge*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/taiwan-firms-pull-back-in-china-as-investments-elsewhere-surge>
- Fell, D. (2012). Government and politics in Taiwan. In *Government and Politics in Taiwan*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203567333>
- Ferenczy, Z. A. (2022). *EU-Taiwan Ties: Towards Resilient Global Value Chains*. China Observers. <https://chinaobservers.eu/eu-taiwan-ties-towards-resilient-global-value-chains/>
- Fujian International Investment Promotion Center. (2023). *Fujian's GDP increased by 3.8% year-on-year in the first half of the year, up 2.1 percentage points compared to the first quarter*. FDI Fujian.
<https://fdi.swt.fujian.gov.cn/en/show-19007.html>
- Garnaut, R., & Song, L. (2012). China: Twenty Years of Economic Reform. In *China: Twenty Years of Economic Reform*.
https://doi.org/10.26530/oapen_459887
- Glaser, B., & Billingsley, B. (2012). *Taiwan's 2012 Presidential Elections and Cross-Strait Relations*. November 2011.
- Government of Taiwan. (2021). *CROSS-STRAIT RELATIONS*.
https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php
- Grasso, J., Corrin, J. P., & Kort, M. (2017). Modernization and revolution in China. *Modernization and Revolution in China*, 1–239.
<https://doi.org/10.2307/2760322>
- Guan, E. (2023). *The Domino Effect: Abolishing the Imperial Examination System and the Downfall of the Qing Dynasty*.
- Günther, H., Alexandra, H., & Gudrun, S. (2022). *Dealing with Taiwan*. September, 3.
- Hashmi, S., & Yang, H. A. (2023). *Taiwan's New Southbound Policy: A Strategic Triumph*. National Interest. <https://nationalinterest.org/feature/taiwan's-new-southbound-policy-strategic-triumph-206896>
- Hassan, M. (2022). *Qualitative Data – Types, Methods and Examples*. Research Method. <https://researchmethod.net/qualitative-data/>
- Ho, M., & Lin, T. (2019). 11. The Power of Sunflower. The Origin and the Impact of Taiwan's Protest against Free Trade with China. In *The Umbrella Movement* (Issue December 2019). <https://doi.org/10.1515/9789048535248-013>

- Hsieh, Y., Chan, E., Lin, P., & Huang, J. (2023). *M&A Report 2023: Taiwan*. IFLR. <https://www.iflr.com/article/2bditz7a1pighy0ey30n4/expert-analysis/mergers-acquisitions-report/m-a-report-2023-taiwan>
- Hsiung, J. C. (2000). Diplomacy against adversity: Foreign relations under Chiang Ching-kuo. *Asian Affairs*, 27(2), 111–123. <https://doi.org/10.1080/00927670009598834>
- Huang, I. (2023). *China vs. Taiwan: The battle for diplomatic allies*. Common Wealth Magazine. <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3407>
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China: Fitful Embrace*. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>
- Huang, N. (2022). *A Taiwan perspective on what is at stake after Nancy Pelosi's visit to Taiwan*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/articles/a-taiwan-perspective-on-what-is-at-stake-after-nancy-pelosis-visit-to-taiwan/>
- Hughes, E. S. (2023). *Japan and Taiwan: A Relationship Filled With Promise, But Not Without Limits*. Global Taiwan. <https://globaltaiwan.org/2023/04/japan-and-taiwan-a-relationship-filled-with-promise-but-not-without-limits/>
- Jacobs, J. B. (2015). Political Changes in Taiwan under Ma Ying-jeou: Partisan Conflict, Policy Choices, External Constraints and Security Challenges, edited by Jean-Pierre Cabestan and Jacques deLisle. Abingdon: Routledge, 2014. xviii + 307 pp. £85.00/US\$145.00 (hardcover). *The China Journal*, 74(July 2015), 196–199. <https://doi.org/10.1086/681738>
- Jacobs, J. B., & Liu, I. H. Ben. (2007). Lee Teng-hui and the idea of “Taiwan.” *China Quarterly*, 190, 375–393. <https://doi.org/10.1017/S0305741007001245>
- James, J. (2003). Bridging the global digital divide. *Bridging the Global Digital Divide*, June, 1–135. <https://doi.org/10.4337/9781843767169>
- Jean, R. J. B., Tan, D., & Sinkovics, R. R. (2011). Ethnic ties, location choice, and firm performance in foreign direct investment: A study of Taiwanese business groups FDI in China. *International Business Review*, 20(6), 627–635. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.02.012>
- Jennings, R. (2008). *Politics aside, Taiwan gives generously in China quake aid*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/idUSTP289530/>
- Kasim, K. (2019). Power Shift in Taiwan and Its Implications on Cross-Strait Relations. *Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations*. <https://doi.org/10.18778/8142-287-1.03>
- Kastner, S. L. (2009). Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond. *Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond*. <https://doi.org/10.1515/9781503627321>

- Kastner, S., & Rector, C. (2008). National unification and mistrust: Bargaining power and the prospects for a PRC/Taiwan agreement. *Security Studies*, 17(1), 39–71. <https://doi.org/10.1080/09636410801894159>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). Power and interdependence (4th ed.). In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (4th Editio, Vol. 44, Issue 8). Longman.
- Ko, J. W. (2004). *Cold War Triumph - Taiwan Democratized in Spite of U . S . Efforts*. 36(1).
- Kuo, C. C. (2021). Covid-19 in taiwan: Economic impacts and lessons learned. *Asian Economic Papers*, 20(2), 99–117. https://doi.org/10.1162/asep_a_00805
- Lee, C. (2017). Taiwan and China in a global value chain: the case of electronic industry. *University of Nottingham*, 01, 1–7.
- Lee, S. (1996). *American Policy Toward Taiwan : The Issue of the De Facto and De Jure Status of Taiwan and Sovereignty*. 2(2).
- Lee, S. (2022). *South Korean Angle on the Taiwan Strait: Familiar Issue, Unfamiliar Option*. Stimson. <https://www.stimson.org/2022/south-korean-angle-on-the-taiwan/>
- Li, X. (2016). *A History of the Modern Chinese Army*. University Press of Kentucky.
- Liang, X. (2024). *Mainland China pins its hopes on Taiwan's former leader Ma Ying-jeou after meeting Xi Jinping during 'journey of peace.'* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/economy/article/3260729/global-impact-mainland-china-pins-its-hopes-taiwans-former-leader-ma-ying-jeou-after-meeting-xi>
- LIAO, C. S. (2020). Evaluation and Comparison of Bank Efficiency in Cross-Strait after ECFA. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 783–793. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.783>
- Lin, G. (2019). *Taiwan 's Party Politics and Cross-Strait Relations in Evolution*.
- Lin, S. S. (2016). *Taiwan's China Dilemma*. Stanford University Press.
- Lin, T. (2021). *Peace in the Taiwan Strait: the Triangular Relationship Among the United States, Taiwan, and China*. May.
- Lu, R. (2011). Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters. In *Regional Studies* (Vol. 45, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.608259>
- Lychagin, A. I., & Komarov, I. (2017). *THE TAIWAN QUESTION: EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS*. 17(2), 290–300. <https://doi.org/10.22363/2313>
- MacArthur, F. (1972). *Joint Communiqué between the United States and China*.

- February 27, 1972. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/joint-communicate-between-united-states-and-china>
- Mainland Affairs Council. (2018). *Preliminary Statistics of Cross-Strait Economic Relations*.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=07E6EAF4852D1FD1&sms=66E8484ACCBF8A86&s=825F366A31FC8425
- Mainland Affairs Council. (2019). *A Year After Mainland China Announced the 31 Taiwan-Related Measures, the Implementation Results are Overstated and the so-called “Favor Taiwan and Encourage Integration” intends to “Benefit China and Promote Unification.”* Mainland Affairs Council.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&s=420004972769A4DB
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2014). *Cross-Strait Trade in Service Agreement*. MAC.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=69EE7CEA8C7550BB&sms=D6D0A9E658098CA2&s=2129B397A168C5CA
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2022). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on “Public Views on Current Cross-Strait Relations.”* 2, 63–66. <http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/44239533553.pdf>
- Maizland, L. (2023). *Why China-Taiwan Relations Are So Tense*. CFR.
<https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- Matsuda, Y. (2015). Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to Political Dependence? *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 4(2), 3–35.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2015.11869083>
- McSweeney, B., & Happonen, E. (2012). Pre-Deal deal Management. In *The Handbook of Mergers and Acquisitions* (pp. 171–194).
- Mikron Holding AG. (2018). *Annual Report 2018*.
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2008). *Value By Country: Trade between Taiwan and Mainland China in 2008*.
<https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=220&ym=9700&yml=9700&kind=21&type=1&funid=e9111&cycle=4&outmode=0&compmode=00&ratenm=Annual growth rate&outkind=1&fld0=1&cod02=1&codlst1=111&rdm=R161528>
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2021). *Statistic of External Trade*.
- Miranville, A. (2021). Annual report 2020. *AIMS Mathematics*, 6(12), 14064–14068. <https://doi.org/10.3934/math.2021814>

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosakarya.
- Munro, A. (2024). *Taiwan Strait Crises*. Britannica.
<https://www.britannica.com/event/Taiwan-Strait-crises>
- Muyard, F. (2012). Taiwanese national identity, cross-strait economic interaction, and the integration paradigm. In *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*.
<https://doi.org/10.1057/9781137011053>
- Nakhatakyan, E. O. (2021). Political economy of cross-strait relations. *Vestnik RUDN. International Relations*, 21(1), 136–147.
<https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-1-136-147>
- Nouwens, M. (2023). *China and its Military Ambitions – More than*. 96–107.
- Office of the President Republic of China (Taiwan). (2009). *President Ma Meets Negotiation Delegation from Taiwan's Straits Exchange Foundation*.
<https://english.president.gov.tw/NEWS/3134>
- Office of the States. (2020). *The Taiwan Straits Crises: 1954–55 and 1958*.
<https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises>
- Okenna, N. P. (2020). The Importance of International Trade to the Economies of Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*, 9.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3664322>
- Panter, J. G., & Luo, S. (2021). China's Maritime Militia and Fishing Fleets. *Military Review*, 1(January-February), 8–17.
<https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/>
- Polachek, S. W. (1980). Conflict and Trade. *Journal of Conflict Resolution*, 24(1), 55–78. <https://doi.org/10.1177/002200278002400103>
- Qiang, X. (2020). Selective Engagement: Mainland China's Dual-Track Taiwan Policy. *Journal of Contemporary China*, 29(124), 535–552.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1677363>
- Rana W. (2015). Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. In *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 6, Issue 2).
https://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_2_February_2015/33.pdf
- Ranjan, R. (2016). *Taiwan's Election 2016 and Cross -Strait Policy*.
- Reitz, J. M. (2014). *Online Dictionary for Library and Information Science*.
https://odlis.abc-clio.com/odlis_1.html
- Rios, D. N. (2010). Conflicts and Survival in the “Voluntary Repatriation” of Chinese POWs in the Korean War A. In *UC San Diego Electronic Theses and Dissertations*.
- Romualdi, K. B., & Rochmat, S. (2023). Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor. *Review of International*

- Relations*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i1.35279>
- Rubinstein, M. A. (2007). *Taiwan: A New History*. M.E. Sharpe.
- Rubinstein, M. A. (2015). *Taiwan: A New History*.
- Sarotte, M. E. (2014). Princeton Studies in International History and Politics (1989). In *Princeton Studies in International History and Politics (1989)*. <https://doi.org/10.1515/9781400852307>
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Andi.
- Scobell, A. (2014). China and Taiwan: Balance of rivalry with weapons of mass democratization. *Political Science Quarterly*, 129(3), 449–468. <https://doi.org/10.1002/polq.12216>
- Scott, D. (2019). Taiwan's Pivot to the Indo-Pacific. *Asia-Pacific Review*, 26(1), 29–57. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618602>
- Shacheng, W. (2023). *Cross-Straits bonds boon for Taiwan*. China Daily. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202302/07/WS63e187c3a31057c47ebad3b8.html>
- Shih-chung, L. (2020). *Taiwan faces changed economic outlook in Asia following COVID-19*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/29/taiwan-faces-a-changed-economic-outlook-in-asia-following-covid-19/>
- Shiquan, X. (2000). The one-china principle: The positions of the communist party of China (CCP), the Kuomintang (KMT), and the Democratic Progressive Party (DPP). *American Foreign Policy Interests*, 22(6), 22–31. <https://doi.org/10.1080/10803920.2000.10392071>
- Song, L., & Zhou, Y. (2023). *China is invaluable to global value chains*. East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2023/07/24/china-is-invaluable-to-global-value-chains/>
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Sullivan, J., & Lowe, W. (2010). Chen Shui-bian: On independence. *China Quarterly*, 203, 619–638. <https://doi.org/10.1017/S0305741010000627>
- Taiwan Today. (1955). *The Sino-American Treaty of Mutual Defense/The Mirage of Two Chinas*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=7745>
- Taiwan Today. (1988). *Bombardment Of Quemoy*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=4657>
- The Economist. (2019). *China tries to deepen economic ties with Taiwan yet more*. <https://www.economist.com/asia/2019/11/07/china-tries-to-deepen-economic-ties-with-taiwan-yet-more>

- The Observatory of Economic Complexity. (2023). *China-Chinese Taipei Trade*.
<https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/twn>
- The People's Government of Fujian Province. (2024). *Highlights of Fujian Provincial Government Work Report 2024*.
https://www.fujian.gov.cn/english/news/202403/t20240305_6409168.htm
- The World Bank. (2014). Chinese Special Economic Zones. *China Development Bank*, 2.
[http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing in Africa Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf)
- Tim Penyusun. (2021). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Times of India. (2023). *Taiwanese firms exiting China amidst rising tension*. Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/taiwanese-firms-exiting-china-amid-rising-tensions/articleshow/99705323.cms?from=mdr>
- Trojnar, E. (2016). *TAIWAN ' S ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF CROSS-STRAIT INTERDEPENDENCE*. 139–149.
- Tsai, T. C., & Liu, T. T. T. (2017). Cross-Strait relations and regional integration: A review of the Ma Ying-Jeou era (2008–2016). *Journal of Current Chinese Affairs*, 46(1), 11–35. <https://doi.org/10.1177/186810261704600102>
- Tubilewicz, C. (2005). Taiwan and the Soviet Union during the Cold War: Enemies or ambiguous friends. *Cold War History*, 5(1), 75–86.
<https://doi.org/10.1080/1468274042000339179>
- UNCTAD. (2002). *World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness*.
- UNCTAD. (2017). *Investment and the digital economy*.
<https://doi.org/10.18356/0e077c50-en>
- US-Congress. (1979). *Taiwan Relations Act: Public Law 96-8*. 5, 8.
<https://uscode.house.gov/statutes/pl/96/8.pdf>
- Vest, C., Kratz, A., & Goujon, R. (2022). *The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict*. Rhodium Group. <https://rhg.com/research/taiwan-economic-disruptions/>
- VOA. (2020). *China Is Buying Up Computer Chips Made in Taiwan Title*.
<https://learningenglish.voanews.com/a/china-is-buying-up-computer-chips-made-in-taiwan/5670744.html>
- Walker, T. C. (2013). A circumspect revival of liberalism: Robert O. Keohane and Joseph S. Nye's Power and Interdependence. *Classics of International Relations: Essays in Criticism and Appreciation*, 148–156.
<https://doi.org/10.4324/9780203761472-20>

- Wan, Y. K. P., & Bramwell, B. (2015). Political economy and the emergence of a hybrid mode of governance of tourism planning. *Tourism Management*, 50, 316–327. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.010>
- Wang, V. W. (2002). The Chen Shui-Bian Administration's Mainland Policy: Toward a Modus Vivendi or Continued Stalemate? *American Asian Review*, 20(3), 91–124.
- Wei, C. H. (2016). China-Taiwan relations and the 1992 consensus, 2000-2008. *International Relations of the Asia-Pacific*, 16(1), 67–95. <https://doi.org/10.1093/irap/lcv009>
- Weihua, C. (2013). *Cross-Straits interaction Title*. China Daily. https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2013-06/14/content_16618587.htm
- Westad, O. A. (2003). *Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950*. Stanford University Press.
- Williams, L. (2022). *Why Taiwan matters to China (and the rest of the world)*. <https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/taiwan-matters-china-semiconductors-russia/>
- Wong, P. Y., & Tang, T. C. (2020). Should I Stay or Should I Go? Taiwan's Foreign Direct Investment (FDI) Inflows and Outflows. *Contemporary CHinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, 6(May 2020), 263=291.
- World Bank. (2019). *World Development Indicators*. <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>
- Xin, Q. (2021). Having much in common? Changes and continuity in Beijing's Taiwan policy. *Pacific Review*, 34(6), 926–945. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1773908>
- Yang, A. N. (1996). *The 1996 Missile Exercises : China ' s political manipulation and Taiwan ' s crisis management*. March.
- Yongnoan, Z. (2023). *How Chinese civilization contributes to modernity*. Global Times China. <https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292846.shtml>
- Yu, G. T. (1991). The 1911 Revolution: Past, Present, and Future. *Asian Survey*, 31(10), 895–904. <https://doi.org/10.2307/2645062>
- Yuan, X. (2010). How The CPC Taiwan Working Committee Came To Be Destroyed. In *ACS Nano* (Vol. 4, Issue 4, pp. 1921–1926). <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%7B%25%7D0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A20>
- Zaroni, N. A. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara Berkembang. *Al-Tijary*, 1(1), 1–22.
- Zhang, L. (2012). *Cross-strait Economic Interdependence and the Prospects for*

Peace between Mainland China and Taiwan.

- Agustianti, R., Pandriadi, Nussifera, L., L., W., Angelinawati, Meliana, I., Alfiani, E., Nurlaila, Q., Simarmata, N., Himawan, I. S., Pawan, E., Ikhran, F., Andirani, A. D., Rahayu, S. I., Ratnadewi, & Hardika, I. R. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif. In *Nucl. Phys.* (Vol. 23, Issue 1).
- Albert, E. (2016). China-Taiwan Relations. *Council on Foreign Relations*, 1–6. <http://www.cfr.org/china/china?taiwan?relations/p9223>
- Alperovitc, D. (2024). *A CHINESE ECONOMIC BLOCKADE OF TAIWAN WOULD FAIL OR LAUNCH A WAR*. <https://warontherocks.com/2024/06/a-chinese-economic-blockade-of-taiwan-would-fail-or-launch-a-war/>
- Antara News. (2023). *Perbatasan China-Taiwan dibuka setelah tiga tahun tutup*. <https://www.antaraneews.com/berita/3340266/perbatasan-china-taiwan-dibuka-setelah-tiga-tahun-tutup>
- Aryodiguno, H., & Cornelia, T. (2022). Mainland China Student Study in Taiwan: Motivation, Impression, Potential Political Reform Agent. *AEGIS : Journal of International Relations*, 6(1), 12–29. <https://doi.org/10.33021/aegis.v6i1.3530>
- Asia Pacific Foundation of Canada. (2022). *China's Import Bans on Taiwan Show Economic Coercion is Here to Stay*. Asia Pacific Foundation of Canada. <https://www.asiapacific.ca/publication/chinas-import-bans-taiwan-show-economic-coercion-here-stay>
- Asia Report N°333. (2023). Preventing war in the Taiwan Strait: Restraining Taiwan--and Beijing. In *International Crisis Group*. <http://proquest.umi.com/pqdweb?did=30386056&Fmt=7&clientId=55007&RQT=309&VName=PQD>
- Baalam, D. N., Veseth, M., & Grbic, M. (2012). Introduction to international political economy. *Economic Horizons*, 14(May-August 2012), 137–139.
- Baldwin, D. A. (1980). Interdependence and power: A conceptual analysis. In *International Organization* (Vol. 34, Issue 4). <https://doi.org/10.1017/S0020818300018828>
- Bartmann, B. (2007). Between De Jure and De Facto Statehood: Revisiting the Status Issue for Taiwan. *Island Studies Journal*, 2(1), 27–46.
- BBC. (2021). *China-Taiwan tensions: Xi Jinping says "reunification" must be fulfilled*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081>
- BBC News. (2019). *Taiwan Profile*. BBC News. <https://www.bbc.com/news/world-asia-16178545>
- BBC News. (2024). *China and Taiwan: A really simple guide*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-59900139>
- BBC News Indonesia. (2024). *Ada apa di balik ketegangan China-Taiwan yang memanas?* BBC News Indonesia.

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c3gg3z79j3no>

- Bogdan, B., & Bilken, S. K. (1992). Quality research for education: An introduction to theory and methods. *Qualitative Research For Education An Introduction to Theory and Methods : : Allyn and Bacon.*, 106–156.
- Brands, H. (2023). *How Would China Take Over Taiwan? One of These 5 Strategies*. Bloomberg. <https://www.aei.org/op-eds/how-would-china-take-over-taiwan-one-of-these-5-strategies/>
- Britannica. (2024). *Ye Jianying*. Britannica. <https://www.britannica.com/biography/Ye-Jianying>
- Bukhari, S. S. H. (2016). The Dynamics of China-Taiwan Politico-Economic Interdependence: Divergence to Raproachment. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, 36(1), 25–37.
- Cathcart, A., & Nash, P. (2008). War Criminals and the Road to Sino-Japanese Normalization: Zhou Enlai and the Shenyang Trials, 1954-1956. *Twentieth-Century China*, 34(2), 89–111. <https://doi.org/10.1353/tcc.0.0014>
- Central Bank. (2019). *Annual Report 2019*.
- Chang, K. I., & Hayakawa, K. (2014). Details in the China-Taiwan free trade agreement. *Journal of Economic Integration*, 29(4), 676–699. <https://doi.org/10.11130/jei.2014.29.4.676>
- Chao, C. M. (1990). China's policy towards taiwan. *Pacific Review*, 3(2), 125–137. <https://doi.org/10.1080/09512749008718855>
- Chao, C. M. (2004). National security vs. economic interests: Reassessing Taiwan's mainland policy under Chen Shui-bian. *Journal of Contemporary China*, 13(41), 687–704. <https://doi.org/10.1080/1067056042000281431>
- Chen, C. (2009). China and Taiwan: A Future of Peace? A Study of Economic conomic Interdependence, dependence, Taiwanese Domestic Politics and Cross-Strait Relations. *Josef Korbel Journal of Advanced International Studies*, 1(Summer 2009), 14–25.
- Chen, C. (2023). *Prospects for Taiwan ' s Outward Investment in China*. 116578.
- Chen, C. (Frank), & Lai, Y. (Jane). (2015). Modeling and Optimizing Intermodal Logistics Route across the Taiwan Straits. *Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies*, 11, 666–677. https://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/11/0/11_666/_pdf
- Chen, E. N. H. (2003). *The Economic Integration on Taiwan and China and Its Implications for Cross-strait Relations*. July, 46. <https://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf%0Ahttp://program.s.wcfia.harvard.edu/fellows/files/chen.pdf>
- Chen, M. (2013). Embracing or resisting the giant neighbour: Debates between KMT and DPP on the mainland policy. *China Report*, 49(4), 399–411. <https://doi.org/10.1177/0009445513506649>

- Chen, V. Z., Kao, M., & Kuo, A. (2023). Taiwan: Inward FDI and its policy context, 2012. *World*, 3(2013), 1066–1081.
file:///Users/alex.neumann/Documents/Mendeley Desktop/Edited by Edited by/World/[Darren_Swanson]_Creating_Adaptive_Policies_A_Gui(BookSee.org).pdf
- Cheung, E. (2023). *A weapons stockpile and asymmetric warfare: how Taiwan could thwart an invasion by China – with America’s help*. CNN World.
<https://edition.cnn.com/2023/04/15/asia/taiwan-china-invasion-defense-us-weapons-intl-hnk-dst/index.html>
- Cheung, G. (2010). *New Approaches to Cross-Strait Integration*.
- Chi, C. (2004). *LEE TENG-HUI ’ S POLITICAL CROSS-STRAITS by TABLE OF CONTENTS*. February.
- Chiang, Y., & Chen, T. H. (2021). What’s in a name? Between “Chinese Taipei” and “Taiwan”: The contested terrain of sport nationalism in Taiwan. *International Review for the Sociology of Sport*, 56(4), 451–470.
<https://doi.org/10.1177/1012690220913231>
- Cook, M. (2005). *Taiwan ’ s Identity Challenge*. 2, 83–92.
- Copper, J. C. (2024). *The Ma Ying-jeou presidency*. Britannica.
<https://www.britannica.com/place/Taiwan/The-Ma-Ying-jeou-presidency>
- Copper, J. F. (2013). Taiwan: nation-state or province? In *Choice Reviews Online* (Vol. 51, Issue 03). Westview Press. <https://doi.org/10.5860/choice.51-1715>
- CPT Taiwan. (2024). *Interactive Data Visualisation of Bilateral Trade between Taiwan and China*. <https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA35E>
- Crane, B., Albrecht, C., Duffin, K. M., & Albrecht, C. (2018). China’s special economic zones: An analysis of policy to reduce regional disparities. *Regional Studies, Regional Science*, 5(1), 98–107.
<https://doi.org/10.1080/21681376.2018.1430612>
- Crossman, A. (2019). *Pros and Cons of Secondary Data Analysis*.
<https://www.thoughtco.com/secondary-data-analysis-3026536>
- Dagdag, E. E. (2003). Chen Shui-Bian and Taiwan-China (Cross-Strait) Relations : An Initial Assessment. *Asian Studies*, 39(1–2), 63–85.
- Dano, D. (2023). DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, MUNGKINKAH REUNIFIKASI CHINA–TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan*, 3(1), 1–12.
- Department for Business and Trade of United Kingdom. (2024). *Trade and Investment Factsheets*. Department for Business and Trade of United Kingdom.
<https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6672de5b64e554df3bd0db48/taiwan-trade-and-investment-factsheet-2024-06-20.pdf>

- Devlin, K., & Huang, C. (2020). *In Taiwan, Views of Mainland China Mostly Negative*. Pew Research Center.
<https://www.pewresearch.org/global/2020/05/12/in-taiwan-views-of-mainland-china-mostly-negative/>
- Ellis, S. (2023). *Taiwan Firms Pull Back in China as Investments Elsewhere Surge*. Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-20/taiwan-firms-pull-back-in-china-as-investments-elsewhere-surge>
- Fell, D. (2012). Government and politics in Taiwan. In *Government and Politics in Taiwan*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203567333>
- Ferenczy, Z. A. (2022). *EU-Taiwan Ties: Towards Resilient Global Value Chains*. China Observers. <https://chinaobservers.eu/eu-taiwan-ties-towards-resilient-global-value-chains/>
- Fujian International Investment Promotion Center. (2023). *Fujian's GDP increased by 3.8% year-on-year in the first half of the year, up 2.1 percentage points compared to the first quarter*. FDI Fujian.
<https://fdi.swt.fujian.gov.cn/en/show-19007.html>
- Garnaut, R., & Song, L. (2012). China: Twenty Years of Economic Reform. In *China: Twenty Years of Economic Reform*.
https://doi.org/10.26530/oapen_459887
- Glaser, B., & Billingsley, B. (2012). *Taiwan's 2012 Presidential Elections and Cross-Strait Relations*. November 2011.
- Government of Taiwan. (2021). *CROSS-STRAIT RELATIONS*.
https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php
- Grasso, J., Corrin, J. P., & Kort, M. (2017). Modernization and revolution in China. *Modernization and Revolution in China*, 1–239.
<https://doi.org/10.2307/2760322>
- Guan, E. (2023). *The Domino Effect: Abolishing the Imperial Examination System and the Downfall of the Qing Dynasty*.
- Günther, H., Alexandra, H., & Gudrun, S. (2022). *Dealing with Taiwan*. September, 3.
- Hashmi, S., & Yang, H. A. (2023). *Taiwan's New Southbound Policy: A Strategic Triumph*. National Interest. <https://nationalinterest.org/feature/taiwan's-new-southbound-policy-strategic-triumph-206896>
- Hassan, M. (2022). *Qualitative Data – Types, Methods and Examples*. Research Method. <https://researchmethod.net/qualitative-data/>
- Ho, M., & Lin, T. (2019). 11. The Power of Sunflower. The Origin and the Impact of Taiwan's Protest against Free Trade with China. In *The Umbrella Movement* (Issue December 2019). <https://doi.org/10.1515/9789048535248-013>

- Hsieh, Y., Chan, E., Lin, P., & Huang, J. (2023). *M&A Report 2023: Taiwan*. IFLR. <https://www.iflr.com/article/2bditz7a1pighy0ey30n4/expert-analysis/mergers-acquisitions-report/m-a-report-2023-taiwan>
- Hsiung, J. C. (2000). Diplomacy against adversity: Foreign relations under Chiang Ching-kuo. *Asian Affairs*, 27(2), 111–123. <https://doi.org/10.1080/00927670009598834>
- Huang, I. (2023). *China vs. Taiwan: The battle for diplomatic allies*. Common Wealth Magazine. <https://english.cw.com.tw/article/article.action?id=3407>
- Huang, J. (2017). Xi Jinping's Taiwan Policy: Boxing Taiwan In with the One-China Framework. In *Taiwan and China: Fitful Embrace*. <https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctt1w76wpm.16>
- Huang, N. (2022). *A Taiwan perspective on what is at stake after Nancy Pelosi's visit to Taiwan*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/articles/a-taiwan-perspective-on-what-is-at-stake-after-nancy-pelosis-visit-to-taiwan/>
- Hughes, E. S. (2023). *Japan and Taiwan: A Relationship Filled With Promise, But Not Without Limits*. Global Taiwan. <https://globaltaiwan.org/2023/04/japan-and-taiwan-a-relationship-filled-with-promise-but-not-without-limits/>
- Jacobs, J. B. (2015). Political Changes in Taiwan under Ma Ying-jeou: Partisan Conflict, Policy Choices, External Constraints and Security Challenges, edited by Jean-Pierre Cabestan and Jacques deLisle. Abingdon: Routledge, 2014. xviii + 307 pp. £85.00/US\$145.00 (hardcover). *The China Journal*, 74(July 2015), 196–199. <https://doi.org/10.1086/681738>
- Jacobs, J. B., & Liu, I. H. Ben. (2007). Lee Teng-hui and the idea of “Taiwan.” *China Quarterly*, 190, 375–393. <https://doi.org/10.1017/S0305741007001245>
- James, J. (2003). Bridging the global digital divide. *Bridging the Global Digital Divide*, June, 1–135. <https://doi.org/10.4337/9781843767169>
- Jean, R. J. B., Tan, D., & Sinkovics, R. R. (2011). Ethnic ties, location choice, and firm performance in foreign direct investment: A study of Taiwanese business groups FDI in China. *International Business Review*, 20(6), 627–635. <https://doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.02.012>
- Jennings, R. (2008). *Politics aside, Taiwan gives generously in China quake aid*. Reuters. <https://www.reuters.com/article/idUSTR289530/>
- Kasim, K. (2019). Power Shift in Taiwan and Its Implications on Cross-Strait Relations. *Power Shifts in East Asia and Their Implications for Asia-Europe Relations*. <https://doi.org/10.18778/8142-287-1.03>
- Kastner, S. L. (2009). Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond. *Political Conflict and Economic Interdependence Across the Taiwan Strait and Beyond*. <https://doi.org/10.1515/9781503627321>

- Kastner, S., & Rector, C. (2008). National unification and mistrust: Bargaining power and the prospects for a PRC/Taiwan agreement. *Security Studies*, 17(1), 39–71. <https://doi.org/10.1080/09636410801894159>
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (2011). Power and interdependence (4th ed.). In *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* (4th Editio, Vol. 44, Issue 8). Longman.
- Ko, J. W. (2004). *Cold War Triumph - Taiwan Democratized in Spite of U . S . Efforts*. 36(1).
- Kuo, C. C. (2021). Covid-19 in taiwan: Economic impacts and lessons learned. *Asian Economic Papers*, 20(2), 99–117. https://doi.org/10.1162/asep_a_00805
- Lee, C. (2017). Taiwan and China in a global value chain: the case of electronic industry. *University of Nottingham*, 01, 1–7.
- Lee, S. (1996). *American Policy Toward Taiwan : The Issue of the De Facto and De Jure Status of Taiwan and Sovereignty*. 2(2).
- Lee, S. (2022). *South Korean Angle on the Taiwan Strait: Familiar Issue, Unfamiliar Option*. Stimson. <https://www.stimson.org/2022/south-korean-angle-on-the-taiwan/>
- Li, X. (2016). *A History of the Modern Chinese Army*. University Press of Kentucky.
- Liang, X. (2024). *Mainland China pins its hopes on Taiwan's former leader Ma Ying-jeou after meeting Xi Jinping during 'journey of peace.'* South China Morning Post. <https://www.scmp.com/economy/article/3260729/global-impact-mainland-china-pins-its-hopes-taiwans-former-leader-ma-ying-jeou-after-meeting-xi>
- LIAO, C. S. (2020). Evaluation and Comparison of Bank Efficiency in Cross-Strait after ECFA. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 783–793. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.783>
- Lin, G. (2019). *Taiwan 's Party Politics and Cross-Strait Relations in Evolution*.
- Lin, S. S. (2016). *Taiwan's China Dilemma*. Stanford University Press.
- Lin, T. (2021). *Peace in the Taiwan Strait: the Triangular Relationship Among the United States, Taiwan, and China*. May.
- Lu, R. (2011). Building Engines for Growth and Competitiveness in China: Experience with Special Economic Zones and Industrial Clusters. In *Regional Studies* (Vol. 45, Issue 9). <https://doi.org/10.1080/00343404.2011.608259>
- Lychagin, A. I., & Komarov, I. (2017). *THE TAIWAN QUESTION: EXTERNAL AND INTERNAL DETERMINANTS*. 17(2), 290–300. <https://doi.org/10.22363/2313>
- MacArthur, F. (1972). *Joint Communiqué between the United States and China*.

- February 27, 1972. <https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/joint-communicate-between-united-states-and-china>
- Mainland Affairs Council. (2018). *Preliminary Statistics of Cross-Strait Economic Relations*.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=07E6EAF4852D1FD1&sms=66E8484ACCBF8A86&s=825F366A31FC8425
- Mainland Affairs Council. (2019). *A Year After Mainland China Announced the 31 Taiwan-Related Measures, the Implementation Results are Overstated and the so-called “Favor Taiwan and Encourage Integration” intends to “Benefit China and Promote Unification.”* Mainland Affairs Council.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=2BA0753CBE348412&s=420004972769A4DB
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2014). *Cross-Strait Trade in Service Agreement*. MAC.
https://www.mac.gov.tw/en/News_Content.aspx?n=69EE7CEA8C7550BB&sms=D6D0A9E658098CA2&s=2129B397A168C5CA
- Mainland Affairs Council, R. O. . (2022). *Summarized Results of the Public Opinion Survey on “Public Views on Current Cross-Strait Relations.”* 2, 63–66. <http://www.mac.gov.tw/public/Attachment/44239533553.pdf>
- Maizland, L. (2023). *Why China-Taiwan Relations Are So Tense*. CFR.
<https://www.cfr.org/backgrounder/china-taiwan-relations-tension-us-policy-biden>
- Matsuda, Y. (2015). Cross-Strait Relations under the Ma Ying-jeou administration: From Economic to Political Dependence? *Journal of Contemporary East Asia Studies*, 4(2), 3–35.
<https://doi.org/10.1080/24761028.2015.11869083>
- McSweeney, B., & Happonen, E. (2012). Pre-Deal deal Management. In *The Handbook of Mergers and Acquisitions* (pp. 171–194).
- Mikron Holding AG. (2018). *Annual Report 2018*.
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (1994). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.).
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2008). *Value By Country: Trade between Taiwan and Mainland China in 2008*.
<https://web02.mof.gov.tw/njswww/webMain.aspx?sys=220&ym=9700&yml=9700&kind=21&type=1&funid=e9111&cycle=4&outmode=0&compmode=00&ratenm=Annual growth rate&outkind=1&fld0=1&cod02=1&codlst1=111&rdm=R161528>
- Ministry of Finance Republic of Taiwan. (2021). *Statistic of External Trade*.
- Miranville, A. (2021). Annual report 2020. *AIMS Mathematics*, 6(12), 14064–14068. <https://doi.org/10.3934/math.2021814>

- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosakarya.
- Munro, A. (2024). *Taiwan Strait Crises*. Britannica.
<https://www.britannica.com/event/Taiwan-Strait-crises>
- Muyard, F. (2012). Taiwanese national identity, cross-strait economic interaction, and the integration paradigm. In *National Identity and Economic Interest: Taiwan's Competing Options and Their Implications for Regional Stability*.
<https://doi.org/10.1057/9781137011053>
- Nakhatakyan, E. O. (2021). Political economy of cross-strait relations. *Vestnik RUDN. International Relations*, 21(1), 136–147.
<https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-1-136-147>
- Nouwens, M. (2023). *China and its Military Ambitions – More than*. 96–107.
- Office of the President Republic of China (Taiwan). (2009). *President Ma Meets Negotiation Delegation from Taiwan's Straits Exchange Foundation*.
<https://english.president.gov.tw/NEWS/3134>
- Office of the States. (2020). *The Taiwan Straits Crises: 1954–55 and 1958*.
<https://history.state.gov/milestones/1953-1960/taiwan-strait-crises>
- Okenna, N. P. (2020). The Importance of International Trade to the Economies of Developing Countries. *SSRN Electronic Journal*, 9.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.3664322>
- Panter, J. G., & Luo, S. (2021). China's Maritime Militia and Fishing Fleets. *Military Review*, 1(January-February), 8–17.
<https://www.armyupress.army.mil/Journals/Military-Review/English-Edition-Archives/January-February-2021/Panter-Maritime-Militia/>
- Polachek, S. W. (1980). Conflict and Trade. *Journal of Conflict Resolution*, 24(1), 55–78. <https://doi.org/10.1177/002200278002400103>
- Qiang, X. (2020). Selective Engagement: Mainland China's Dual-Track Taiwan Policy. *Journal of Contemporary China*, 29(124), 535–552.
<https://doi.org/10.1080/10670564.2019.1677363>
- Rana W. (2015). Theory of Complex Interdependence: A Comparative Analysis of Realist and Neoliberal Thoughts. In *International Journal of Business and Social Science* (Vol. 6, Issue 2).
https://ijbssnet.com/journals/Vol_6_No_2_February_2015/33.pdf
- Ranjan, R. (2016). *Taiwan's Election 2016 and Cross -Strait Policy*.
- Reitz, J. M. (2014). *Online Dictionary for Library and Information Science*.
https://odlis.abc-clio.com/odlis_1.html
- Rios, D. N. (2010). Conflicts and Survival in the “Voluntary Repatriation” of Chinese POWs in the Korean War A. In *UC San Diego Electronic Theses and Dissertations*.
- Romualdi, K. B., & Rochmat, S. (2023). Telaah Potensi Reunifikasi Tiongkok Terhadap Taiwan: Tinjauan Teori Attitudinal Factor. *Review of International*

- Relations*, 5(1), 41–53. <https://doi.org/10.24252/rir.v5i1.35279>
- Rubinstein, M. A. (2007). *Taiwan: A New History*. M.E. Sharpe.
- Rubinstein, M. A. (2015). *Taiwan: A New History*.
- Sarotte, M. E. (2014). Princeton Studies in International History and Politics (1989). In *Princeton Studies in International History and Politics (1989)*. <https://doi.org/10.1515/9781400852307>
- Sarwono, J. (2010). *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Andi.
- Scobell, A. (2014). China and Taiwan: Balance of rivalry with weapons of mass democratization. *Political Science Quarterly*, 129(3), 449–468. <https://doi.org/10.1002/polq.12216>
- Scott, D. (2019). Taiwan's Pivot to the Indo-Pacific. *Asia-Pacific Review*, 26(1), 29–57. <https://doi.org/10.1080/13439006.2019.1618602>
- Shacheng, W. (2023). *Cross-Straits bonds boon for Taiwan*. China Daily. <https://global.chinadaily.com.cn/a/202302/07/WS63e187c3a31057c47ebad3b8.html>
- Shih-chung, L. (2020). *Taiwan faces changed economic outlook in Asia following COVID-19*. Brookings Education. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/06/29/taiwan-faces-a-changed-economic-outlook-in-asia-following-covid-19/>
- Shiquan, X. (2000). The one-china principle: The positions of the communist party of China (CCP), the Kuomintang (KMT), and the Democratic Progressive Party (DPP). *American Foreign Policy Interests*, 22(6), 22–31. <https://doi.org/10.1080/10803920.2000.10392071>
- Song, L., & Zhou, Y. (2023). *China is invaluable to global value chains*. East Asia Forum. <https://eastasiaforum.org/2023/07/24/china-is-invaluable-to-global-value-chains/>
- Sudaryanto. (1993). *Metode dan aneka teknik analisis bahasa: Pengantar penelitian wahana kebudayaan secara linguistik*. Duta Wacana University Press.
- Sullivan, J., & Lowe, W. (2010). Chen Shui-bian: On independence. *China Quarterly*, 203, 619–638. <https://doi.org/10.1017/S0305741010000627>
- Taiwan Today. (1955). *The Sino-American Treaty of Mutual Defense/The Mirage of Two Chinas*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=7745>
- Taiwan Today. (1988). *Bombardment Of Quemoy*. Taiwan Today. <https://taiwantoday.tw/news.php?unit=4&post=4657>
- The Economist. (2019). *China tries to deepen economic ties with Taiwan yet more*. <https://www.economist.com/asia/2019/11/07/china-tries-to-deepen-economic-ties-with-taiwan-yet-more>

- The Observatory of Economic Complexity. (2023). *China-Chinese Taipei Trade*.
<https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/twn>
- The People's Government of Fujian Province. (2024). *Highlights of Fujian Provincial Government Work Report 2024*.
https://www.fujian.gov.cn/english/news/202403/t20240305_6409168.htm
- The World Bank. (2014). Chinese Special Economic Zones. *China Development Bank*, 2.
[http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing in Africa Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf](http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Event/Africa/Investing%20in%20Africa%20Forum/2015/investing-in-africa-forum-chinas-special-economic-zone.pdf)
- Tim Penyusun. (2021). *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*.
- Times of India. (2023). *Taiwanese firms exiting China amidst rising tension*. Times of India. <https://timesofindia.indiatimes.com/business/international-business/taiwanese-firms-exiting-china-amid-rising-tensions/articleshow/99705323.cms?from=mdr>
- Trojnar, E. (2016). *TAIWAN ' S ECONOMIC SECURITY IN THE CONTEXT OF CROSS-STRAIT INTERDEPENDENCE*. 139–149.
- Tsai, T. C., & Liu, T. T. T. (2017). Cross-Strait relations and regional integration: A review of the Ma Ying-Jeou era (2008–2016). *Journal of Current Chinese Affairs*, 46(1), 11–35. <https://doi.org/10.1177/186810261704600102>
- Tubilewicz, C. (2005). Taiwan and the Soviet Union during the Cold War: Enemies or ambiguous friends. *Cold War History*, 5(1), 75–86.
<https://doi.org/10.1080/1468274042000339179>
- UNCTAD. (2002). *World Investment Report 2002: Transnational Corporations and Export Competitiveness*.
- UNCTAD. (2017). *Investment and the digital economy*.
<https://doi.org/10.18356/0e077c50-en>
- US-Congress. (1979). *Taiwan Relations Act: Public Law 96-8*. 5, 8.
<https://uscode.house.gov/statutes/pl/96/8.pdf>
- Vest, C., Kratz, A., & Goujon, R. (2022). *The Global Economic Disruptions from a Taiwan Conflict*. Rhodium Group. <https://rhg.com/research/taiwan-economic-disruptions/>
- VOA. (2020). *China Is Buying Up Computer Chips Made in Taiwan Title*.
<https://learningenglish.voanews.com/a/china-is-buying-up-computer-chips-made-in-taiwan/5670744.html>
- Walker, T. C. (2013). A circumspect revival of liberalism: Robert O. Keohane and Joseph S. Nye's Power and Interdependence. *Classics of International Relations: Essays in Criticism and Appreciation*, 148–156.
<https://doi.org/10.4324/9780203761472-20>

- Wan, Y. K. P., & Bramwell, B. (2015). Political economy and the emergence of a hybrid mode of governance of tourism planning. *Tourism Management*, 50, 316–327. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.03.010>
- Wang, V. W. (2002). The Chen Shui-Bian Administration's Mainland Policy: Toward a Modus Vivendi or Continued Stalemate? *American Asian Review*, 20(3), 91–124.
- Wei, C. H. (2016). China-Taiwan relations and the 1992 consensus, 2000-2008. *International Relations of the Asia-Pacific*, 16(1), 67–95. <https://doi.org/10.1093/irap/lcv009>
- Weihua, C. (2013). *Cross-Straits interaction Title*. China Daily. https://www.chinadaily.com.cn/opinion/2013-06/14/content_16618587.htm
- Westad, O. A. (2003). *Decisive Encounters: The Chinese Civil War, 1946-1950*. Stanford University Press.
- Williams, L. (2022). *Why Taiwan matters to China (and the rest of the world)*. <https://www.investmentmonitor.ai/special-focus/ukraine-crisis/taiwan-matters-china-semiconductors-russia/>
- Wong, P. Y., & Tang, T. C. (2020). Should I Stay or Should I Go? Taiwan's Foreign Direct Investment (FDI) Inflows and Outflows. *Contemporary CHinese Political Economy and Strategic Relations: An International Journal*, 6(May 2020), 263=291.
- World Bank. (2019). *World Development Indicators*. <https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators>
- Xin, Q. (2021). Having much in common? Changes and continuity in Beijing's Taiwan policy. *Pacific Review*, 34(6), 926–945. <https://doi.org/10.1080/09512748.2020.1773908>
- Yang, A. N. (1996). *The 1996 Missile Exercises : China ' s political manipulation and Taiwan ' s crisis management*. March.
- Yongnoan, Z. (2023). *How Chinese civilization contributes to modernity*. Global Times China. <https://www.globaltimes.cn/page/202306/1292846.shtml>
- Yu, G. T. (1991). The 1911 Revolution: Past, Present, and Future. *Asian Survey*, 31(10), 895–904. <https://doi.org/10.2307/2645062>
- Yuan, X. (2010). How The CPC Taiwan Working Committee Came To Be Destroyed. In *ACS Nano* (Vol. 4, Issue 4, pp. 1921–1926). <http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1120700020921110%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.reuma.2018.06.001%7B%25%7D0Ahttps://doi.org/10.1016/j.arth.2018.03.044%7B%25%7D0Ahttps://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1063458420300078?token=C039B8B13922A20>
- Zaroni, N. A. (2015). Globalisasi Ekonomi dan Implikasinya Bagi Negara Berkembang. *Al-Tijary*, 1(1), 1–22.
- Zhang, L. (2012). *Cross-strait Economic Interdependence and the Prospects for*

Peace between Mainland China and Taiwan.